

I.B.b.01.b.2.3

LAPORAN PENELITIAN

**ANALISIS KESENJANGAN GENDER DAN
KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**OLEH:
HERIEN PUSPITAWATI
TIN HERAWATI**

**KERJASAMA DEPT. ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN - PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2006**

LAPORAN PENELITIAN

ANALISIS KESENJANGAN GENDER DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

OLEH:
HERIEN PUSPITAWATI
TIN HERAWATI

BAB I PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang 1

I.B. Tujuan 2

BAB II PENDAHULUAN

PERKEMBANGAN PEMERINTAH JAWA BARAT

I.A. Sejarah Pemerintahan Gender dan Anak Indonesia 12

1. Perkembangan Rangka Gender dan Anak Indonesia 12

2. Sejarah Pendidikan dan Penelitian Gender (KOG) 15

3. Sistem dan Akademi Penelitian Gender Berbasis Universitas 16

4. Sistem Riset Gender 17

I.B. Konsep Pengkajian Gender (PUG) 17

1. Konsep Pengkajian Gender (PUG) 17

2. Latar Belakang Konsep Pengkajian Gender 18

3. Alasan Penting PUG dalam Bidang Pendidikan 19

4. Konsep dan Akademi Penelitian PUG dalam Bidang Pendidikan 19

I.C. Analisis Gender Siswa Umum 21

1. Menganalisis Analisis Gender 21

2. Perguruan Gender Analisis Perempuan (GAP) 22

3. Langkah-langkah Gender Analisis Perempuan (GAP) 22

**BAB III ANALISIS KESENJANGAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI
JAWA BARAT TAHUN 2000-2006**

I.A. Gerakan Umum, Strategi Pendidikan dan Pembelajaran
Gender di Bidang Pendidikan 23

1. Gerakan Umum dan Pembelajaran Gender pada Pihak
Aktor Perempuan di Bidang Pendidikan 23

**KERJASAMA DEPT. ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN - PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2006**

10

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.A Latar Belakang	1
I.B Landasan Hukum PUG di Bidang Pendidikan	4
I.C Tujuan	11
BAB II PENGARUSTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	
PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT	12
II.A Konsep Pengarustamaan Gender dan Jenis Kelamin	12
1. Pemedaan Konsep Gender dan Jenis Kelamin	12
2. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	15
3. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender Secara Umum dan	
Dalam Bidang Pendidikan	17
II.B Konsep Pengarustamaan Gender (PUG)	17
1. Definisi Pengarustamaan gender (PUG)	17
2. Latar Belakang Adanya Pengarustamaan Gender	18
3. Alasan Penting PUG dalam Bidang Pendidikan	19
4. Komponen Kunci Keberhasilan PUG dalam Bidang	
Pendidikan	19
II.C Analisis Gender Secara Umum	21
1. Macam-macam Analisis Gender	21
2. Pengertian <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)	26
3. Langkah-langkah <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)	27
BAB III ANALISIS KESENJANGAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI	
JAWA BARAT TAHUN 2005-2006	30
III.A Gambaran Umum, Kondisi Pendidikan dan Permasalahan	
Gender di Bidang Pendidikan	30
1. Gambaran Umum dan Permasalahan Gender pada Pilar	
Akses Pemerataan di Bidang Pendidikan	31
2. Gambaran Umum dan Permasalahan Gender pada Pilar Mutu	
dan Relevansi di Bidang Pendidikan	47
3. Gambaran Umum dan permasalahan Gender pada Pilar Tata	
Kelola dan Pencitraan di Bidang Pendidikan	50
III.B Isu Kesenjangan Gender dan Analisis Faktör yang Berepengaruh	
Terhadap Permasalahan Gender	54
1. Isu Kesenjangan Gender	54
2. Analisis Faktor yang Berepengaruh Terhadap Permasalahan	
Gender	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI JAWA BARAT 62

Kesimpulan 62

IV.A Arah Kebijakan 64

IV.B Kebijakan Strategis 68

IV.C Target Prioritas pada Tahun 2007 71

IV.D Tujuan 71

IV.E Strategi 72

IV.F Program dan Rencana Aksi 72

IV.G Rencana Aksi 74

BAB V PENUTUP 78

BAB VI DAFTAR PUSTAKA 79

1. Komposisi penduduk menurut umur kelamin dan jenis kelamin di Jawa Barat Tahun 2006 31

2. Komposisi penduduk yang sedang berkembang menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Jawa Barat Tahun 2006 32

3. Pelaksanaan Pelaksanaan Program PAUD Kejurug di Umur 0-3 Tahun 0-1-4-6 Tahun sampai dengan Tahun 2006 32

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2006 34

5. Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Menengah Pertama dan jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2006 37

6. Proporsi penduduk memperoleh ijazah Tertinggi Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2006 42

7. Rekapitulasi Status Pekerja Ijen Regional (LRI) dan Kalkulasi Poin A-B-C Regional Jawa Barat Tahun 2006 43

8. Komposisi Tahun Tenaga Pendidik Non-Formal Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 45

9. Proposal Perolehan PLS, Peningkatan Bekerja, TLD dan FDI Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2006 50

10. Rekapitulasi Komposisi Kepala Sekolah dan Berlingkat Jaring Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2006 51

11. Rekapitulasi Komposisi Jabatan Dinas Pendidikan dan Berlingkat Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2006 52

12. Laju angka putus dan Peningkatan Nurtan Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2001-2006 53

13. Program Kerja Lembaga PPM Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005 53

14. Art Gender Anak Laki-laki dan Perempuan Bapa Orangtua 58

15. Faktor-faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Kesetaraan Gender di Bidang Pendidikan 60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tinjauan Kebijakan Terkait dengan Gender	6
Tabel 1.2 Pengembangan Substansi Misis kementerian Pemberdayaan Perempuan (Rencana Strategis kementerian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2009)	8
Tabel 2.1 Streotipe Karakteristik Perempuan dan Laki-laki	13
Tabel 2.2 Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Seks) dan Gender	14
Tabel 2.3 Alat-alat Analisis Gender dari Moser	23
Tabel 3.1 Komposisi Penduudk Menurut Umur Sekolah dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005	31
Tabel 3.2 Komposisi Pneduduk yang Sedang Bersekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005	32
Tabel 3.3 Perencanaan Penanganan Program PAUD Kelompok Umur 0-3 Tahun dan 4-6 Tahun sampai dengan Tahun 2008	32
Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompk Umur dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005.....	33
Tabel 3.5 Angka partisipasi Kasar (APK) Penduudk Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005	37
Tabel 3.6 Proporsi penduduk Memperoleh Ijazah Tertinggi Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005	42
Tabel 3.7 Rekapitulasi Siswa Peserta Ujian Nasional (UN) dan Kelulusan Paket A-B-C Propinsi Jawa Barat Tahun 2005	45
Tabel 3.8 Komposisi Tutor/ Tenaga Pendidik Non-Formal Provinsi Jawa Barat Tahun 2004	49
Tabel 3.9 Proporsi Penilik PLS, Pamong Belajar, TLD dan FDI Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005	50
Tabel 3.10 Rekapitulasi Komposisi Kepala Sekolah dari Berbagai Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2006 ..	51
Tabel 3.11 Rekapitulasi Komposisi Jabatan Dinas Pendidikan dari Berbagai Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2006	52
Tabel 3.12 Lembaga Kursus dan Pimpinan Kursus Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2001-2005	53
Tabel 3.13 Proporsi Ketua Lembaga PKBM Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005	53
Tabel 3.14 Arti Seorang Anak Laki-laki dan Perempuan Bagi Orangtua	59
Tabel 3.15 Faktor-faktor Sosial Budaya yang Menyebabkan Kesenjangan Gender di Bidang Pendidikan	60

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2006-2008
(yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan Jawa Barat)
(PUG dapat diintegrasikan pada program) 70

Tabel 4.2 Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007 75

Gambar 2.1	Kerangka Metode Gender Analysis Pathway (GAP)	28
Gambar 3.1	APS Penduduk di Jawa Barat dengan Berbagai Kondisi pada Tahun 2005	34
Gambar 3.2	Departas APS Penduduk di Jawa Barat yang berumur 7-12 Tahun pada Tahun 2005	35
Gambar 3.3	Departas APS Penduduk di Jawa Barat yang berumur 13-16 Tahun pada Tahun 2005	36
Gambar 3.4	Departas APS Penduduk di Jawa Barat yang berumur 17-18 Tahun pada Tahun 2005	36
Gambar 3.5	Departas APS Penduduk di Jawa Barat yang berumur 19-24 Tahun pada Tahun 2005	36
Gambar 3.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK sampai SMA di Jawa Barat Tahun 2005	37
Gambar 3.7a	Proporsi Siswa SMA Peserta UN Berbasis di Jawa Barat 2003-2005	38
Gambar 3.7b	Proporsi Siswa SMA Peserta UN IPA di Jawa Barat 2003-2005	38
Gambar 3.7c	Proporsi Siswa SMA Peserta UN IPS di Jawa Barat 2003-2005	39
Gambar 3.8a	Departas Penduduk di Jawa Barat yang Tidak Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi	40
Gambar 3.8b	Departas Penduduk Usia 7-12 Tahun yang Belum Sekolah	40
Gambar 3.8c	Departas Penduduk Usia 7-12 Tahun yang Tidak Sekolah	40
Gambar 3.8d	Departas Penduduk Usia 13-15 Tahun kelas Menengah Kabupaten/Kota yang Tidak Sekolah Lagi	40
Gambar 3.8e	Departas Penduduk Usia 16-18 Tahun kelas Menengah Kabupaten/Kota yang Tidak Sekolah Lagi	41
Gambar 3.8f	Departas Penduduk Usia 19-24 Tahun kelas Menengah Kabupaten/Kota yang Tidak Sekolah Lagi	41
Gambar 3.9	Proporsi Partisipasi Ijazah Tertinggi Menurut Jenjang Sekolah di Jawa Barat Tahun 2005	42
Gambar 3.10	Proporsi perempuan Sekolah Dasar di Jawa Barat Tahun 2005	43
Gambar 3.11	Proporsi Pusia Sekolah Dasar di Jawa Barat Tahun 2005	44
Gambar 3.12a	Proporsi Penduduk 16 Tahun keatas yang Buta Aksara berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005	45
Gambar 3.12b	Proporsi Penduduk 15 Tahun keatas yang Melek Aksara berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Metode <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)	28
Gambar 3.1 APS Penduduk di Jawa Barat dalam Berbagai Kondisi pada Tahun 2005	34
Gambar 3.2 Disparitas APS Penduduk di Jawa Barat yang berumur 7-12 Tahun pada Tahun 2005	35
Gambar 3.3 Disparitas APS Penduduk di Jawa Barat yang berumur 13-15 Tahun pada Tahun 2005	35
Gambar 3.4 Disparitas APS Penduduk di Jawa Barat yang berumur 16-18 Tahun pada Tahun 2005	35
Gambar 3.5 Disparitas APS Penduduk di Jawa Barat yang berumur 19-24 Tahun pada Tahun 2005	36
Gambar 3.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingka TK sampai SM di Jawa Barat Tahun 2005	37
Gambar 3.7a Proporsi Siswa SMA Peserta UN Bahasa di Jawa Barat 2003-2006	38
Gambar 3.7b Proporsi Siswa SMA Peserta UN IPA di Jawa Barat 2003-2006	38
Gambar 3.7c Proporsi Siswa SMA Peserta UN IPS di Jawa Barat 2003-2006	39
Gambar 3.8a Disparitas Penduduk Jawa Barat yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi	39
Gambar 3.8b Disparitas Penduduk Usia 7-12 Tahun yang Belum Sekolah	40
Gambar 3.8c Disparitas Penduduk Usia 7-12 Tahun yang Tidak Sekolah	40
Gambar 3.8d Disparitas Penduduk Usia 13-15 Tahun keatas Menurut Kabupaten/ Kota yang Tidak Sekolah Lagi	40
Gambar 3.8e Disparitas Penduduk Usia 16-18 Tahun keatas Menurut Kabupaten/ Kota yang Tidak Sekolah Lagi	41
Gambar 3.8f Disparitas Penduduk Usia 19-24 Tahun keatas Menurut Kabupaten/ Kota yang Tidak Sekolah Lagi	41
Gambar 3.9 Proporsi Perolehan Ijazah Tertinggi Menurut Jenjang Sekolah di Jawa Barat Tahun 2005	42
Gambar 3.10 Proporsi mengulang Sekolah Siswa di Jawa Barat Tahun 2005	43
Gambar 3.11 Proporsi Putus Sekolah Siswa di Jawa Barat Tahun 2005	44
Gambar 3.12a Proporsi Penduduk 15 Tahun keatas yang Buta Aksara berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005	45
Gambar 3.12b Proporsi Penduduk 15 Tahun keatas yang Melek Aksara berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005	46

Gambar 3.12c Proporsi Penduduk 15 Tahun keatas yang Buta Aksara Menurut Kab/ Kota di Jawa Barat Tahun 2005	46
Gambar 3.12d Disparitas Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Buta Aksara Menurut Kab/ Kota di Jawa Barat Tahun 2006	47
Gambar 3.13a Ilustrasi Gambar Bahan Ajar: Peran Laki-laki pada Sektor Publik Pada Posisi Utama dan Perempuan Sebagai Posisi Kedua	48
Gambar 3.13b Ilustrasi Gambar Bahan Ajar: Peran Laki-Laki pada Sektor Publik	48
Gambar 3.13c Ilustrasi Gambar Bahan Ajar: Peran Kegiatan Siswa Laki-Laki	49
Gambar 3.14 Proporsi Kepala Sekolah berdasarkan Jenis Kelamin di Berbagai Jenjang Pendidikan di Jawa Barat Tahun 2006	51
Gambar 3.15 Proporsi penulis Buku Ajar Berdasarkan jenis Kelamin di Propinsi Jawa Barat Tahun 2006	54
Gambar 3.16 Persentase Penduduk Perempuan (10 Tahun Ke Atas) Menikah Berdasarkan Umur Perkawinan Pertama Di Jawa Barat Tahun 2005	58
Gambar 3.17 Persentase Perempuan di Jawa Barat yang Kawin Pertama Kali pada Umur di Bawah atau Sama dengan 18 Tahun pada Tahun 2005	59
Gambar 4.1 Keterkaitan antara Isu-Isu Kesenjangan Gender, Strategi Kebijakan dan Rencana Aksi di Bidang Pendidikan	63
Gambar 4.2 Tiga "Core Business" Bidang Pendidikan di Jawa Barat	66
Gambar 4.3 5 Strategi dan 14 Langkah menuju Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun	67
Gambar 4.4 Kerangka Pikir Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pendidikan di Jawa Barat	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1a <i>Checklist</i> Kerangka Harvard	81
Lampiran 1b Keterangan Lebih Lanjut Analisis Gender Moser	85
Lampiran 2 Komposisi Penduduk yang Sedang Bersekolah Menurut Selang Usia Dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2005	86
Lampiran 3 Rekapitulasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kelompok Usia 7-12; 13-15; 16-18; 19-24 Tahun Menurut Kabupaten/ Kota	87
Lampiran 4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/ Kota	89
Lampiran 5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13 -15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota	90
Lampiran 6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota	91
Lampiran 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 19 - 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota	92
Lampiran 8 Rekapitulasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK sampai SM Menurut Kabupaten/ Kota	93
Lampiran 9 Rekapitulasi Siswa SMA Peserta Ujian Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2006	95
Lampiran 10 Penduduk Usia 7-12 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota	96
Lampiran 11 Penduduk Usia 13-15 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota	97
Lampiran 12 Penduduk Usia 16-18 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota	98
Lampiran 13 Penduduk Usia 19 - 24 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota	99
Lampiran 14 Jumlah Siswa Mengulang, Putus Sekolah, Naik Tingkat dan Lulusan Menurut Jenis Kelamin Propinsi Jawa Barat 2005	100
Lampiran 15 Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SD+MI	104
Lampiran 16 Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SMP+MTS	107
Lampiran 17 Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SMA+MA	109
Lampiran 18 Ko Hort Per 1000 Siswa (Laki-laki) SM+MA	113
Lampiran 19 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Buta Aksara Menurut Kab/Kota Tahun 2006	114
Lampiran 20 Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Umur Perkawinan Pertama Menurut Kabupaten/ Kota	116

BAB I PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNESCO telah menandatangani Kesepakatan Dakar mengenai Kebijakan Pendidikan Untuk Semua atau PUS (*Education for All*), yang di dalamnya mencanangkan beberapa hal penting berkenaan kesetaraan gender dalam pendidikan, diantaranya menghapus disparitas gender di pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005, dan mencapai persamaan pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar yang berkualitas baik. Komitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pendidikan tersebut diperkuat dengan ditetapkannya INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan kepada pejabat negara, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001).

Menindaklanjuti kesepakatan Dakar dan merespon terhadap Inpres No. 9 Tahun 2000 tersebut, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) "Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan" di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Di pihak lain, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 11 ayat (2), bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu dari bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (Anonymous, 2002). Dengan demikian, RAN tersebut perlu ditindaklanjuti pada tingkat daerah, yakni tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD).

Seiring dengan komitmen Internasional di atas, telah diakui secara terbuka bahwa masih banyak kendala yang ditemui di Indonesia untuk mewujudkan komitmen tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia telah diantisipasi dalam perencanaan kebijakan jangka menengah. Dituliskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM di Bab 1 tentang Permasalahan dan agenda pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 bahwa salah satu masalah nasional adalah adanya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah dikarenakan adanya pembangunan pendidikan yang belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, VISI Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 diarahkan untuk mencapai:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia, dan

3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan VISI pembangunan nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) MISI Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009, meliputi:

1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera

Di dalam mewujudkan VISI dan menjalankan MISI pembangunan nasional tersebut di atas ditempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan, yaitu:

1. Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasarnya yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
2. Strategi Pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi ini diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Hak-hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. Pemenuhan hak dasar diantaranya adalah hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan (RPJM, tahun 2004-2009).

Seiring dengan VISI Pembangunan Nasional di atas, maka VISI Departemen Pendidikan Nasional sampai dengan Tahun 2025 adalah "Menciptakan Insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif". Merujuk pada VISI Departemen Pendidikan Nasional, maka VISI Propinsi Jawa Barat adalah mewujudkan "Jawa Barat Dengan Iman dan Taqwa Sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010". Sedangkan VISI dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat adalah "Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Menjadi Akselerator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Manajemen Pendidikan yang Berkualitas Guna Mendukung Visi Jawa Barat 2010". Selanjutnya, berdasarkan VISI tersebut, maka MISI Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat meliputi:

1. Membangun Koordinasi dan Sinergisme antar Lini, Unit dan Institusi dalam manajemen pendidikan di Jawa Barat yang terintegrasi berdasarkan tugas, fungsi dan peran masing-masing.
2. Menciptakan suasana kondusif di dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, dan
3. Meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Berkaitan dengan komitmen International tentang *Education for All, Millenium Development Goals*, dan juga untuk mewujudkan *Kesetaraan dan Keadilan Gender* di Bidang Pendidikan, maka berbagai program pendidikan telah dilaksanakan pemerintah dalam mewujudkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Program pendidikan yang dilaksanakan diantaranya adalah Program Wajib Belajar 6 (enam) tahun pada tahun 1984 dan Program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun pada tahun 1994. Untuk merespon terhadap penduduk yang tidak mendapatkan akses pada pendidikan formal, pemerintah telah melaksanakan beragam program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), serta Program Lintas Sektoral. Walaupun demikian, statistik tentang pembangunan manusia dan kesetaraan gender, serta hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam pembangunan di Bidang Pendidikan di Indonesia (Suryadi dan Pratitis, 2001).

Secara khusus, komitmen Propinsi Jawa Barat terhadap *Education for all* atau Pendidikan untuk Semua (PUS) dan Inpres No. 9 Tahun 2000 ditunjukkan oleh adanya kebijakan yang memprioritaskan Pembangunan Jawa Barat 2004 dalam rangka "Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia Jawa Barat". Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi yang ditempuh antara lain adalah melalui Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (2003) telah menetapkan indikator kinerja berupa pencapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama 9 tahun, Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 98,8 % dan Angka Partisipasi Murni (APM) berturut-turut untuk SD, SLTP dan SLTA sebesar 99,3 % , 94,8 % dan SLTA 53,8 % dalam upaya menuju IPM 80 pada tahun 2010.

Dalam peta Indonesia, dibandingkan dengan propinsi lain, pada tahun 2002 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Propinsi Jawa Barat menduduki urutan ke 17, sementara dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) menduduki urutan ke 21 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada urutan ke 24 (BPS, BAPPENAS, and UNDP, 2004). Rendahnya IPG Jawa Barat akan menghambat pencapaian target pencapaian Visi Jawa Barat untuk mencapai IPM sebesar 80, karena dua variabel dari indikator pendidikan pada IPG, yaitu Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Selain itu, belum meratanya kinerja pendidikan di propinsi ini, terbukti bahwa dari 16 kabupaten dan 6 kota yang ada di Jawa Barat, terdapat 12 kabupaten dan 4 kota yang IPG-nya tergolong sedang, sisanya tergolong rendah (BPS, BAPPENAS, and UNDP, 2004).

Agar penyusunan kebijakan di Bidang Pendidikan yang Responsif Gender dapat optimal, maka perlu dilakukan penyusunan "*Position Paper*" yang merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan pendidikan yang berkeadilan gender sehingga *Education for All* sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Dakar benar-benar terwujud melalui pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Sebelum menguraikan tujuan penyusunan position paper, terlebih dahulu diuraikan landasan hukum dari kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan.

I.B. LANDASAN HUKUM PUG DI BIDANG PENDIDIKAN

Pijakan dalam upaya PUG adalah Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan RPJMN tahun 2004-2009 sebagai landasan operasional. Secara terinci, landasan hukum PUG adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan pasal 33.
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 menjamin Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang intinya mengenai pembentukan lembaga setingkat lembaga negara yang terutama bertugas memantau dan memediasi masalah HAM di Indonesia.
5. keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal (1): Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
6. Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang pada intinya mengenai instruksi Presiden kepada seluruh Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian RI; Jaksa Agung; Gubernur; dan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan PUG, dan memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman PUG.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) khususnya butir 22-c mengenai penetapan pedoman dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan butir 22-e mengenai penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.
8. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan nomor 23/SK/MENEG.PP/VI/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom.
9. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak
10. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
11. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
12. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah yang

menginstruksikan setiap institusi pemerintah melaksanakan PUG dengan cara memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakannya.

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 26 ayat (1), pada intinya mengenai salah satu tugas Kepala Daerah yaitu untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan
 - b. Pasal 150 ayat (3) butir (d), pada intinya menyatakan bahwa dalam perumusan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat.
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
16. Peraturan Presiden (Perpres) No.7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, bahwa:
 - a. Bab 12:
 - (1) Bagian b (1), tentang "Terjaminnya Keadilan Gender dalam berbagai Perundangan, Program pembangunan, dan Kebijakan Publik",
 - (2) Bagian c (2), tentang "Meningkatkan Taraf Pendidikan dan Layanan Kesehatan serta Bidang Pembangunan lainnya, untuk Mempertinggi Kualitas Hidup dan Sumberdaya Kaum Perempuan",
 - b. Bab 27:
 - (1) Pengantar: tentang "Pendidikan Sebagai Salah Satu Cara untuk Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender, Pemahaman Nilai-nilai Budaya dan Multikulturalisme, serta Keadilan Sosial"
 - (2) Bagian c (7), tentang Arah kebijakan "Menurunkan Kesenjangan Partisipasi Pendidikan antar Kelompok Masyarakat dengan Memberikan Akses yang Lebih Besar kepada Kelompok Masyarakat yang selama ini Kurang dapat Terjangkau oleh Layanan Pendidikan..."
17. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2006, Bab 26 (C) bahwa Pembangunan pendidikan dibedakan pada dua kerangka arah kebijakan, yaitu keangka anggaran dan kerangka regulasi dengan tetap memperhatikan kesepaatan-kesepakatan internasional, seperti : *Education For All, Convention on The Right of Child, Millenium Development Goals, World Summit on Sustainable Development*
18. Target Dakar bahwa:
 - a. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.
 - b. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang

- adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
- c. Penghapusan *kesenjangan gender* pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh pendidikan dasar yang bermutu
19. *Millenium Development Goals (MDGs)* sampai dengan tahun 2015, ada 8 tujuan utama yang akan dicapai, yaitu: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan, (2) Mewujudkan pendidikan dasar, (3) Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) Mengurangi angka kematian bayi, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, (7) Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan (8) Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan. Jadi sebagai landasan hukum Bidang Pendidikan adalah) terutama tujuan nomor:
- a. Goal 2: yaitu mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar
 - b. Goal 3: yaitu mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun 2015
20. Undang-Undang tentang HAM Internasional
21. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Jawa Barat 2006-2008 bahwa dalam kerangka pembangunan pendidikan di Jabar ada 2 isu pokok, yaitu:
- a. Rendahnya pencapaian angka Indeks Pendidikan (IP) yang mrpkan komponen IPM
 - b. Belum tuntasnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Secara terinci berikut ini disajikan Tabel 1.1 yang menguraikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan gender.

Tabel 1.1 Tinjauan Kebijakan Terkait Dengan Gender

<i>Undang-Undang Dasar 1945</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 27 ayat 2 : " Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28 Huruf H ayat 3 : "Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat" 3. Pasal 34 ayat 2 : "Negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"
---------------------------------	---

<p>3 (Tiga) Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004 – 2009</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia
<p>Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004 – 2009 (Permasalahan dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2004 – 2009)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
<p>Pasal 6 dan 15 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</p>	<p>Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan serta Sasaran Tahunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.</p>
<p>Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2009</p>	<p>Visi Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>Misi Untuk mencapai visi di atas misi yang harus dijalankan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan; 2. Memajukan <u>tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik</u>; 3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; 4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; 5. <u>Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender</u>; 6. <u>Meningkatkan partisipasi masyarakat</u>. <p>Tujuan Tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Tujuan dari peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah membangun anak Indonesia</p>

yang sehat, cerdas, ceria, dan bertakwa serta terlindungi.

Pencapaian tujuan-tujuan tersebut ditandai dengan:

1. Terintegrasikannya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
2. Terwujudnya 440 Kabupaten/Kota yang responsif gender dan peduli anak;
3. Berperannya lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berikut ini disajikan Tabel 1.2 yang menguraikan pengembangan Substansi Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2005-2009.

Tabel 1. 2. Pengembangan Substansi Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan (*Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2009*)

<i>Prioritas pembangunan dan arah kebijakan Keadilan gender</i>	Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai produk perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (<i>Gender-related Development Index</i>) dan angka GEM (<i>Gender Empowerment Measurement</i>); menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan; dan meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.
<i>Peningkatan Kualitas Kehidupan Dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak</i>	<ol style="list-style-type: none">1. memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;2. meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta program-program lain untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan;3. meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak;4. menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari kekerasan dalam rumah tangga;5. meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;6. memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Tabel 2. (Lanjutan).

<p><i>Arah Kebijakan</i></p>	<p>Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumberdaya-sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta pelayanan publik dan pasar;</p>
<p><i>Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, politik, dan ekonomi; 2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya; 3. Pengembangan dan menyempurnakan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah; serta 4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
<p><i>Sasaran Operasional sesuai Bidang/Prioritas</i></p>	<p>Pelaksanaan pengarusutamaan gender</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender. 2. Tersusun dan terlaksananya <u>program pembangunan yang responsif gender</u> termasuk mendorong sistem pelayanan publik yang berkualitas dan sensitif gender di 9 bidang pembangunan di Kementerian/LPND, 33 Propinsi dan 440 Kabupaten/kota. 3. Tersedia dan berfungsinya <u>dukungan teknis pelaksanaan</u> pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah. 4. <u>Tersedia dan dimanfaatkannya data, statistik dan informasi gender</u> dan anak, termasuk sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan. <p>Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi 2. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang masih bias gender 3. Tersusunnya usulan peraturan perundang-undangan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden

	<p>tentang peningkatan <u>akses dan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi perempuan</u></p> <p>5. Ditetapkan dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tentang <u>ekonomi makro nasional yang responsif gender</u></p> <p>Pemberdayaan lembaga masyarakat dan swasta</p> <p>1. Ditetapkan dan dilaksanakannya <u>strategi peningkatan dukungan tokoh</u> masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat dan swasta terhadap PP dan KPA</p> <p>2. <u>Meningkatnya jumlah organisasi dan kelompok masyarakat</u> yang berperan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak</p> <p>3. <u>Meningkatnya peran masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan melalui forum-forum dialog</u> antara lembaga masyarakat dengan pemerintah</p>
<p><i>Program pembangunan pemberdayaan perempuan tahun 2005-2009</i></p>	<p>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</p> <p>Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender, dan kesejahteraan dan perlindungan anak; 2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, termasuk Pusat Studi Wanita/Gender, dan lembaga-lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak; 3. Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA, di tingkat nasional dan daerah; dan 4. Penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah.

Secara administratif pada tahun 2005, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat yang meliputi luas wilayah 39.438 kilometer persegi terdiri atas 16 kabupaten dan 9 kota, 561 kecamatan, yang terbagi ke dalam 1794 kelurahan dan 3989 desa. Berdasarkan Data Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA), jumlah penduduk Propinsi Jawa Barat pada Tahun 2005 sebanyak 39 960 869 orang yang terdiri atas 20 192 207 orang (50.53%) laki-laki dan 19 768 662 orang (49.47%) perempuan. Apabila dibagi berdasarkan kohort usia

sekolah dan perguruan tinggi, maka didapatkan jumlah penduduk sebanyak 2 649 984 orang (13.12%) laki-laki dan 2 570 540 orang (13.00%) perempuan yang berusia 7-12 tahun; 1 195 758 orang (5.92%) laki-laki dan 1 103 168 orang (5.58%) perempuan yang berusia 13-15 tahun; 1 180 308 orang (5.85%) laki-laki dan 987 776 orang (5.00%) perempuan yang berusia 16-18 tahun; 2 158 312 orang (10.69%) laki-laki dan 2 239 842 orang (11.33%) perempuan yang berusia 19-24 tahun.

Berdasarkan laporan yang tertuang pada Profil Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 (Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2005) dinyatakan adanya kemajuan di Bidang Pendidikan yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan semakin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, perluasan jangkauan pelayanan pendidikan sampai dengan daerah terpencil dan daerah dengan penduduk miskin. Namun sayangnya, profil pendidikan tersebut sama sekali tidak menyinggung masalah kesenjangan gender, dan sebagian data yang penting tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin.

I.C. TUJUAN

Penyusunan penelitian secara khusus diarahkan untuk :

1. Mengetahui kesenjangan gender bidang pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan.
2. Memberi masukan dalam penyusunan kebijakan, strategi, program dan Rencana Aksi Daerah dalam rangka implementasi kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan di Jawa Barat.

BAB II

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT

II.A. KONSEP PENGARUSUTAMAAN GENDER

1. Perbedaan Konsep Gender dan Jenis Kelamin

Seringkali masyarakat salah mengartikan antara konsep gender dan jenis kelamin. Banyak orang mempunyai persepsi yang salah mengenai gender yang selalu diidentikkan dengan perempuan sehingga perjuangan gender identik dengan perjuangan hak kaum perempuan saja tanpa melibatkan partisipasi laki-laki atau mengesampingkan hak laki-laki dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Kesalahpahaman tentang konsep gender dan jenis kelamin ini dikarenakan belum dipahaminya secara utuh tentang kedua konsep tersebut. Dengan kata lain, akibat kurangnya sosialisasi tentang konsep gender secara menyeluruh mengakibatkan *mislead* di tataran masyarakat baik kaum elite maupun kaum akar rumput.

Akibat *mislead* yang ada di masyarakat, maka ada kerancuan gender dan kodrati. Sering masyarakat berpikir bahwa peran gender bersifat kodrati, misalnya perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai kepala keluarga. Sering masyarakat berpikir bahwa sifat-sifat tertentu adalah kodrati pada jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki rasional dan perempuan emosional. Sering masyarakat berpikir bahwa pekerjaan tertentu bersifat kodrati, misalnya laki-laki berhubungan dengan pekerjaan teknik dan mesin, sedangkan perempuan berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga.

Secara bertahap dan berkesinambungan, kerancuan dan salah pengertian mengenai gender dan kodrati harus segera diluruskan. Pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin. Namun, gender dan jenis kelamin memang sama-sama membicarakan laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin (*sex*) secara umum dipergunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis yang sudah kodrati. Adapun gender membicarakan perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat/ budaya sejak ia dilahirkan dan bukan kodrati. Dalam hal ini, gender bukan hanya membicarakan tentang perempuan saja, namun juga membicarakan tentang laki-laki dalam kaitannya dengan kerjasama/ *partnership* dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi gender membahas permasalahan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian jenis kelamin atau dalam Bahasa Inggrisnya adalah *seks* adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis hormonal dan anatomis oleh Tuhan dan melekat pada jenis kelamin tertentu yang merupakan Kodrat Tuhan. Misalnya, laki-laki adalah manusia yang memiliki penis,

jakala (kalamenjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki vagina dan alat reproduksi seperti rahim, saluran melahirkan, indung telur dan alat menyusui. Alat-alat reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan ini dibuat untuk jangka waktu lama atau selamanya dan tidak berubah, permanen, berlaku untuk manusia dimana saja, suku bangsa apa saja, dan warna kulit apa saja. Secara biologis, alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, dan melekat selamanya pada laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, jenis kelamin inilah yang disebut dengan kodrati (ILO, 1997; Depdiknas, 2004; KPP, 2005).

Istilah gender dimunculkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan antara perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati atau bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan hal-hal yang merupakan bentukan budaya yang diturunkan dan disosialisasikan oleh masyarakat yang berkaitan dengan non kodrati. Perbedaan peran gender ini sangat membantu ilmuwan untuk memahami pembagian peran dan memikirkan kembali kebiasaan masyarakat yang telah melekat pada label manusia laki-laki dan perempuan.

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, persifatan, dan hak perilaku laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, gender berhubungan dengan peran baik laki-laki maupun perempuan yang bersifat relatif, dapat berubah, dapat dipertukarkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya dan jamannya. Perubahan ciri dan sifat-sifat dari gender ini dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain (KPP, 2005).

Sifat dan ciri-ciri seseorang sering diberi label yang berbeda. Berikut ini disajikan Tabel 2.1. yang menguraikan berbagai stereotipe laki-laki dan perempuan dengan sifat dikotomi yang semuanya tidak selalu benar dalam kenyataan.

Tabel 2.1. Stereotipe Karakteristik Perempuan dan Laki-laki

KARAKTERISTIK PEREMPUAN	KARAKTERISTIK LAKI- LAKI
Feminin	Maskulin/ Gentle
Introvert (tertutup)	Ekstrovert (terbuka)
Emosional	Rasional
Fleksibel/ Plin-Plan	Tegas (Assertive)
Kerjasama	Kompetitif
Memikirkan orang lain (others)	Memikirkan diri sendiri (self)
Suka gosip	Tidak suka gosip
Fisik lemah	Fisik Kuat
Pribadi lemah (sensitif, hangat, lemah lembut, lambat)	Pribadi Kuat (dingin, tegas, kuat, cepat, disiplin, ambisius)
Pasif	Aktif
Stabil	Dinamis
Subyektif, insting	Obyektif, rasional, analitis
Orientasi kekuasaan (power) Berkuasa	Orientasi keharmonisan (peace) Lebih banyak mengalah, menjalin hubungan

Tabel 2.1. (Lanjutan).

Kurang meyakinkan	Sangat meyakinkan
Kurang efisien dalam mengerjakan tugas	Sangat efisien dalam mengerjakan tugas
Perilaku Halus/ Pasif	Perilaku Kasar/ Aktif
Terus terang/ Tidak Pemalu	Pemalu
Cepat Menangis/ terharu	Tabu untuk menangis/ tidak mudah terharu
Kurang dapat dipercaya	Dapat dipercaya
Tergantung orang lain	Mandiri
Jadi pemimpin yang lemah	Jadi pemimpin yang kuat
Sensitif, hangat, lemah lembut	Dingin
Penakut, tidak mau ambil resiko	Berani, tantangan

Sumber: Puspitawati (2006) berdasarkan konsep Bem (1990)

Sifat-sifat laki-laki dan perempuan yang distereotipekan di atas, seolah-olah diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat. Padahal dalam kenyataannya tidak selalu benar. Menurut teori personalitas, Sandra Bem menjelaskan karakteristik feminin (seperti lembut, manja, perasa, sensitif, penuh perhatian, penuh rasa cinta) yang sangat erat dengan perempuan dan karakteristik maskulin (seperti berkepribadian keras, tegas, kerja keras, senang berkompetisi, punya rencana yang sistematis, kurang sensitif) yang sangat erat dengan laki-laki. Namun demikian, kedua sifat tersebut bercampur di dalam setiap individu baik laki-laki maupun perempuan (Bem 1990).

Secara nyata di kehidupan manusia ditemukan sejumlah perempuan yang mempunyai sifat berkuasa, dinamis, tegas dan dapat menjadi pemimpin yang kuat dan bijaksana. Ditemui pula di lapangan, bahwa ada sejumlah laki-laki yang sifatnya lembut, mudah terharu, plin-plan dan cerewet dan suka gosip. Dengan demikian, stereotipe di atas adalah pelabelan yang cenderung merugikan perempuan untuk dapat berperanserta di sektor publik. Jadi, sifat-sifat di atas bukan melekat secara kodrati pada perempuan atau laki-laki saja, namun melekat pada diri seseorang apapun jenis kelaminnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara garis besar dapat disimpulkan perbedaan antara konsep gender dan jenis kelamin (seks) seperti tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Seks) dan Gender

NO	JENIS KELAMIN (SEKS)	NO	GENDER
1	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan perempuan mempunyai fungsi reproduksi	1	Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah

	seperti menstruasi, Hamil, melahirkan & menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahi (spermatozoid).		mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumahtangga
2	Peran reproduksi tidak dapat berubah; Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan	2	Peran sosial dapat berubah Peran istri sebagai ibu rumahtangga dapat berubah menjadi pekerja/ pencari nafkah
3	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: Tidak mungkin peran laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi	3	Peran sosial dapat dipertukarkan Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumahtangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri menjadi TKW
4	Peran reproduksi berlaku sepanjang masa	4	Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan
5	Peran reproduksi berlaku di mana saja	5	Peran sosial bergantung pada budaya masing-masing
6	Peran reproduksi berlaku bagi kelas/ strata sosial mana saja	6	Peran sosial berbeda antara satu kelas/ strata sosial dengan strata lainnya
7	Peran reproduksi ditentukan oleh Tuhan atau kodrat	7	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia

2. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

Menurut KPP (2005), dalam memahami konsep gender, ada beberapa hal yang perlu dipahami, yaitu:

a. Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistim dan struktur sosial dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia, meskipun secara agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan yang akhirnya juga berdampak pula terhadap laki-laki. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah:

- (1) Marjinalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan
- (2) Sub-ordinasi yang berkeyakinan bahwa salah satu jenis kelamin tertentu dianggap lebih utama dan lebih penting dibandingkan dengan jenis kelamin yang lainnya seperti pandangan sejak jaman dahulu bahwa peran dan kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki
- (3) Pandangan stereotype (pelabelan/ penandaan) yang seringkali bersifat negatif secara umum dan selalu melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh, label perempuan sebagai "ibu rumahtangga", sementara label laki-laki sebagai "pencari nafkah".
- (4) Kekerasan (violence) terhadap perempuan yang diartikan sebagai bentuk-bentuk serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap perempuan ini sebagai akibat perbedaan peran yang muncul dalam berbagai bentuk. Pelaku kekerasan karena gender ini dapat bersifat individual seperti di dalam rumahtangga maupun di tempat umum dan di masyarakat.
- (5) Beban kerja Ganda sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender yang dibebankan pada salah satu jenis kelamin tertentu. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90 persen dari pekerjaan domestik dalam rumahtangga, sehingga bagi perempuan bekerja di sektor publik, maka mereka masih harus mengerjakan pekerjaan domestik.

b. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan kontekstual dan situasional

Keberadaan strategi kesetaraan gender adalah untuk memberikan perhatian pada kebutuhan-kebutuhan pembangunan perempuan yang sebagian besar tidak kelihatan, dan ditujukan pada proses-proses yang berkelanjutan untuk menyusun distribusi sumber daya dan kesempatan yang sama yang menguntungkan baik pada laki-laki maupun perempuan.

Akan tetapi fokus pada perempuan yang terlepas dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat merusak strategi-strategi untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan yang meliputi tujuan-tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Analisa tentang gender dalam hal kesetaraan gender harus tidak hanya memikirkan kesenjangan laki-laki dan perempuan, tetapi juga ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri.

Identitas gender laki-laki dan perempuan saling berkaitan erat. Satu cara yang menjelaskan hal ini adalah di dalam pembagian kerja menurut gender. Tugas-tugas tertentu diberikan kepada perempuan dan beberapa tugas yang lainnya diberikan kepada pria-pembagian kerja itu sendiri menciptakan ketergantungan. Dengan cara demikian perubahan pada perempuan juga berarti perubahan untuk laki-laki. Lebih luas lagi, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tidak dapat

dicapai melalui perubahan-perubahan pada peran dan tanggung jawab yang diemban oleh perempuan saja.

Jadi strategi kesetaraan menggabungkan dua cara yang berkaitan, yaitu:

- (1) *Memusatkan pada dampak dari pada kegiatan/input* – melihat bagaimana prakarsa keseluruhan akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan dan kesetaraan gender, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) *Memusatkan pada kesetaraan sebagai suatu tujuan dari padaperempuan sebagai suatu kelompok sasaran* – memikirkan bagaimana memilih dan merancang prakarsa yang dapat membantu kesetaraan sebagai suatu tujuan, yang mungkin meliputi misalnya perubahan-perubahan pada praktek-praktek kelembagaan, perundang-undangan dan metodologi perencanaan dan meliputi laki-laki dan perempuan.

3. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender Secara Umum dan Dalam Bidang Pendidikan

Sub-ordinasi Perempuan

Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan sub-ordinat. Sebagai contoh apabila seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak bepergian keluar negeri harus mendapat ijin dari suami. Tetapi apabila suami yang akan pergi ia bias mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat ijin dari istri. Kondisi semacam itu telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting, sehingga jika karena kemampuannya ia bias menempati posisi penting sebagai pimpinan, maka bawahannya yang berjenis kelamin laki-laki seringkali merasa tertekan. Menjadi bawahan seorang perempuan yang pada pola pikirnya merupakan makhluk lemah dan lebih rendah membuat laki-laki merasa "kurang laki-laki". Inilah bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan namun dampaknya mengenai laki-laki (KPP, 2005).

II. B. KONSEP PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

1. Definisi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengertian Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (9KKG) dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sector pembangunan (Depdiknas, 2004; KPP, 2005).

Seperti tercantum dalam Panduan Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2000, Ruang Lingkup PUG meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan program

pembangunan dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Adapun tujuan PUG adalah:

- a. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsive gender.
- b. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitive gender di bidang masing-masing.

Sesuai Inpres No. 9 Tahun 2000, implikasi dan sasaran utama dari PUG adalah para pelaksana dari lembaga-lembaga pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan lini lapangan yang berperan dalam membuat kebijakan, program dan kegiatan (*policy maker*) dan perlu mengintegrasikan dimensi Kesetaraan dan Keadilan Gender kedalam Program Sektor dan Daerah masing-masing. Sasaran berikutnya adalah LSM/ organisasi perempuan, organisasi swasta, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan organisasi-organisasi lainnya yang sangat menguasai keadaan di lapangan dan dekat dengan masyarakat.

Selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan (2005) dalam mensosialisasikan PUG di Indonesia mengenalkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pluralistis, yaitu menerima keragaman budaya, agama dan adapt istiadat, karena Bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang merupakan kekayaan dan keragaman yang perlu dipertahankan di dalam PUG tanpa harus mempertahankan keragaman tersebut.
- b. Bukan Pendekatan Konflik, yaitu pendekatan dalam rangka PUG tidak melalui pendekatan dikotomis yang selalu mempertimbangkan antara kepentingan laki-laki dan perempuan.
- c. Melalui Proses Sosialisasi dan Advokasi, yaitu prinsip penerapan PUG di Indonesia secara bertahap melalui proses sosialisasi dengan penuh pertimbangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- d. Menjunjung Nilai HAM dan Demokratisasi, yaitu pendekatan PUG di Indonesia tidak melalui pertentangan-pertentangan dan penekanan-penekanan, namun selalu menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan demokratis, sehingga akan diterima oleh lapisan masyarakat.

2. Latar Belakang Adanya Pengarusutamaan Gender

Sebagai Latar Belakang adanya Pengarusutamaan Gender adalah lambatnya penerapan kebijakan kesetaraan jender (*gender equality*) yang kemudian menimbulkan pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana staf dalam badan-badan pemerintah dapat menganggap beberapa kebijakan sebagai penting dan kebijakan lain sebagai tidak penting dan kebijakan lainnya lagi sebagai pilihan. Hirarki kebijakan inilah yang telah menggugah para analis untuk meminta struktur pertanggungjawaban yang lebih besar untuk memastikan bahwa staf benar-benar menerapkan kebijakan itu dan tetap meneruskan komitmen-komitmen yang telah dibuat pemerintah dan badan-badannya bagi kesetaraan hak wanita.

Pengarusutamaan sebagai isu lembaga menghasilkan suatu strategi pengarusutamaan (*mainstreaming strategies*) yang dipakai oleh berbagai lembaga sebagai suatu cara untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan tanggapan atas ketidakpuasan dari strategi-strategi sebelumnya. Jadi, pendukung kesetaraan berargumentasi bahwa kesenjangan gender atau disparitas gender (*gender disparity*) sebaiknya perlu dibahas di tingkat kebijakan, dengan cara penyeleksian bidang-bidang yang mendapatkan prioritas daripada membentuk komponen-komponen perempuan ke proyek-proyek yang lebih besar.

Disamping itu hasil kesepakatan Bangsa-Bangsa dalam Platform Aksi Beijing memberikan prioritas tinggi untuk pengarusutamaan gender ini tiga masalah, yaitu:

- a. Pelayanan jasa dan program yang diberikan oleh suatu lembaga dengan tujuan mendukung keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.
- b. Rencana dan kebijakan yang dibuat di tingkat propinsi (baik dengan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga swasta maupun organisasi kemasyarakatan lain); dan
- c. Lembaga itu sendiri (dengan aturan dan tingkatnya).

Dalam mengadopsi 'Platform bagi Aksi Beijing' para pemerintah telah melakukan komitmen bagi strategi perspektif pengarusutamaan gender melalui proses kebijakan dan perencanaan. Penekanan pada perspektif pengarusutamaan gender di berbagai sektor menggambarkan suatu pengakuan terhadap kebutuhan dan minat perempuan (dan juga laki-laki) yang harus dikejar secara sistematis dalam semua program dan kebijakan pemerintah.

Pendekatan pengarusutamaan (*mainstreaming*) memerlukan departemen dan lembaga-lembaga pemerintah untuk meninjau mekanisme pengambilan keputusan mereka, data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan, dan keahlian perencanaan dan analisa pegawai. Pokok-pokok pikiran pengarusutamaan adalah sesuai dengan semua prakarsa pembangunan kapasitas kelembagaan guna mengidentifikasi dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan berbasis gender dan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.

3. Alasan Pentingnya PUG dalam Bidang Pendidikan

- Pemerintah lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya.
- Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi rakyat.
- Sebagai upaya menegakkan hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan-pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat.

4. Komponen Kunci Keberhasilan PUG dalam Bidang Pendidikan

Tertulis pada Pesan Standar yang ditulis oleh Departemen Pendidikan Nasional 92004) bahwa sebagai prasyarat pelaksanaan PUG agar berhasil adalah:

- a. Adanya komitmen politik (*political will*) dan kepemimpinan (*leadership*) dari lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
- b. Adanya kerangka kebijakan (*policy framework*) sebagai wujud komitmen pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- c. Adanya struktur dan mekanisme pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten/ kota yang mendukung pelaksanaan PUG.
- d. Adanya sumber-sumber daya yang memadai baik sumberdaya alam, materi, maupun sumberdaya manusia.
- e. Adanya sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin
- f. Adanya alat analisis gender untuk menganalisis setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi.
- g. Adanya dorongan dari masyarakat yang demokratis kepada pemerintah.

Tantangan PUG di Bidang Pendidikan adalah:

- a. Bagaimana meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sehingga masyarakat dapat menilai bahwa pendidikan dapat memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.
- b. Bagaimana menyediakan pelayanan pendidikan secara lebih luas dan beragam sehingga dapat diakses oleh semua anak Indonesia.
- c. Dapatkah kita melakukan revisi terhadap semua materi dan ilustrasi bahan ajar yang belum responsif gender, yang diperlukan untuk menanamkan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender pada anak sejak dini.
- d. Bagaimana Indonesia mampu menanggulangi kemiskinan sehingga setiap keluarga memiliki kemampuan keuangan yang lebih baik untuk menyekolahkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
- e. Bagaimana mengurangi faktor sosial budaya masyarakat dan orangtua yang cenderung menggunakan tenaga anak perempuan untuk membantu urusan rumah tangga seringkali berakibat pada rendahnya kinerja akademik bahkan berakibat pada putus sekolah.
- f. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa pendidikan yang cukup tetap diperlukan bagi anak perempuan meskipun akhirnya mereka tidak bekerja di luar rumah dan bukan merupakan investasi yang sia-sia.
- g. Bagaimana meningkatkan keamanan khususnya di daerah konflik sehingga anak baik laki-laki maupun perempuan dapat bersekolah dengan tenang.
- h. Bagaimana peraturan perundangan yang bias gender dapat direvisi.

Komponen Kunci Pengarusutamaan Gender adalah

- a. Data dan Statistik terpilah berdasarkan jenis kelamin.
- b. Keterampilan melakukan gender analisis pada pejabat terkait di lingkungan Dinas Pendidikan.
- c. Kelembagaan gender atau pemberdayaan Perempuan (PP) di daerah.
- d. Alat dan sistem monitoring dan evaluasi program-program yang responsif gender beserta analisa kebijakan yang ada apakah sudah responsif gender.
- e. KIE (Komunikasi, informasi, dan Edukasi).
- f. Peranserta masyarakat.

II. C. ANALISIS GENDER SECARA UMUM

"Gender" adalah alat analisis yang bermanfaat untuk memperjelas suatu gagasan. "Gender" merupakan suatu konsepsi pembedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan melihat pola hubungan sosial diantara kedua jenis kelamin tersebut. Identitas "gender" diperoleh melalui proses belajar, proses sosialisasi dan melalui kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu terdapat variasi peran "gender" yang sangat besar antara berbagai kebudayaan.

Analisis gender berguna untuk mengetahui pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga, masyarakat dan suatu negara dari berbagai peran yang berbeda-beda. Adapun yang dimaksud dengan peran yang disini adalah perilaku yang sudah terpolo dalam status tertentu atas dasar situasi sosial yang khas.

1. Macam-macam Analisis Gender

Beberapa model metode di dalam teknik analisis gender yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli yaitu antara lain :

a. Model Harvard

Model Harvard atau **Kerangka Analisis Harvard** juga disebut "Kerangka Peran Gender" atau "Kerangka Analisis Gender". dikembangkan oleh *Harvard Institute for International Development* bekerja sama dengan Kantor Women in Development (WID)-USAID. Model Harvard didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender paling awal. Model analisis Harvard lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek, menyimpulkan data basis atau data dasar (Overholt, Cloud and Austin. 1985). Secara detil Model Harvard dapat dilihat pada Lampiran 1a.

Tujuan Kerangka Harvard:

- (1) Untuk menunjukkan bahwa ada sebuah pemikiran ekonomis untuk menginvestasikan uang pada wanita dan pria.
- (2) Untuk membantu para perencana merancang proyek-proyek yang lebih efisien dan meningkatkan produktifitas secara menyeluruh.
- (3) Untuk menekankan pentingnya informasi yang lebih baik sebagai dasar untuk memenuhi efisiensi/tujuan persamaan.
- (4) Memetakan kerja wanita dan pria di dalam masyarakat dan menyoroti perbedaan-perbedaan pokok yang ada.

Ciri-ciri Kerangka Harvard pada mulanya diuraikan di dalam Overholt, Anderson, Cloud and Austin, *Gender Roles in Development Projects: A Case Book*, 1984, Kumarian Press: Connecticut. Kerangka tersebut terdiri dari sebuah matriks untuk mengumpulkan data pada tingkat mikro (masyarakat dan rumah tangga), yang memiliki empat komponen yang saling berhubungan.

- (1) *Profil kegiatan* yang menjawab pertanyaan, "siapa melakukan apa ?, yang meliputi gender, usia, waktu yang dipergunakan dan tempat kegiatan.
- (2) *Profil kontrol* dan akses yang mengidentifikasi sumber daya yang dipakai untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukan di dalam profil kegiatan, dan akses ke dan kontrol atas penggunaan mereka oleh jender.
- (3) *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi* yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan gender di dalam dua profil di atas.
- (4) *Analisis siklus proyek* yang meneliti sebuah proyek atau intervensi yang berkenaan dengan informasi yang disebarkan menurut gender.

b. Model Moser

Model Moser didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat 'teknis dan politis', kerangka ini mengasumsikan adanya konflik dalam perencanaan dan proses transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu 'debat'. Terdapat kelemahan dalam model ini yang tidak memperhitungkan kebutuhan strategis laki-laki. Secara detil Model Moser dapat dilihat pada Lampiran 1b.

Kerangka Pemikiran Perencanaan Jender dari Moser (Moser, 1993) dikembangkan oleh Caroline Moser, seorang peneliti senior dengan pengalaman luas dalam perencanaan gender. Kerangka ini didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Jender (*Gender and Development/ GAD*) yang dibangun pada pendekatan Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development/ WID*) yang lebih awal dan pada teori-teori feminisme. Kerangka ini juga kadang-kadang diacu sebagai "Model Tiga Peranan (*Triple Roles Models*), atau Kerangka Pemikiran Departemen Unit Perencanaan (*Departemen of Planning Unit/ DPU*) karena dikembangkan oleh Moser selagi dia bekerja di Departemen Unit Perencanaan di University College, London.

Tujuan dari Kerangka Pemikiran Perencanaan Gender dari Moser

- (1) Mengarahkan perhatian ke cara di mana pembagian pekerjaan berdasarkan jender mempengaruhi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam intervensi-intervensi yang telah direncanakan.
- (2) Membantu perencanaan untuk memahami bahwa kebutuhan-kebutuhan wanita adalah seringkali berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan laki-laki.
- (3) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan melalui pemberian perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan-kebutuhan gender strategis.
- (4) Memeriksa dinamika akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumber-sumber daya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya yang berbeda-beda.
- (5) Memadukan gender kepada semua kegiatan perencanaan dan prosedur.

- (6) Membantu pengklarifikasian batasan-batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan.

Tabel 2.3. Alat-Alat Analisis Gender dari Moser

Alat Apa ?	Bagaimana Cara Memakai Alat itu ?	Untuk Tujuan Apa ?
Identifikasi peranan gender	Identifikasi pengelolaan masyarakat, reproduktif, produktif, peranan politik masyarakat laki-laki dan perempuan. Identifikasi bagaimana sumberdaya dialokasi untuk pekerjaan yang dikerjakan dalam peranan-peranan ini.	Memastikan nilai yang sama untuk kerja perempuan dan laki-laki dalam pembagian kerja gender pada saat sekarang.
Penilaian kebutuhan gender	Nilailah kebutuhan-kebutuhan gender strategis dan praktis yang berbeda-beda	Menilai kebutuhan-kebutuhan itu yang berhubungan dengan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Data bukan keseluruhan pada tingkat rumah tangga	Kumpulkan dan analisis data	Memastikan identifikasi kontrol pada sumberdaya dan wewenang untuk membuat keputusan dalam rumah tangga.

Tabel 2.4. Alat Implementasi Perencanaan Gender dari Moser

Alat Apa ?	Bagaimana Cara Memakai Alat itu ?	Untuk Tujuan Apa ?
Perencanaan yang berhubungan secara intersektoral	Adakanlah mekanisme untuk menghubungkan perencanaan pengembangan bertahap, ekonomis, dan sosial	Menyeimbangkan peranan masyarakat, reproduksi dan produksi dan menghubungkan aktivitas-aktivitas yang berbeda-beda dan skala perencanaan
Matrik Kebijakan WID/ GAD	Gunakan pendekatan kebijakan secara berangka: kesejahteraan, kesetaraan, anti kemiskinan, efisiensi, dan pemberdayaan.	Mengukur seberapa jauh intervensi perencanaan mencapai kebutuhan gender strategis dan praktis
Perencanaan partisipasi gender	Adakala mekanisme untuk memasukkan perempuan dan dari organisasi kesadaran gender kedalam proses perencanaan.	Memastikan kebutuhan gender strategis dipadukan kepada proses perencanaan

Sumber: Caroline Moser (1993), " Jender Planning and Development: Theory, practice and training, " Routledge, London, pp. 92 – 93

Untuk mengantisipasi kebutuhan gender sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam suatu program maka perlu diterapkan metoda:

- (1) Analisis Curahan Kerja (Profil Kegiatan)
Yang dimaksud adalah menganalisa pola pembagian kerja laki-laki-perempuan di dalam keluarga. Kegiatan ini dapat dibagi menurut jenis kegiatan produktif, domestik dan sosial. Hal ini perlu untuk memberikan gambaran mengenai pola kehidupan yang ada (termasuk alokasi waktu dan pendapatan) serta dapat mengidentifikasi pengaruh gender terhadap kekuatan yang ada.
- (2) Analisis Profil Akses (peluang) dan Kontrol (kekuatan dalam pengambilan keputusan).
Akses dan Kontrol ini, meliputi sumber daya fisik (tanah, modal, alat-alat produksi), situasi dan kondisi pasar (komoditi dan tenaga kerja), serta sumber daya sosial-budaya (media informasi, pendidikan, latihan ketrampilan, dll)

(3) Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Profil kegiatan serta Profil Akses dan Kontrol.

Faktor-faktor ini dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan hal-hal yang menghambat atau menunjang sebuah program/proyek, misalnya:

- lingkungan kebudayaan
- tingkat kemiskinan
- distribusi pendapatan dalam keluarga/masyarakat
- struktur kelembagaan
- penyebaran pengetahuan, teknologi dan ketrampilan
- norma yang berlaku
- kebijaksanaan dan hukum yang berlaku
- latihan dan pendidikan
- keadaan politik, dan sebagainya.

Dengan menganalisa profil kegiatan serta profil akses dan kontrol dapat teridentifikasi:

- (1) Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga. Secara tidak langsung informasi ini akan memberi gambaran tentang sejauh mana laki-laki ikut ambil bagian dalam kegiatan domestik sehingga perempuan mempunyai waktu lebih banyak untuk melakukan kegiatan produktif.
- (2) Alokasi waktu yang dicurahkan oleh perempuan di dalam keluarga untuk kegiatan produktif, domestik maupun sosial. Data ini juga akan memberikan informasi mengenai waktu-waktu luang yang dimiliki perempuan, sehingga dapat ditentukan waktu yang tepat untuk memberikan masukan pengetahuan dan ketrampilan teknis kepada perempuan.
- (3) Sejauh mana laki-laki dan perempuan di dalam keluarga mempunyai peluang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada (modal, alat-alat produksi, pasar, media informasi, pendidikan formal dan non formal, dsb)
- (4) Dalam hal apa saja laki-laki-perempuan, mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan.

Kebutuhan-kebutuhan praktis gender meliputi:

- (1) Persediaan sumberdaya air, dan kebutuhan pokok lainnya,
- (2) Perawatan kesehatan
- (3) Perolehan penghasilan untuk persediaan rumah tangga. Pelayanan dasar dan perumahan
- (4) Persediaan makanan untuk keluarga.

Kebutuhan-kebutuhan strategis gender meliputi:

- (1) Penghapusan pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin.
- (2) Pengurangan beban tugas rumahtangga dan perawatan anak.
- (3) Penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi yang telah menjadi adat seperti hak-hak untuk memiliki tanah atau hak kepemilikan.

- (4) Akses untuk mendapatkan kredit dan sumber daya yang lain.
- (5) Kebebasan memilih setelah melahirkan anak.
- (6) Tindakan-tindakan terhadap kekerasan laki-laki dan kontrol atas perempuan.

(Sumber: The Oxfam. 1994)

c. Model SWOT

Model SWOT dirancang untuk membantu orang untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dari organisasi atau Kelompok mereka, sehubungan dengan berbagai kesempatan dan ancaman yang dipresentasikan di lingkungan eksternal.

Pertanyaan-pertanyaan bimbingan untuk ini adalah:

- (1) Kesempatan eksternal utama apa yang kita miliki ?
- (2) Ancaman eksternal utama apa yang kita hadapi ?
- (3) Apakah kekuatan internal utama kita ?
- (4) Apakah kelemahan internal utama kita ?

Ini adalah bagian dari proses perencanaan strategis, satu yang komponen utamanya memeriksa hubungan antara lingkungan antara internal dan eksternal. Ini mesti memberikan kepada organisasi dan Kelompok basis bagi pengidentifikasian isu-isu strategis, dan mengembangkan berbagai strategi.

d. Model PROBA (*Problem Base Approach*)

Model PROBA dikembangkan atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota, teknik ini sedikit berbeda dengan *Gender Analysis Pathway*.

e. Model GAP (*Gender Analysis Pathway*)

Metode GAP adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPPENAS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan.

2. **Pengertian *Gender Analysis Pathway (GAP)***

Model GAP (*Gender Analysis Pathway*), metode GAP adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPPENAS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan.

Dari beberapa model teknik analisis yang telah dikembangkan tersebut di atas, konsultan berpendapat bahwa model teknik analisis yang sesuai untuk digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah metode *Gender Analysis Pathway (GAP)*.

Model GAP (*Gender Analysis Pathway*) dapat diterapkan untuk mencari kesenjangan gender dari aspek-aspek: akses, peran, kontrol, dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan, dan diawali dengan analisis kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Dengan menggunakan GAP para perencana kebijakan program, proyek kegiatan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/proyek/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

3. Langkah-Langkah *Gender Analysis Pathway* (GAP)

GAP dibuat dengan menggunakan metodologi sederhana dengan 7 (tujuh) langkah yang harus dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu;

- a. Tahap I Analisis Kebijakan Responsif Gender
- b. Tahap II Formulasi Kebijakan yang Responsif Gender
- c. Tahap III Rencana Aksi yang Responsif Gender.

Analisis kebijakan responsif gender bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan perumahan yang ada dengan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin (lelaki dan perempuan) dan data gender digunakan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*).

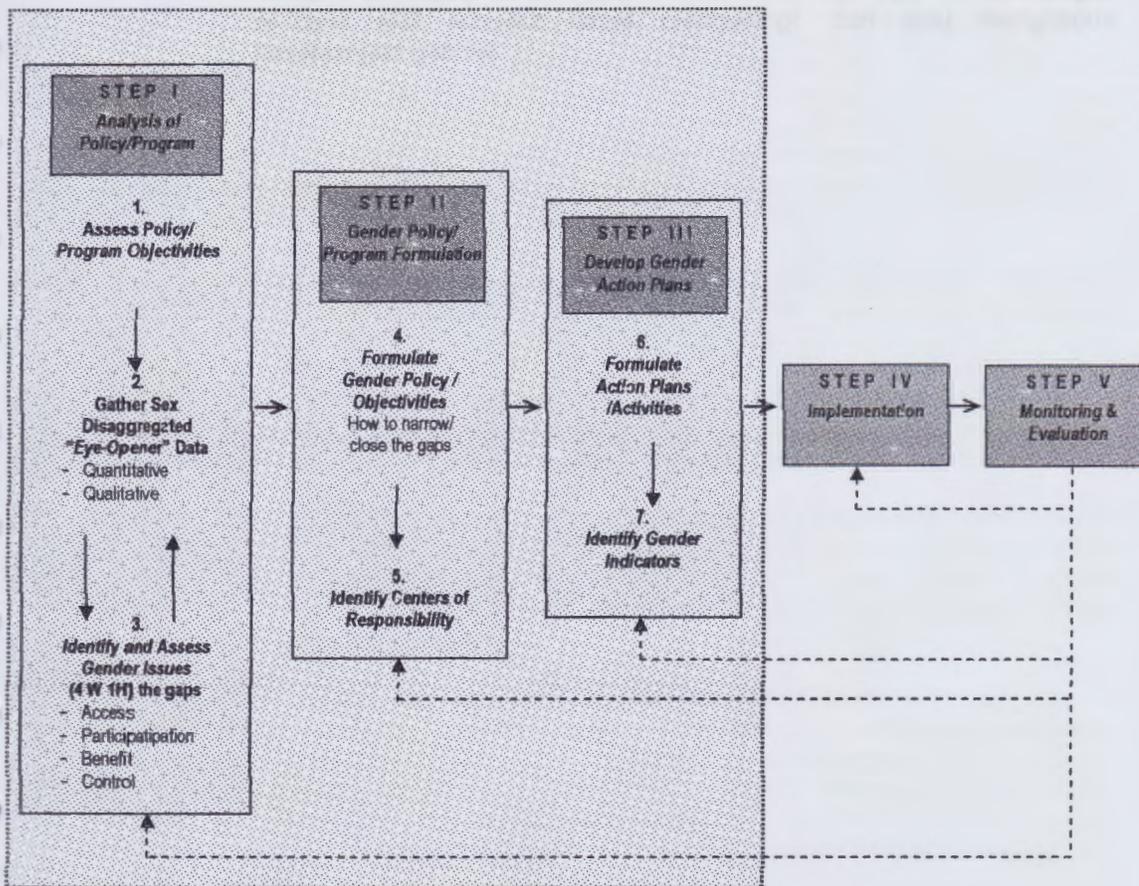
Tahap yang pertama diperlukan karena secara umum kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan selama ini masih netral gender (didasarkan pada asumsi bahwa pembangunan memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki).

a. Langkah-langkah pada Tahap Pertama :

- (1) Mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan perumahan, apakah kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan tersebut telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender;
- (2) Menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan. Apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki;
- b. Menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (*gender gap*) dengan menjawab 5 W dan 1 H berdasarkan keempat faktor;
 - (1) **Akses** yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan sektor perumahan, khususnya perumahan swadaya;
 - (2) **Partisipasi** perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan perumahan termasuk dalam proses pengambilan keputusan;
 - (3) **Manfaat** yang sama dari hasil pembangunan perumahan atau sumber daya pembangunan perumahan yang ada;
 - (4) **Kontrol** terhadap sumber-sumber daya pembangunan perumahan, khususnya perumahan swadaya.

b. Langkah-langkah pada Tahap Kedua :

- (1) Merumuskan kembali kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan perumahan swadaya yang reponsif gender. Dengan mempertimbangkan hasil proses analisis gender yang dilakukan pada langkah 1 sampai 3 tahap pertama, sehingga menghasilkan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender.
- (2) Mengidentifikasi indikator gender (*gender indicator*) dari setiap kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan sektor perumahan dari langkah 4.



Gambar 2.1 Kerangka Metode Gender Analysis Pathway (GAP)

c. Langkah-langkah pada Tahap Ketiga :

- (1) Menyusun Rencana Aksi; yang didasarkan pada kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan perumahan yang responsif gender dengan tujuan untuk mengurangi/ menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Seluruh rencana aksi yang disusun sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah responsif gender yang telah diidentifikasi dalam langkah 5.
- (2) Mengidentifikasi sasaran secara (kuantitatif dan atau kualitatif) bagi setiap rencana aksi butir ke-6. Hasil identifikasi memastikan bahwa dengan rencana aksi tersebut dapat mengurangi dan atau menghapus kesenjangan gender.

Kebijakan dan Rencana Aksi tersebut akan Peratuan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008. Adapun Rencana Strategi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ditetapkan pada Perda 2003-2008 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 158/2452/2003-SP/2003 yang diadopsi dalam Perundang-undangan di Provinsi Jawa Barat.

Terdapatnya kesenjangan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan bidang pendidikan yang dikuasai pada dua hal pokok, yaitu: (1) Rendahnya penguasaan tingkat kelas Pendidikan (PK) yang mencakup kesenjangan hasil Pembelajaran Menengah dan (2) Belum sempurnanya Program Wajar (Wajar) Pendidikan Dasar Pribadi. Dikaitkan dalam Rencana Strategi bahwa permasalahan utama yang masih dihadapi antara lain: (1) Belum sempurnanya mutu pendidikan di semua sekolah, (2) Masih terdapatnya tingkat ketidaksiapan jumlah guru, (3) Belum sempurnanya kesiapan masyarakat terhadap perlunya peningkatan mutu pendidikan, (4) Tidak tercapainya hasil belajar yang diharapkan di sekolah-sekolah, seperti ketidaksiapan dan ketidaksiapan, (5) Masih terdapatnya tingkat rendahnya tingkat pendidikan, dan (6) Kurang terdapatnya data pendidikan yang akurat dan akurat serta terdapatnya kesenjangan yang memerlukan upaya peningkatan dan pengendalian program pendidikan.

Ketidaksiapan permasalahan pendidikan di Jawa Barat sebagai hasil akhir komponen pendidikan, terutama dalam hal sarana dan prasarana, tenaga kependidikan, dan rendahnya daya hidup masyarakat. Dengan itu masalah penanganan peningkatan mutu tingkat kualitas juga ini masalah, terutama kesiapan kesiapan permasalahan pendidikan di Jawa Barat tersebut sebagai perlu memperhatikan penyelesaian masalah di dalam pelaksanaan permasalahan pendidikan di Jawa Barat.

Upaya yang diprioritaskan pada aspek Peningkatan dan Gender di Bidang Pendidikan, maka perlu di tingkat- tingkat tenaga kependidikan pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam pengabdian gender di hal dan hal lain, yaitu: (1) Aspek dan Peningkatan Pendidikan, (2) Mutu dan Relevansi Pendidikan, (3) Peningkatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas dan Peningkatan Partisipasi.

BAB III

ANALISIS KESENJANGAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI JAWA BARAT TAHUN 2005 DAN 2006

III.A. GAMBARAN UMUM, KONDISI PENDIDIKAN DAN PERMASALAHAN GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN

Kebijakan Pendidikan di Jawa Barat tertulis dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008. Adapun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ditetapkan untuk Periode 2006-2008 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 188.34/SK.6280-BP/2005 yang dijadikan acuan dalam Pembangunan Pendidikan di Propinsi Jawa Barat.

Tersusunnya kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan bidang pendidikan yang difokuskan pada dua isu pokok, yaitu: (1) Rendahnya pencapaian angka Indeks Pendidikan (IP) yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia, dan (2) Belum tuntasnya Program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun. Disebutkan dalam Rencana Strategis bahwa permasalahan umum yang masih ditemui lainnya adalah: (1) Belum meratanya mutu pendidikan di setiap sekolah, (2) Masih tingginya angka kekurangan jumlah guru, (3) Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap perlunya peningkatan mutu pendidikan, (4) Tidak lengkapnya sarana penunjang pembelajaran di sekolah-sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium, (5) Masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, dan (6) Kurang tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel serta terpilah berdasarkan jenis kelamin yang dapat dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan.

Kompleksitas permasalahan pendidikan di Jawa Barat meliputi hampir seluruh komponen pendidikan, terutama dalam hal sarana dan prasarana, tenaga kependidikan, dan rendahnya daya beli masyarakat. Disamping itu masalah manajemen pengelolaan pendidikan serta kinerja aparatur juga ikut mewarnai terhadap kompleksnya permasalahan pendidikan di Jawa Barat tersebut sehingga perlu memprioritaskan penyelesaian masalah di dalam penuntasan permasalahan pendidikan di Jawa Barat.

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan, maka berikut ini disajikan gambaran kinerja pembangunan pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam perspektif gender dilihat dari tiga aspek, yaitu: (1) Akses dan Pemerataan Pendidikan; (2) Mutu dan Relevansi Pendidikan; (3) Penguatan Tata Kelola (*Governance*), Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

Penyajian gambaran umum kinerja pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan ada atau tidaknya kesenjangan gender yang diwujudkan dalam Indeks Paritas atau Disparitas. Pada tulisan ini, kesenjangan gender dilihat dari indikator Disparitas Gender, yaitu selisih antara kinerja pendidikan yang dicapai oleh perempuan dibandingkan dengan kinerja pendidikan yang dicapai oleh laki-laki. Apabila disparitas gender itu bernilai nol, maka menunjukkan tidak adanya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, sedangkan apabila disparitas gender lebih besar dari nol (positif), maka menunjukkan adanya kesenjangan gender dimana laki-laki berada dalam kondisi yang tertinggal dibandingkan dengan perempuan, dan apabila disparitas gender lebih kecil dari nol (negatif), maka menunjukkan adanya kesenjangan gender dimana perempuan berada dalam kondisi yang tertinggal dibandingkan dengan laki-laki.

1. Gambaran Umum dan Permasalahan Gender pada Pilar Akses dan Pemerataan Di Bidang Pendidikan

a. Jumlah Penduduk, Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin

Berdasarkan komposisi penduduk di Jawa Barat menurut kelompok umur diketahui bahwa proporsi penduduk laki-laki dan perempuan pada semua kelompok umur (4-5 tahun, 5-6 tahun, 6-7 tahun, 7-12 tahun, 13-15 dan 16-18 tahun) dapat dikatakan relatif seimbang dengan disparitas gender yang relatif kecil.

Tabel 3.1. Komposisi Penduduk Menurut Umur Sekolah dan Jenis Kelamin Di Jawa Barat Tahun 2005

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki		Perempuan		Total	Disp (P-L)
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1	4-5					1.542.842	
2	5-6	816.457	52.21	747.464	47.79	1.563.921	-4,42
3	6-7					2.377.471	
4	7-12	2231.379	48.60	2.360.108	51.40	4.591.487	2,80
5	13-15	1.045.173	48.53	1.108.712	51.47	2.153.885	2,94
6	16-18	1.170.729	50.38	1.153.079	49.62	2.323.808	-0,76

Sumber: Profil Pendidikan Tahun 2005, Tabel 2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

b. Komposisi Siswa Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Berdasarkan komposisi penduduk yang sedang sekolah di Jawa Barat, diketahui bahwa proporsi penduduk laki-laki semakin lama semakin tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk perempuan pada selang umur yang semakin tua (7-12 tahun, 13-15 dan 16-18 tahun). Hal ini terbukti dari nilai disparitas gender yang bertanda negatif dan semakin tinggi pada kelompok umur (-1,62 untuk kelompok umur 7-12 tahun, -3,7 pada kelompok umur 13-15 tahun, dan -13,61 untuk kelompok umur 16-18 tahun). Secara detil untuk sebaran setiap Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 3.2. Komposisi Penduduk yang Sedang Bersekolah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki		Perempuan		Total	Disp (P-L)
		Jumlah	%	Jumlah	%		
1	7-12	2.556.795	50.81	2.475.086	49.19	5.031.881	-1,62
2	13-15	926.911	51.85	860.194	48.15	1.787.705	-3,7
3	16-18	558.215	56.80	424.422	43.19	982.637	-13,61

Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 138-139; 141-142; 144-145.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dinas Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun 2004 dan telah melayani sebanyak 4.004.967 anak kelompok umur 0-3 tahun dan sebanyak 2.015.729 anak kelompok umur 4-6 tahun. Anak-anak yang belum terlayani ini direncanakan untuk dilayani secara bertahap mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dengan jumlah pelayanan anak yang sama yaitu sebanyak 649.943 anak untuk kelompok umur 0-3 tahun dan sebanyak 309.977 anak untuk kelompok umur 4-6 tahun seperti tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perencanaan Penanganan Program PAUD Kelompok Umur 0-3 Tahun Dan 4-6 Tahun Sampai dengan Tahun 2008

No	Keterangan	Tahun				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Jumlah Anak 0-3 tahun	4.044.967				
	Sudah Terlayani	1.421.206 (35.1%)				
	Belum Terlayani	2.623.761 (64.9%)				
	Perencanaan		649.943	649.943	649.943	649.943
2	Jumlah Anak 4-6 tahun	2.015.729				
	Sudah Terlayani	776.220 (38.5%)				
	Belum Terlayani	1.239.509 (61.5%)				
	Perencanaan		309.877	309.877	309.877	309.877

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005.

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui adanya kecenderungan kesenjangan gender pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok umur tertentu, yaitu:

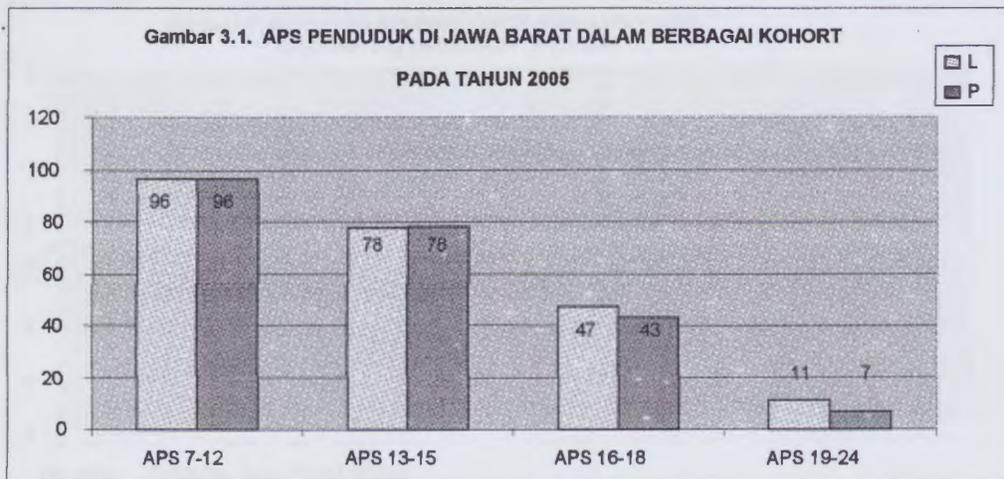
- APS pada kelompok umur 7-12 tahun dapat dikatakan tidak terdapat kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang cukup berarti (APS masing-masing 96% dengan disparitas gender -0,19%).
- APS pada kelompok umur 13-15 tahun dapat dikatakan tidak terdapat kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang cukup berarti (APS masing-masing 77% dengan disparitas gender 0,45%).
- APS pada kelompok umur 16-18 dan 19-24 tahun terdapat kesenjangan gender APS dengan posisi laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan disparitas gender sebesar -4,32 persen dan -4,18 persen.
- Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesenjangan gender dalam APS terjadi pada kelompok umur hampir dewasa dan umur dewasa dimana proporsi laki-laki relatif lebih tinggi partisipasinya dibandingkan dengan proporsi perempuan.

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Jawa Barat Tahun 2005

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	DISPARITAS
1	7-12	96.48	96.29	-0.19
2	13-15	77.52	77.97	0.45
3	16-18	47.29	42.97	-4.32
4	19-24	11.15	6.97	-4.18

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat, 2005, Hal. 81-82 & 138-148)

Sebagai Gambaran, Gambar 3.1 berikut ini menyajikan Kesenjangan gender pada APS di Jawa Barat berdasarkan kelompok umur (umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun) dengan kecenderungan disparitas gender berada pada kelompok umur 19-24 (-4,18%) yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan disparitas gender kelompok umur 16-18 tahun (-4,32%).

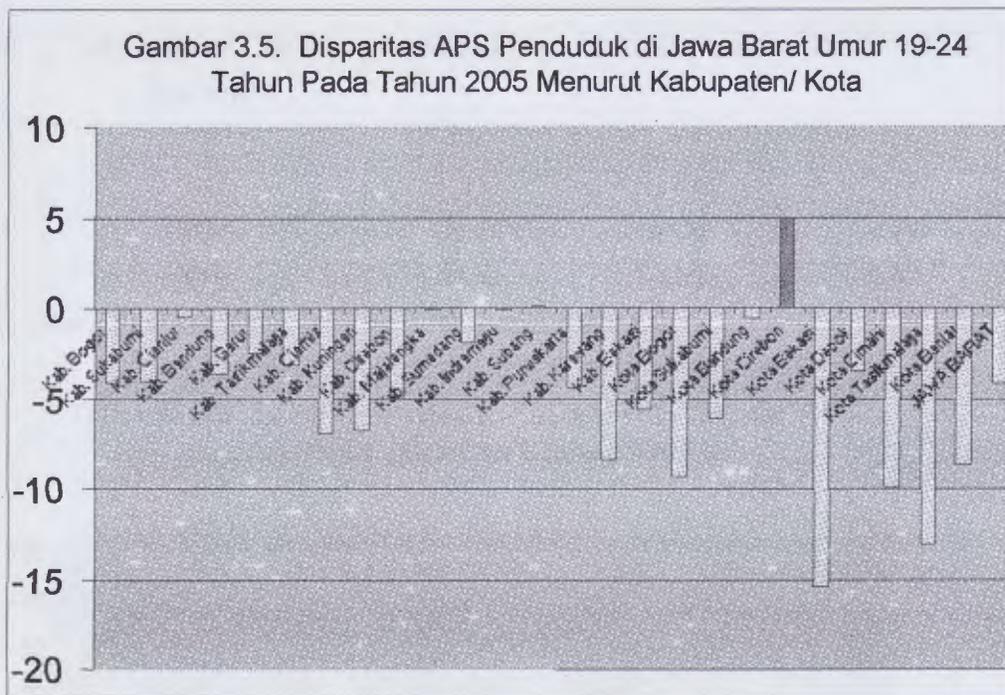


(Sumber: SUSEDA Jawa Barat. 2005)

Adapun kalau dijelaskan dengan lebih detail, maka Gambar 3.2 sampai dengan Gambar 3.5 menyajikan kesenjangan gender pada APS menurut kelompok umur di seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat. Secara mendetil, disparitas gender dalam APS menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran 3-7.

- o Kesenjangan gender dalam APS untuk kelompok umur 7-12 tahun dapat dikatakan relatif sangat kecil secara umum di Jawa Barat, sedangkan untuk variasi kesenjangan menurut Kabupaten/ Kota juga sangat kecil (Lampiran 3 & 4; Gambar 3.2).
- o Proporsi Perempuan lebih banyak berpartisipasi ke sekolah untuk kelompok umur 13-15 dari pada laki-laki di Kabupaten Majalengka, Kab. Purwakarta, Kota Sukabumi dan Kota Banjar (Lampiran 3 & 5; Gambar 3.3).
- o Sedangkan laki-laki lebih banyak berpartisipasi ke sekolah untuk umur 13-15 dari pada perempuan di Kota Cirebon (Lampiran 3 & 5; Gambar 3.3).
- o Perempuan lebih banyak berpartisipasi ke sekolah untuk umur 16-18 dari pada laki-laki di Kabupaten Indramayu, dan Kab. Kuningan (Lampiran 3 & 6; Gambar 3.4).
- o Sedangkan laki-laki lebih banyak berpartisipasi ke sekolah untuk umur 16-18 dari pada perempuan di Kab. Garut, Kab. Sumedang, Kota Bandung, dan Kota Depok (Lampiran 3 & 6; Gambar 3.4).
- o Laki-laki lebih banyak berpartisipasi ke sekolah untuk umur 19-24 dari pada perempuan di Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Banjar (Lampiran 3 dan 7; Gambar 3.5).

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat. 2005)



(Sumber: SUSEDA Jawa Barat. 2005)

Mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) maka berdasarkan Tabel 3.5 dan Gambar 3.6 diketahui adanya kecenderungan disparitas gender pada Angka Partisipasi Sekolah (APK) sebagai berikut:

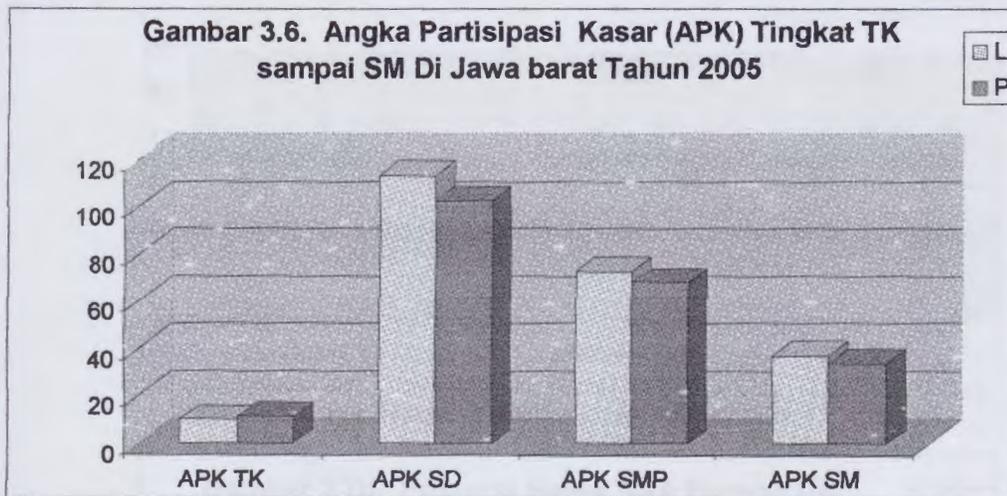
- Secara umum APK pada jenjang TK dapat dikatakan relatif tidak terdapat kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang cukup berarti, hanya kesenjangan yang sangat kecil dimana partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (disparitas gender 1,3%).
- APK pada jenjang SD menunjukkan kesenjangan gender yang paling tinggi dibandingkan disparitas gender pada jenjang sekolah lainnya dengan keadaan dimana partisipasi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan (disparitas gender -10,95%).
- Kesenjangan gender APK ditemukan konsisten dan berada pada posisi laki-laki lebih tinggi partisipasi sekolah di jenjang sekolah sesuai dengan kelompok umurnya dibandingkan dengan perempuan dengan kesenjangan gender yang semakin menurun dengan semakin tingginya jenjang sekolah (disparitas gender APK pada Sekolah Menengah (-3,42%) adalah lebih rendah dibandingkan

dengan disparitas gender APK pada SMP (-4,77%) dan lebih rendah daripada disparitas gender pada APK SD (-10,95%).

Tabel 3.5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Jawa Barat Tahun 2005

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	DISPARITAS
1	TK	10.1	11.4	1.3
2	SD	113.37	102.42	-10.95
3	SMP	72.71	67.94	-4.77
4	SM	37.32	33.9	-3.42

(Sumber: Profil Pendidikan Jawa Barat Tahun 2005, Tabel 2.2)



(Sumber: Profil Pendidikan Jawa Barat Tahun 2005, Tabel 2.2)

Adapun kalau dijelaskan secara lebih detil, maka Lampiran 8 menyajikan kesenjangan gender pada APK menurut jenjang pendidikan berdasarkan variasi keadaan di Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat,

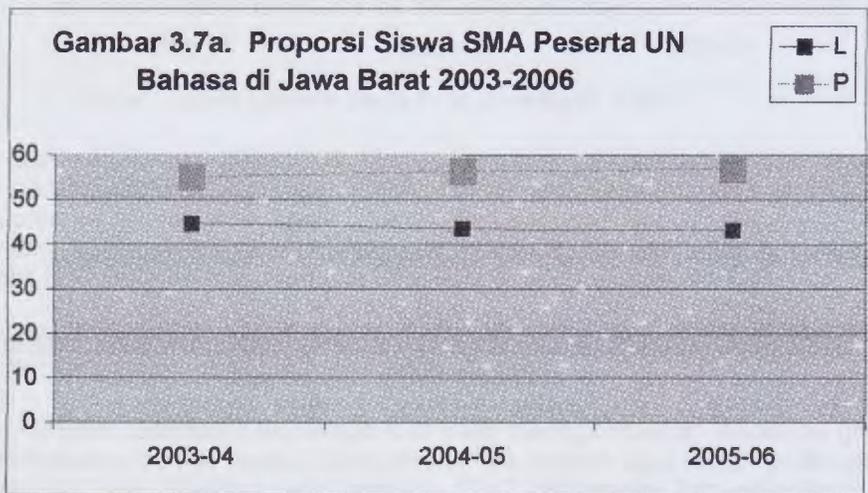
- Diketahui hasil bahwa berdasarkan disparitas gender dalam APK ditemui kesenjangan gender yang cukup tinggi pada jenjang TK dengan partisipasi perempuan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki di Kabupaten Kuningan (Lampiran 8).
- Umumnya laki-laki lebih banyak berpartisipasi di jenjang SD dan SMP dari pada perempuan dan mencapai kesenjangan yang tinggi sekali di Kabupaten

Bandung, dan Kabupaten Ciamis; sedangkan pada Kab. Subang ditemukan kesenjangan gender yang cukup tinggi dengan posisi laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan untuk jenjang SD saja (Lampiran 8).

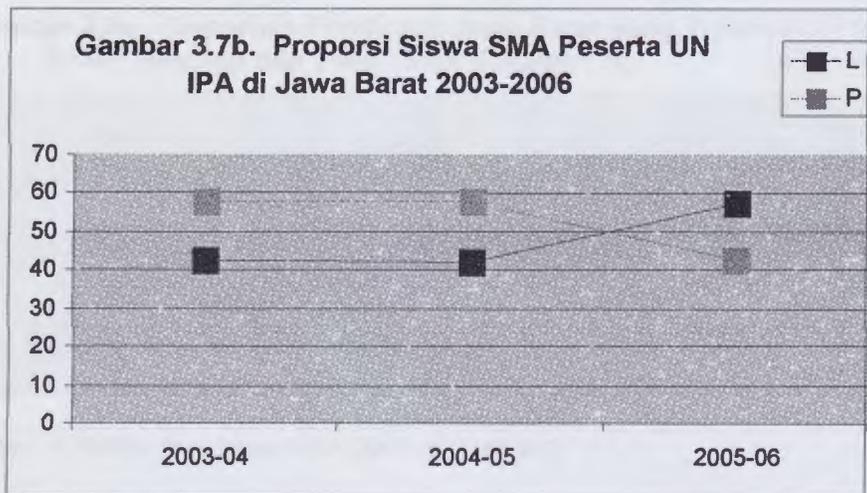
- Ditemukan kesenjangan gender yang cukup tinggi dengan posisi laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan untuk jenjang SM di Kab. Subang, Kabupaten Karawang, Kota Bogor, Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya (Lampiran 8).

e. Peserta Ujian Nasional

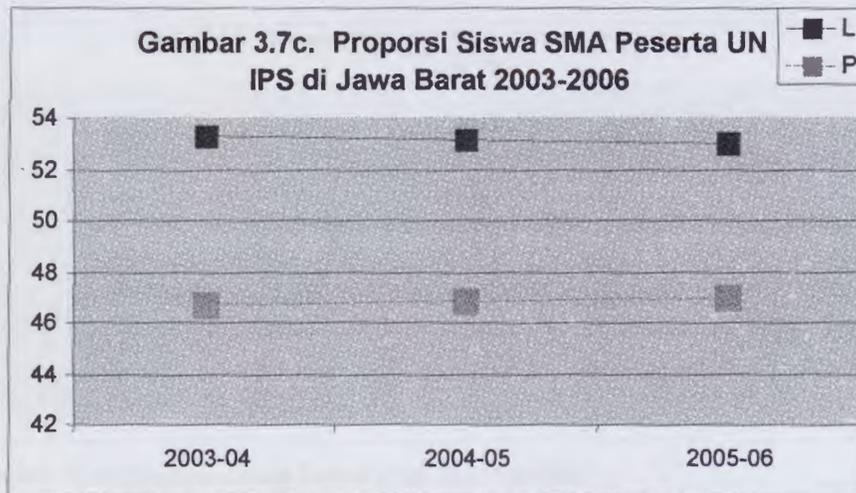
Diketahui bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Siswa SMA Peserta Ujian Nasional (UN) Provinsi Jawa Barat Tahun 2006, secara konsisten dari tahun 2003 sampai tahun 2006 proporsi perempuan lebih tinggi menjadi peserta ujian nasional Bahasa dan IPA dibandingkan dengan peserta laki-laki (Gambar 3.7a, 3.7b, dan 3.7c; Lampiran 9).



Sumber: Subdis Dikmenti Disdik Prov. Jawa Barat, 2006



Sumber: Subdis Dikmenti Disdik Prov. Jawa Barat. 2006



Sumber: Subdis Dikmenti Disdik Prov. Jawa Barat, 2006

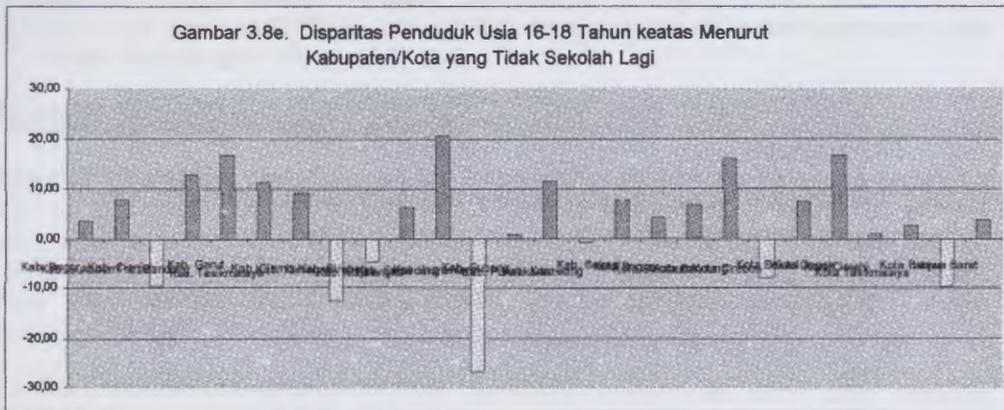
kecuali keadaan Tahun 2005-2006 dimana proporsi laki-laki lebih tinggi daripada proporsi perempuan untuk mata ajaran IPA. Namun untuk peserta ujian nasional IPS, ternyata proporsi laki-laki lebih besar dibandingkan dengan proporsi perempuan. Hasil ini memang agak mengagetkan mengingat biasanya laki-laki lebih tertarik untuk mengambil IPA, sedangkan perempuan lebih tertarik untuk mengambil IPS.

f. Komposisi Penduduk yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

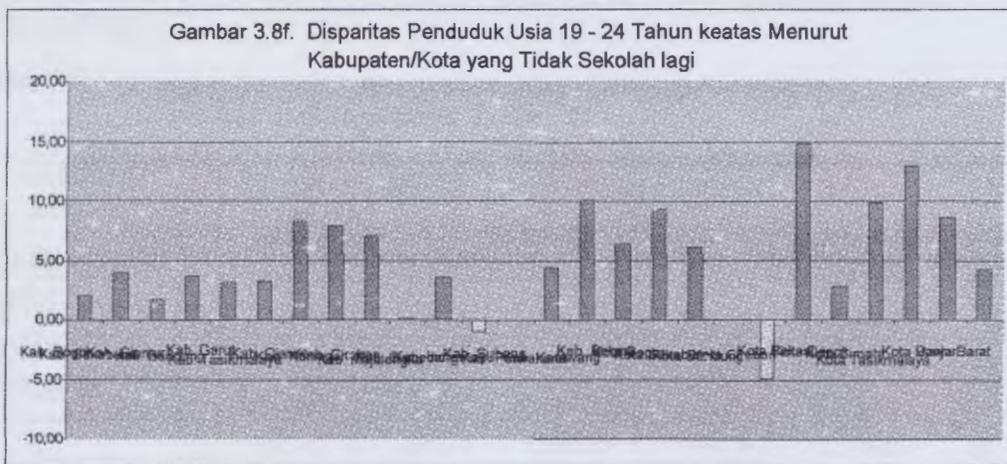
Berikut ini disajikan Gambar 3.8a sampai 3.8f yang menggambarkan disparitas gender menurut kelompok umurnya apakah tidak atau belum sekolah atau sudah tidak sekolah lagi. Secara lebih detail disajikan pada Lampiran 10-13 berdasarkan kabupaten/kota.



(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 147-148)



(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 144-145)



(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 147-148)

Berdasarkan Gambar-Gambar 3.8a sampai 3.8f di atas, didapatkan garis besar adanya kesenjangan gender yang semakin tinggi dengan semakin tua kelompok umur khususnya pada proporsi penduduk yang tidak sekolah lagi, misalnya:

- Pada kelompok umur 7-12 tahun, proporsi perempuan yang tidak sekolah lagi adalah lebih banyak dibandingkan dengan proporsi laki-laki (disparitas gender 0,58%), namun pada kelompok umur 13-15 tahun, proporsi laki-laki yang tidak sekolah lagi adalah lebih banyak dibandingkan dengan perempuan (disparitas gender -0,79%).
- Pada kelompok umur yang lebih dewasa (16-18 tahun dan 19-24 tahun), proporsi perempuan yang tidak sekolah lagi adalah lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki (disparitas gender berturut-turut adalah 3,74% dan 4,27%).

- Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan gender yang semakin tinggi dengan semakin dewasanya kelompok umur pada proporsi penduduk yang sudah tidak sekolah lagi, dengan proporsi perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

g. Perolehan Ijazah Kelulusan

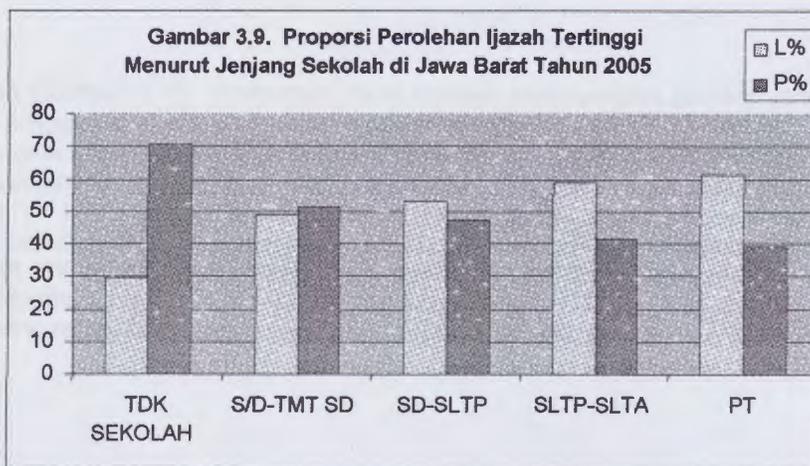
Berdasarkan Tabel 3.6 dan Gambar 3.9 , didapat garis besar adanya kesenjangan gender yang semakin tinggi dengan semakin tinggi jenjang pendidikan (SD sampai dengan tamat SD, tamat SD sampai dengan tamat SLTP, tamat SLTP sampai dengan tamat SLTA, dan tamat SLTA sampai dengan tamat Perguruan Tinggi) dengan posisi laki-laki lebih banyak menamatkan jenjang pendidikan dan memperoleh ijazah dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa proporsi penduduk perempuan yang tidak sekolah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk laki-laki (disparitas gender 41,16%). Sedangkan proporsi penduduk perempuan yang memperoleh ijazah SD adalah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk laki-laki (disparitas gender 2,39%).

Tabel 3.6. Proporsi Penduduk Memperoleh Ijazah Tertinggi Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005

JENJANG SEKOLAH	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	DISP
	JML	%	JML	%	JML	
TDK SEKOLAH	491674	29,42	1179692	70,58	1671366	41,17
S/D-TMT SD	9384705	48,80	9844341	51,20	19229046	2,39
SD-SLTP	2865159	52,92	2549191	47,08	5414350	-5,84
SLTP-SLTA	2907722	58,48	2064797	41,52	4972519	-16,95
PT	615717	61,24	389748	38,76	1005465	-22,47

Sumber: SUSEDA Propinsi Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 153-154.

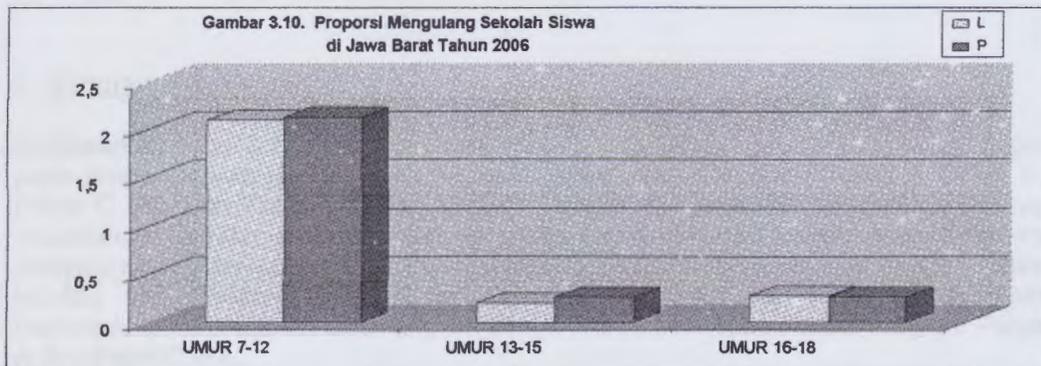


Sumber: SUSEDA Propinsi Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 153-154.

Tabel 3.6 dan Gambar 3.9 menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki yang memperoleh ijazah SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi adalah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penduduk perempuan (disparitas gender berturut-turut adalah -5,80%, -16,95%, dan -22,5%).

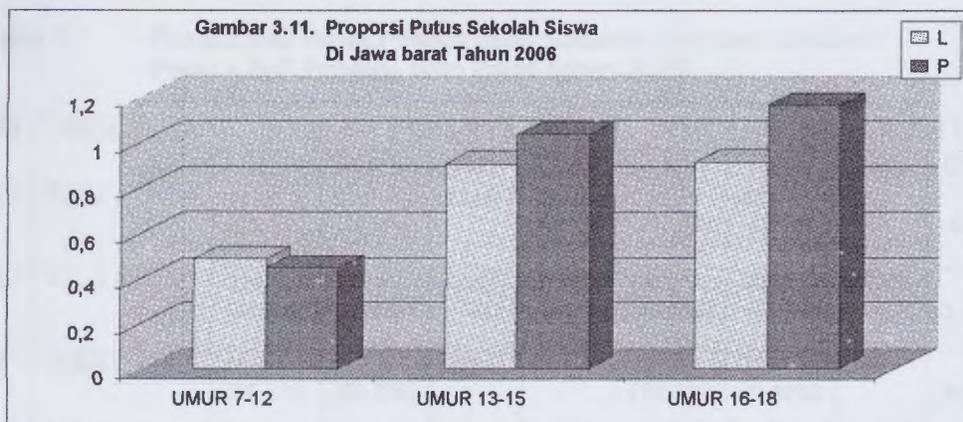
h. Proporsi Siswa Mengulang dan Putus Sekolah

Berdasarkan Gambar 3.10, didapatkan hasil adanya kesenjangan gender yang relatif kecil pada proporsi siswa mengulang kelas pada setiap kelompok umur (7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun) dengan proporsi laki-laki berturut-turut menurut kelompok umur yaitu 2,09%, 0,20%, dan 0,27%, sedangkan proporsi perempuan berturut-turut menurut kelompok umur yaitu 2,13%, 0,26%, dan 0,26% dengan disparitas yang relatif sangat kecil yaitu berturut-turut 0,04%, 0,06%, dan -0,01%. Secara garis besar juga ditemukan bahwa proporsi mengulang terbesar berada pada kelompok umur usia sekolah dasar.



Sumber: Dinas Pendidikan Jawa Barat Tahun 2006.

Berdasarkan Gambar 3.11, didapatkan hasil adanya kesenjangan gender yang relatif kecil pada proporsi siswa putus sekolah pada kelompok umur (7-12 tahun), dengan proporsi laki-laki adalah 0,49% dan proporsi perempuan adalah 0,45%. Namun ditemui adanya kesenjangan gender yang sangat kecil pada proporsi siswa putus sekolah pada kelompok umur 13-15 tahun, dan 16-18 tahun dengan posisi proporsi perempuan sedikit lebih besar putus sekolah dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Proporsi perempuan berturut-turut untuk kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun yaitu 1,04%, dan 1,17%, sedangkan proporsi laki-laki berturut-turut yaitu 0,91%, dan 0,92% dengan disparitas yang relatif sangat kecil yaitu berturut-turut -0,04%, 0,13%, dan 0,25%.



Sumber: Dinas Pendidikan Jawa Barat Tahun 2006.

Secara lebih detail Lampiran 14 sampai dengan 18a dan 18b menyajikan jumlah siswa mengulang putus sekolah, naik tingkat dan lulusan menurut jenis kelamin di Propinsi Jawa Barat Tahun 2005.

i. Program Kesetaraan

Berdasarkan Tabel 3.7, didapatkan hasil adanya kesenjangan gender yang cukup tinggi pada proporsi siswa peserta ujian nasional untuk semua program (Paket A, Paket B, Paket C IPA, dan Paket C IPS). Namun sangat mengesankan mengetahui adanya kesenjangan gender pada proporsi kelulusan siswa terhadap jumlah peserta bahwa ternyata siswa perempuan lebih menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan siswa laki-laki untuk Program Paket B dan Paket C IPS, sedangkan siswa laki-laki lebih menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan siswa perempuan untuk Program Paket A dan Paket C IPA.

Hal ini terbukti dari adanya disparitas yang negatif pada proporsi kelulusan siswa laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan (berturut-turut -9,6% untuk Paket A, dan -23,3% untuk Paket C IPA). Sedangkan hasil lainnya ditemukan adanya disparitas yang positif pada proporsi kelulusan siswa perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki (berturut-turut 3,3% untuk Paket B, dan 9,7% untuk Paket C IPS).

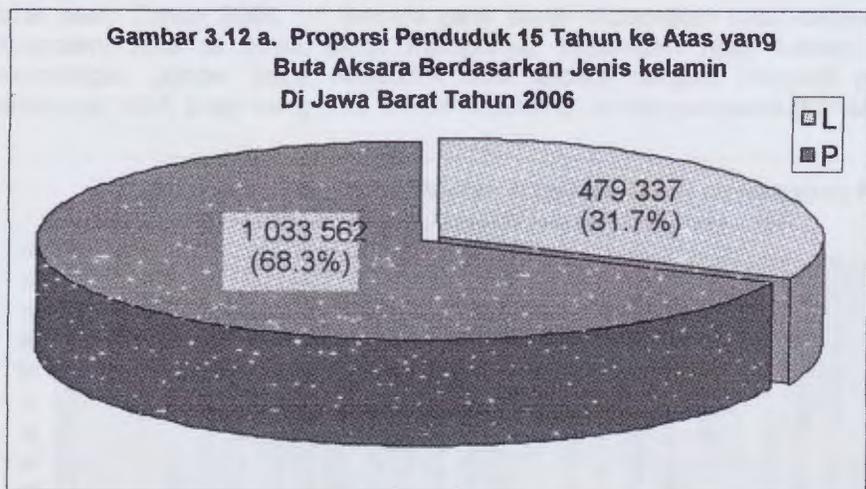
Tabel 3.7. Rekapitulasi Siswa Peserta Ujian Nasional (UN) dan Kelulusan Paket A-B-C Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

NO	PROGRAM	JUMLAH PESERTA UN				JUMLAH KELULUSAN UN			
		L	P	JML	DISP	L	P	JML	DISP
1	Paket A	1176 (63.6%)	672 (36.4%)	1848	-27.2	920 (78.2%)	461 (68.6%)	1381	-9.6
2	Paket B	9263 (64.4%)	5114 (35.6%)	14377	-28.8	6898 (74.5%)	3980 (77.8%)	10878	3.3
3	Paket C IPA	116 (69.0%)	79 (31.0%)	168	-38.0	89 (76.7%)	79 (100%)	168	23.3
4	Paket C IPS	6317 (71.2%)	2558 (28.8%)	8875	-42.4	4074 (64.5%)	1897 (74.2%)	5971	9.7
JUMLAH		16872	8423	25268		11981	6417	18398	

(%) cetak miring adalah persentase kelulusan terhadap jumlah peserta per jenis kelamin

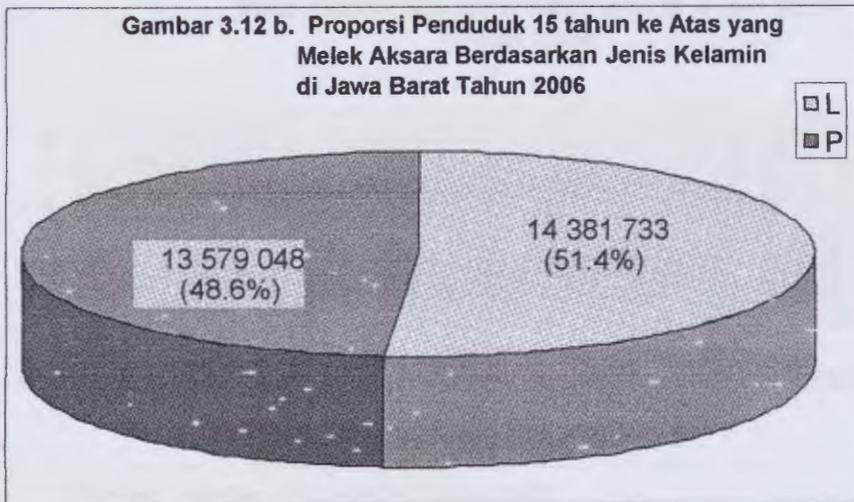
j. Program Pemberantasan Buta Aksara

Berdasarkan Gambar 3.12a didapatkan hasil adanya kesenjangan gender yang sangat tinggi pada proporsi penduduk buta aksara di Jawa Barat pada Tahun 2006, dengan total jumlah penduduk buta aksara sebanyak 1.512.899 orang yang terdiri atas 1.033.562 perempuan (68,3% terhadap total buta aksara atau 3,5% terhadap total penduduk perempuan) dan 479.337 laki-laki (31,7% terhadap total buta aksara atau 1,63% terhadap total penduduk laki-laki) dengan perbedaan kesenjangan gender (disparitas) sebesar -36,6%.



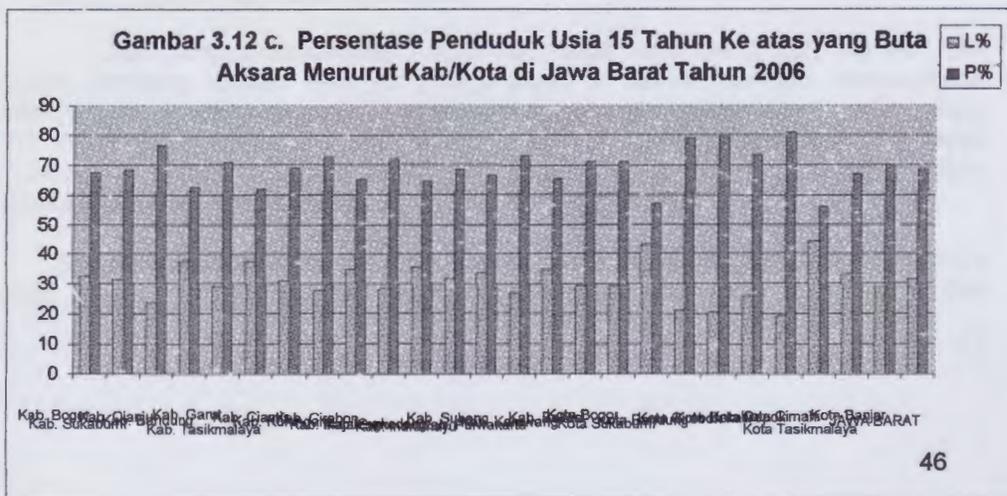
(Sumber: Sub-Dinas PLS-Dinas Pendidikan Tahun 2005)

Kebalikan dari hasil pada Gambar 3.12a, maka Gambar 3.12b didapatkan hasil adanya kesenjangan gender yang cukup tinggi pada proporsi penduduk melek aksara di Jawa Barat pada Tahun 2006, dengan total jumlah penduduk melek aksara sebanyak 27.960.781 orang yang terdiri atas 14.381.733 laki-laki (51,4% terhadap total melek aksara) dan 13.579.048 perempuan (48,6% terhadap total melek aksara) dengan perbedaan kesenjangan gender (disparitas) sebesar - 2,8%.

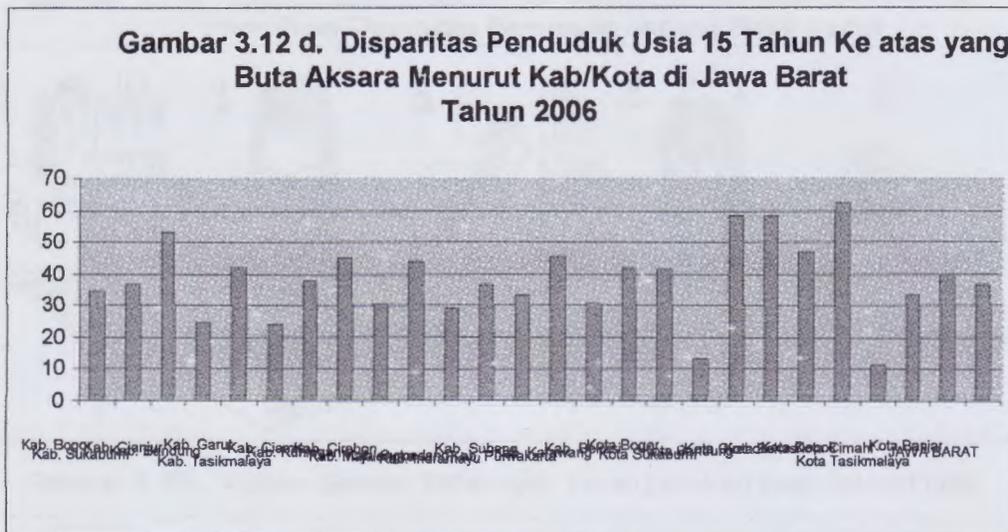


(Sumber: Sub-Dinas PLS-Dinas Pendidikan Tahun 2005)

Secara lebih detil, Gambar 3.12c dan 3.12d dan Lampiran 19 menyajikan presentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta aksara pada kabupaten/ kota di Jawa Barat pada Tahun 2006. Secara garis besar didapatkan hasil bahwa semua kabupaten/ kota di Jawa Barat mempunyai kesamaan hasil bahwa terdapat kesenjangan gender pada penduduk buta aksara dengan proporsi penduduk perempuan lebih tinggi yang buta aksara dibandingkan dengan penduduk laki-laki.



(Sumber: Sub-Dinas PLS-DisDik Tahun 2005)



(Sumber: Sub-Dinas PLS-DisDik Tahun 2005)

Ada beberapa yang perlu diperhatikan bagi kesenjangan gender pada buta aksara yaitu pada Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Cianjur.

2. Gambaran Umum dan Permasalahan Gender pada Pilar Mutu dan Relevansi Di Bidang Pendidikan

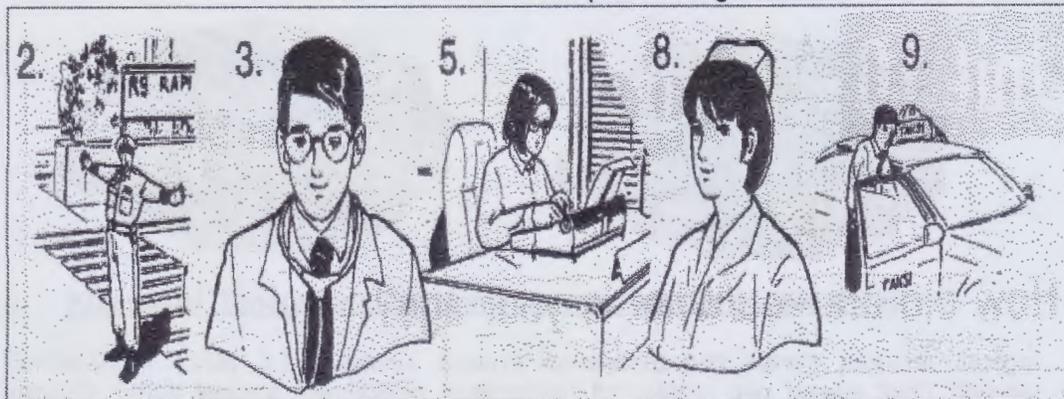
a. Ilustrasi Gambar pada Bahan Ajar

Studi yang dilakukan oleh Astuti, dkk (1999); Ismi, dkk (2002) dan Indri, dkk (2005) terhadap bahan ajar yang digunakan di sekolah-sekolah menunjukkan adanya bias gender baik pada ilustrasi gambar maupun teks kalimat pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Hal tersebut dibuktikan pada perbedaan frekuensi kemunculan peran maupun aktivitas serta kualitas kemunculan peran dan aktivitas antara laki-laki dengan perempuan.

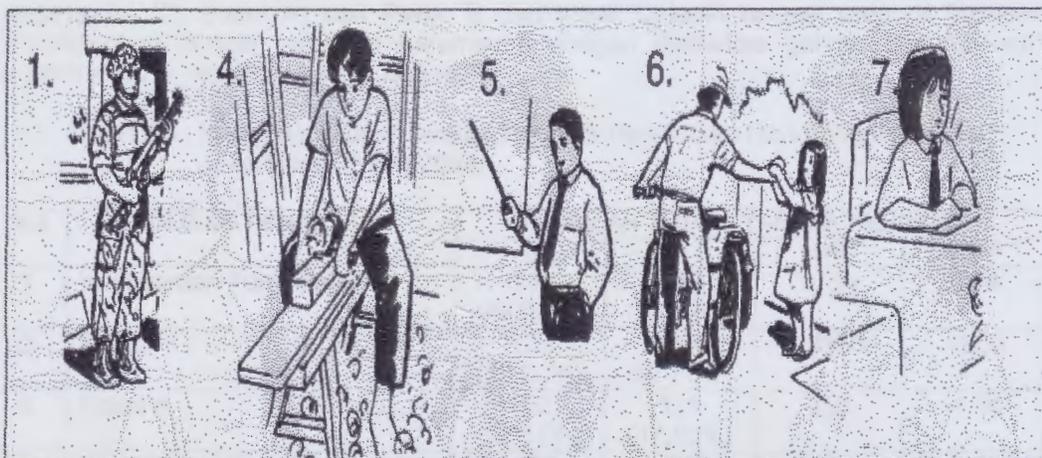
Seperti dijelaskan pada pendahuluan bahwa ada pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan yang sangat terlihat jelas pada teks kalimat dan

ilustrasi gambar pada buku ajar. Laki-laki lebih sering dimunculkan dalam aktivitas dan peran pada ranah produktif/publik, sedangkan perempuan lebih sering dimunculkan dalam aktivitas dan peran pada ranah reproduktif/domestik. Laki-laki lebih sering dimunculkan dengan peran pemegang posisi kunci yang mempunyai otoritas tinggi sebagai penentu kebijakan, sedangkan perempuan digambarkan memegang posisi lemah dan nomor dua. Gambar 13a sampai 13d menyajikan pemunculan peran laki-laki dan perempuan pada bahan ajar.

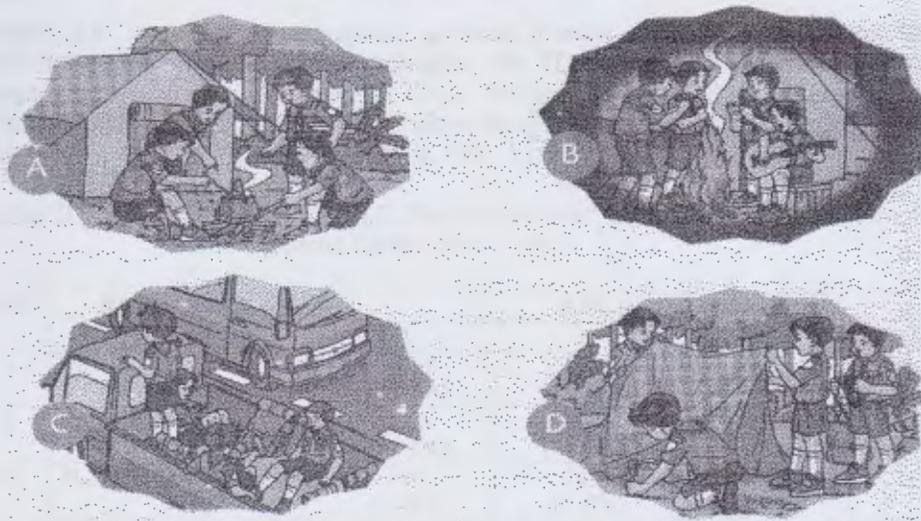
Gambar 3.13a. Ilustrasi Gambar Bahan Ajar: Peran Laki-laki pada Sektor Publik Pada Posisi Utama dan Perempuan Sebagai Posisi Kedua



Gambar 3.13b. Ilustrasi Gambar Bahan Ajar: Peran Laki-Laki pada Sektor Publik.



Gambar 3.13c. Ilustrasi Gambar Bahan Ajar: Peran Kegiatan Siswa Laki-Laki.



b. Komposisi Tenaga Pendidik Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat

Berdasarkan Tabel 3.8 diketahui adanya kecenderungan bahwa proporsi tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan keaksaraan fungsional dan kursus lebih banyak proporsi perempuan dibandingkan dengan proporsi laki-laki dengan disparitas gender berturut-turut adalah 6,04% dan 100%. Sedangkan proporsi tenaga pendidik untuk jenjang PAUD, Paket A, dan Paket B dan paket C lebih banyak proporsi laki-laki dibandingkan dengan proporsi perempuan dengan disparitas gender berturut-turut adalah -6,00%, -4,34%, -3,98%, dan -4,76%.

Tabel 3.8. Komposisi Tutor/ Tenaga Pendidik Pendidikan Non-Formal Provinsi Jawa Barat Tahun 2004

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH TUTOR/ TENAGA PENDIDIK			
		L	P	JML	DISP
1	Keaksaraan Fungsional	824 (46,98%)	930 (53,02%)	1754	6,04
2	PAUD	7076 (53,00%)	6274 (47,00%)	13350	-6,00
3	Paket A	132 (52,17%)	121 (47,83%)	253	-4,34
4	Paket B	4367 (51,99%)	4032 (48,01%)	8399	-3,98
5	Paket C	77 (52,38%)	70 (47,62%)	147	-4,76
6	Kursus	-	70 (100,00%)	70	100,00

Sumber: Sub Dinas PLS Disdik Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.9 berikut ini menyajikan proporsi Penilik PLS, TLD (Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat), Pamong Belajar, dan FDI yang menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan gender yang sangat tinggi dengan proporsi laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan proporsi perempuan dengan disparitas gender berturut-turut adalah -51,4%, -34,8%, -17,9%, -38,4%, dan -54,6%.

Tabel 3.9. Proporsi Penilik PLS, Pamong Belajar, TLD dan FDI Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005

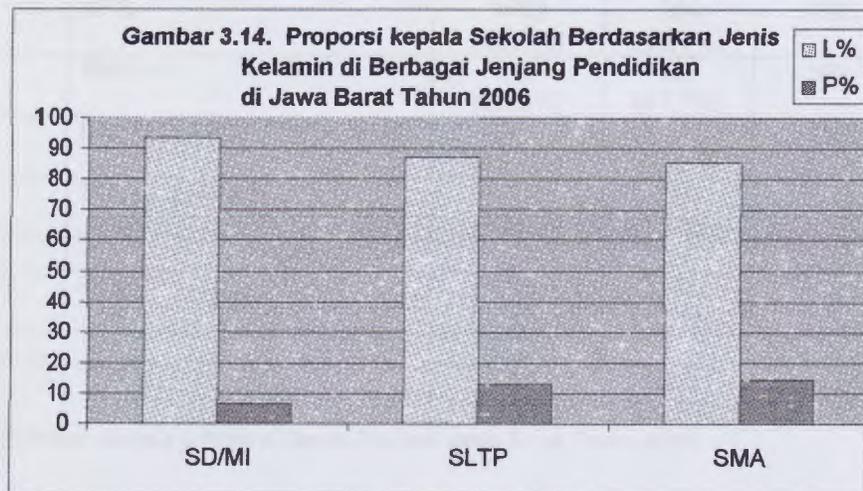
NO	KETERANGAN	JUMLAH PERSONAL			
		L	P	JML	DISP
1	PENILIK PLS	1031 (75.7%)	331 (24.3%)	1362	-51.4
2	PAMONG BELAJAR	192 (67.4%)	93 (32.6%)	285	-34.8
3	TLD	231 (58.9%)	161 (41.0%)	392	-17.9
4	FDI	83 (69.2%)	37 (30.8%)	120	-38.4
5	TBM (TAMAN BACAAN)	354 (77.3%)	104 (22.7%)	458	-54.6

Sumber: Sub Dinas PLS Disdik Provinsi Jawa Barat Tahun 2005

3. Gambaran Umum dan Permasalahan Gender pada Pilar Tata Kelola dan Pencitraan Di Bidang Pendidikan

a. Jumlah Kepala Sekolah

Berdasarkan Gambar 3.14 diketahui bahwa jumlah Kepala Sekolah pada setiap satuan pendidikan masih didominasi oleh laki-laki.



Sumber: Subdis Dikmenti Disdik Provinsi Jawa Barat Tahun 2006

Tabel 3.10. juga menunjukkan bahwa proporsi laki-laki lebih tinggi menduduki jabatan sebagai kepala sekolah dibandingkan dengan perempuan, mulai dari jenjang sekolah SD dan sederajat (dari berbagai jenis sekolah seperti SDL B, dan Salafiyah setara SD), jenjang sekolah SMP dan sederajat (dari berbagai jenis sekolah seperti MTs, SMPLB, dan Salafiyah setara SMP), dan jenjang sekolah SMA. Hanya jenis sekolah MI saja yang mempunyai proporsi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki dengan disparitas gender 11,4%.

Tabel 3.10. Rekapitulasi Komposisi Kepala Sekolah dari Berbagai Jenjang Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2006

NO	JENIS SEKOLAH	JUMLAH KEPALA SEKOLAH			
		L	P	JML	DISP
1	SD	12323 (64,8%)	6685 (35,2%)	19008	-29,6
	MI	2552 (44,3%)	3214 (55,7%)	5766	11,4
	SDLB	143 (57,4%)	106 (42,6%)	249	-14,8
	SALAFIYAH SETARA SD	137 (93,8%)	9 (6,2%)	146	-87,6
	TOTAL SD/MI/DLL	15155 (93,7%)	1014 (6,3%)	16169	-87,4
2	SMP	2333 (85,0%)	411 (15,0%)	2744	-70,0
	MTS	1692 (89,2%)	204 (10,8%)	1896	-78,4
	SMPLB	112 (58,3%)	80 (41,7%)	192	-16,6
	SALAFIYAH SETARA SMP	681 (95,6%)	31 (4,4%)	712	-91,2
	TOTAL SMP/MTS/DLL	4818 (86,9%)	726 (13,1%)	5544	-73,8
3	SMA	908 (85,6%)	153 (14,4%)	1061	-71,2
	TOTAL PROVINSI	20881 (65,7%)	10893 (34,3%)	31774	-31,4

Sumber: Subdis Dikmenti Disdik Provinsi Jawa Barat Tahun 2006

Tabel dan gambar di atas menunjukkan adanya kesenjangan gender pada kepala sekolah yang cukup tinggi dengan disparitas gender berturut-turut adalah -87,4%, -73,8%, dan -31,4%.

b. Jumlah Pejabat Dinas Pendidikan

Konsisten dengan hasil pada proporsi kepala sekolah berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah pejabat di Lingkungan Dinas pendidikan yang tersaji pada Tabel 3.11. juga menunjukkan adanya dominasi laki-laki pada semua jabatan mulai dari Widya Iswara, Pengawas PLB, Pengawas Fungsional, dan staf sampai pejabat Eselon IV sampai Eselon I dengan disparitas gender berturut-turut adalah -100%, -75,0%, -78,6%, -45,4%, -91,6%, -71,4%, dan -50,0%.

Tabel 3.11. Rekapitulasi Komposisi Jabatan Dinas Pendidikan dari Berbagai Jabatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2006

NO	JABATAN	JUMLAH JABATAN			
		L	P	JML	DISP
1	Eselon II	1 (100,0%)	0 (0,00%)	1	-100,0
2	Eselon III	7 (87,5%)	1 (12,5%)	8	-75,0
3	Eselon IV	25 (89,3%)	3 (10,7%)	28	-78,6
4	Staf	407 (72,7%)	153 (27,3%)	560	-45,4
5	Pengawas Fungsional	12 (92,3%)	1 (0,7%)	13	-91,6
6	Pengawas PLB	6 (85,7%)	1 (14,3%)	7	-71,4
7	Widya Iswara	3 (75,0%)	1 (25,0%)	4	-50,0
	Jumlah Jawa Barat	161	160	621	

Sumber: Subdis Dikmenti Disdik Provinsi Jawa Barat Tahun 2006

Konsisten dengan hasil sebelumnya, maka Pimpinan Lembaga Kursus di Jawa Barat yang tersaji pada Tabel 3.12. juga menunjukkan adanya konsistensi dominasi laki-laki pada kurun waktu lima tahun, mulai Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005 dengan disparitas gender berturut-turut adalah -28,4%, -28,2%, -27,8%, dan -20,2%. Jumlah lembaga kursus sendiri di Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.12. Lembaga Kursus dan Pimpinan Kursus Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2001-2005

NO	TAHUN	JML LEMBAGA KURSUS	PIMPINAN KURSUS			
			L	P	JML	DISP
1	2001	1014	651 (64.2%)	363 (35.8%)	1014	-28.4
2	2002	1039	666 (64.1%)	373 (35.9%)	1039	-28.2
3	2003	1052	672 (63.9%)	380 (36.1%)	1052	-27.8
4	2004	1242	746 (60.1%)	496 (39.9%)	1242	-20.2
5	2005	1292			1292	

Sumber: Sub Dinas PLS Disdik Provinsi Jawa Barat Tahun 2005.

Berikut ini disajikan Tabel 3.13. yang menunjukkan proporsi Ketua Lembaga PKBM yang sangat didominasi oleh laki-laki dalam kurun waktu lima tahun, mulai Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005 dengan disparitas gender berturut-turut adalah -89,8%, -82,6%, -83,2%, -84,2%, -82,8%, dan -47,8%. Jumlah PKBM di Jawa Barat mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun.

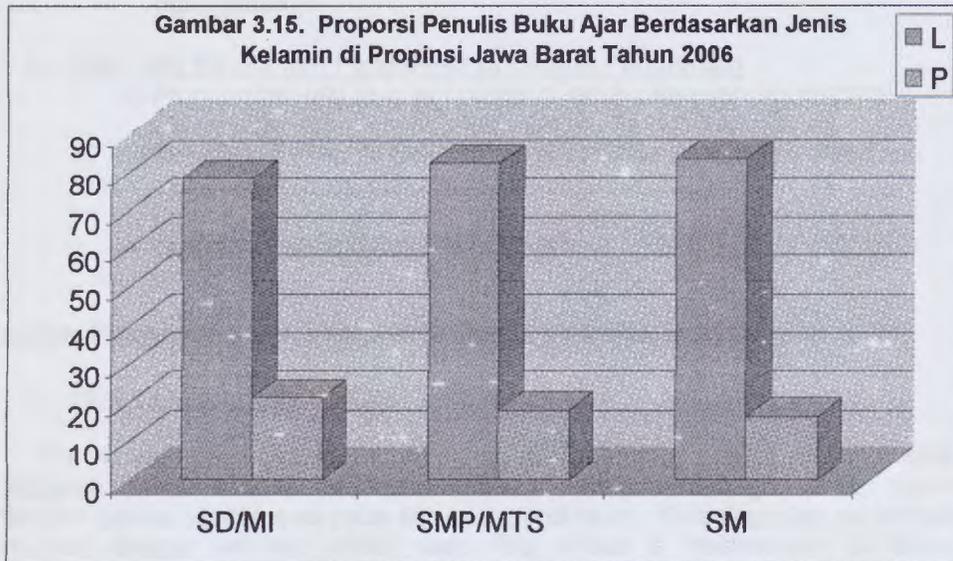
Tabel 3.13. Proporsi Ketua Lembaga PKBM Menurut Jenis Kelamin di Jawa Barat Tahun 2005

NO	TAHUN	JML PKBM	JUMLAH KETUA PKBM			
			L	P	JML	DISP
1	2001	254	241 (94.9%)	13 (5.1%)	254	-89.8
2	2002	449	410 (91.3%)	39 (8.7%)	449	-82.6
3	2003	547	500 (91.6%)	46 (8.4%)	546	-83.2
4	2004	775	714 (92.1%)	61 (7.9%)	775	-84.2
5	2005	918	839 (91.4%)	79 (8.6%)	918	-82.8
6	2006	1030	761 (73.9%)	269 (26.1%)	1030	-47.8

Sumber: Sub Dinas PLS Disdik Provinsi Jawa Barat tahun 2005

c. Penulis Buku Ajar.

Gambar 3.15 menyajikan penulis bahan ajar untuk jenjang SD/MI sampai dengan Sekolah menengah dengan proporsi yang semakin didominasi oleh laki-laki dengan semakin tingginya jenjang sekolah (78,5% untuk jenjang SD/MI, 81,9% untuk jenjang SMP/MTs, dan 83,42% untuk jenjang SM) dengan disparitas gender berturut-turut adalah -57,0%, -63,8%, dan 67,94%.



III B. ISU KESENJANGAN GENDER DAN ANALISIS FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERMASALAHAN GENDER

1. Isu Kesenjangan Gender

a. Pilar Akses & Pemerataan Di Bidang Pendidikan

- (1) Proporsi partisipasi sekolah dan keberhasilan memperoleh ijazah pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi perempuan dengan kesenjangan yang semakin tinggi dengan semakin tingginya jenjang sekolah.
- (2) Proporsi perempuan yang tidak sekolah lagi lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi laki-laki dengan kesenjangan yang semakin tinggi dengan semakin tinggi kelompok umur.

- (3) Proporsi perempuan yang buta aksara lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi laki-laki.

b. Pilar Mutu dan Relevansi Di Bidang Pendidikan

- (1) Masih terdapat Bahan Ajar yang bias gender pada tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MI.
- (2) Proporsi laki-laki yang menjadi tenaga pendidik dari berbagai program non-formal (PAUD, Paket A-B-C) dan berbagai posisi (Penilik PLS, pamong Belajar, TLD, FDI, dan TBM) lebih tinggi daripada proporsi perempuan.

c. Pilar Tata Kelola dan Pencitraan Di Bidang Pendidikan

- (1) Proporsi laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi perempuan dalam menduduki jabatan di Lingkungan dinas Pendidikan (Kepala Sekolah, Pejabat Dinas Pendidikan, Pimpinan Lembaga Kursus, dan Ketua Lembaga PKBM).
- (2) Proporsi laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi perempuan dalam menulis buku ajar.

2. Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Permasalahan Gender

a. Faktor Akses, Partisipasi dan Kontrol

Isu kesenjangan gender yang terjadi di Jawa Barat memunculkan keterpinggiran perempuan di Bidang Pendidikan dengan berbagai bukti, seperti kesenjangan gender yang terjadi pada tiga pilar pendidikan. Ketertinggalan perempuan dibandingkan dengan laki-laki terjadi pada Pilar Akses & Pemerataan Di Bidang Pendidikan dengan menyajikan gambaran kenyataan yang ada di masyarakat Propinsi Jawa Barat. Kesenjangan gender terbukti dari adanya proporsi partisipasi sekolah dan keberhasilan memperoleh ijazah pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi perempuan dengan kesenjangan yang semakin tinggi dengan semakin tingginya jenjang sekolah, proporsi perempuan yang tidak sekolah lagi lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi laki-laki dengan kesenjangan yang semakin tinggi dengan semakin tinggi kelompok umur, proporsi perempuan yang buta aksara lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi laki-laki.

Isu kesenjangan gender di Pilar Akses dan Pemerataan Di Bidang Pendidikan juga konsisten dengan isu kesenjangan gender di dua pilar lainnya, yaitu Pilar Mutu dan Relevansi Di Bidang Pendidikan dan Pilar Tata Kelola dan pencitraan di Bidang Pendidikan. Kedua pilar tersebut menggambarkan ketertinggalan perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam menjadi tenaga pendidik dari berbagai program baik non-formal maupun berbagai posisi menduduki jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan. Lebih lanjut, diketahui juga bahwa terjadi konsistensi kesenjangan gender dalam penulisan bahan ajar dengan proporsi penulis laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi penulis perempuan dalam menulis buku ajar, dan masih diketemukannya Bahan Ajar yang bias gender pada tingkat pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MI.

Dalam merespon isu-isu gender di atas, perlu dianalisis adanya perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal **AKSES** terhadap sistem pendidikan sehingga menyebabkan perbedaan angka partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan pada berbagai jenjang pendidikan. Perbedaan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan kemungkinan lebih disebabkan oleh nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat dan keluarga yang berkaitan dengan perbedaan peran gender.

Berkaitan dengan kesenjangan gender dalam hal akses di bidang pendidikan, sepertinya ada konsistensi kenyataan yang ada di lapangan, yaitu adanya keadaan dimana perempuan selalu menjadi prioritas kedua setelah laki-laki dan perempuan selalu tertinggal di bidang pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Bukti yang mendukung konsistensi ini adalah adanya data-data Komposisi penduduk yang bersekolah, Angka Partisipasi sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Data perolehan Ijazah, dan Data Buta Aksara, yang menunjukkan adanya disparitas gender yang selalu bertanda negatif, artinya bahwa perempuan selalu tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dalam berpartisipasi ke sekolah. Kabupaten/Kota yang perlu mendapatkan perhatian karena adanya kesenjangan gender meliputi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, dan Kota Cirebon.

Kesenjangan gender terbukti dari adanya proporsi partisipasi sekolah yang semakin tinggi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan dengan semakin tingginya jenjang sekolah (disparitas gender untuk APS 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun berturut-turut adalah -0,19%, 0,45%, -4,35%, dan -4,18%; dan disparitas gender untuk APK SD, SMP, dan SM berturut-turut adalah -10,95%, -4,77%, dan -3,42%.

Konsisten dengan data disparitas gender dalam hal partisipasi sekolah di atas, maka data perolehan ijazah tertinggi juga menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana perempuan selalu tertinggal dalam memperoleh ijazah menurut jenjang sekolah. Kesenjangan gender dalam hal memperoleh ijazah tertinggi terbukti dari adanya proporsi perolehan ijazah yang semakin tinggi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan dengan semakin tingginya jenjang sekolah (disparitas gender untuk angka perolehan Ijazah sampai dengan tamat SLTP, sampai dengan tamat SLTA, dan sampai dengan tamat Perguruan Tinggi berturut-turut adalah -5,8%, -16,95%, dan -22,5%. Sedangkan disparitas penduduk yang tidak sekolah adalah 41,16% yang artinya banyak sekali proporsi perempuan yang tidak sekolah dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Konsisten dengan hasil adanya kesenjangan gender tersebut, masih dapat dibuktikan dengan banyaknya angka buta huruf yang terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki dengan disparitas gender sebesar -36,6%.

Konsisten dengan data disparitas gender dalam hal perolehan ijazah di atas, maka data penduduk yang sudah tidak sekolah lagi menunjukkan kesenjangan yang semakin besar pada proporsi perempuan dibandingkan dengan laki-laki (disparitas gender untuk angka penduduk tidak sekolah lagi pada kelompok umur 7-12 tahun, 13-15

tahun, 16-18 tahun, 19-24 tahun berturut-turut adalah 0,58%, -0,79%, 3,74%, dan 4,27%). Sedangkan siswa yang putus sekolah kebanyakan dari pihak perempuan dengan disparitas yang semakin besar (disparitas gender untuk angka penduduk putus sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, berturut-turut adalah -0,04%, 0,13%, dan 0,25%.

Rendahnya **PARTISIPASI** perempuan pada berbagai jenjang pendidikan ini disebabkan oleh norma-norma masyarakat yang masih menganggap peran utama laki-laki adalah sebagai pencari nafkah utama (*main-breadwinner*) sehingga lebih penting dan diutamakan untuk memperoleh pendidikan daripada perempuan yang peran utamanya sebagai ibu rumah tangga (*housewife*). Peran laki-laki yang diberikan oleh masyarakat di sektor publik ini dianggap sangat bermartabat dan perlu dilakukan investasi sejak usia kecil. Posisi laki-laki dalam keluarga, sesuai dengan sistem patriarki ditempatkan sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab menopang ekonomi keluarga secara keseluruhan dan soliter. Dengan demikian laki-laki yang nantinya berkewajiban mencari nafkah, maka laki-laki harus lebih pandai dan lebih berpendidikan dibandingkan perempuan. Dengan adanya keterbatasan ekonomi keluarga, maka, kedudukan laki-laki sebagai kepala keluarga mempunyai konsekuensi lebih diutamakan untuk disekolahkan dibandingkan dengan perempuan. Keluarga pasti lebih memprioritaskan laki-laki dan mengesampingkan perempuan untuk sekolah. Apalagi dengan keadaan tempat tinggal yang jauh dari sarana pendidikan, maka secara otomatis perempuan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu data menjelaskan adanya kekonsistenan kesenjangan gender dalam partisipasi sekolah pada ketertinggalan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi sangat erat hubungannya dengan pengambilan keputusan dalam keluarga. Perempuan dinilai kurang mempunyai **KONTROL** atas sumberdaya keluarganya sehingga kurang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat pada umumnya adalah bahwa wewenang kepala keluarga (seorang ayah atau laki-laki) adalah sebagai pengambil keputusan (*decision maker*), sedangkan wewenang perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga adalah sebagai penerima keputusan (*decision taker*). Nilai, sikap, pandangan, dan perilaku seorang ayah sebagai kepala keluarga sangat menentukan dalam pengambilan keputusan keluarga, khususnya kepada keputusan untuk menentukan apakah anak sekolah atau tidak, dan memilih jurusan atau keahlian. Sedangkan peran perempuan sebagai pemegang peran domestik, selalu diarahkan pada fungsi domestik, yaitu bertanggung jawab terhadap perawatan rumah dan pengasuhan anak di dalam rumah.

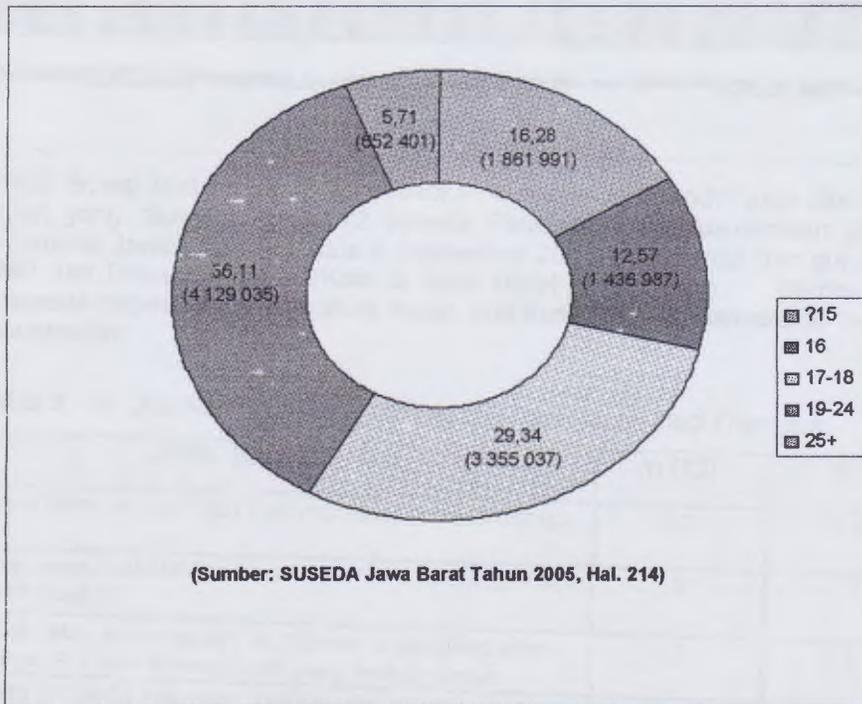
b. Faktor Sosial-Ekonomi-Budaya dan Geografi

Faktor-faktor sosial budaya yang menyebabkan masyarakat masih beranggapan bahwa laki-laki adalah pemegang peran publik dan diasumsikan sebagai penopang ekonomi keluarga, sedangkan perempuan memiliki peran domestik dan diasumsikan sebagai penanggung jawab keadaan rumah tangga terbukti dari data-data diatas, yaitu kesenjangan gender pada perempuan untuk berpartisipasi sekolah, atau dalam beberapa kasus anak perempuan terlambat dalam memasuki sekolah, angka buta

aksara (penduduk umur 15-44 tahun) yang lebih tinggi dari laki-laki, dan banyaknya perempuan yang putus sekolah dibandingkan dengan laki-laki.

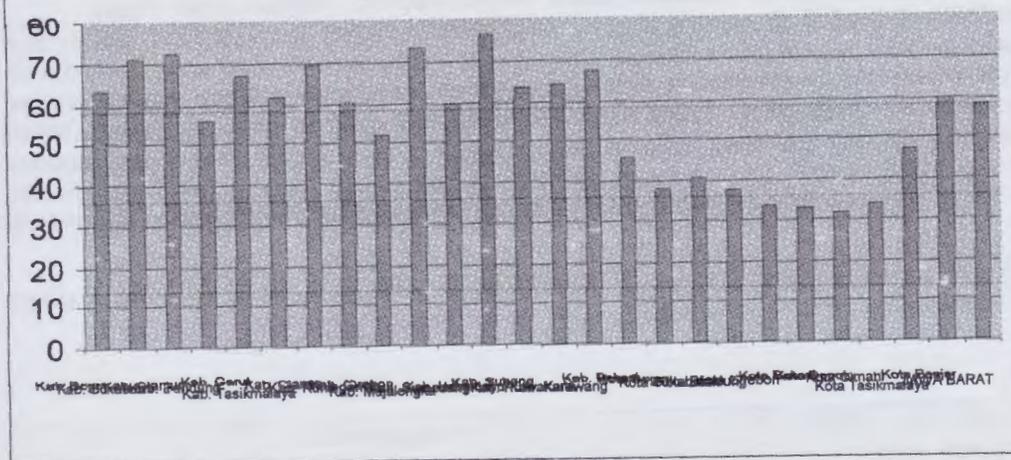
Masalah kesenjangan gender yang diakibatkan oleh kendala sosial budaya tercermin dari adanya data bahwa perempuan diminta untuk cepat menikah dan data menggambarkan bahwa hampir 60% perempuan di Jawa Barat menikah pada umur dibawah atau sampai dengan 18 tahun yang sebetulnya melanggar Undang-Undang perkawinan. Data mengenai angka perkawinan berdasarkan umur perempuan disajikan pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16. Persentase Penduduk Perempuan (10 Tahun Ke Atas) Menikah Berdasarkan Umur Perkawinan Pertama Di Jawa Barat Tahun 2005.



Gambar 3.17 dan Lampiran 20 menggambarkan persentase perempuan Di Jawa Barat yang Kawin pertama kali pada umur di bawah atau sama dengan 18 Tahun berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2005 dengan persentase tertinggi berturut-turut berada pada Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bogor.

Gambar 3.17. Persentase Perempuan di Jawa Barat yang Kawin Pertama Kali pada Umur Dibawah atau Sama dengan 18 Tahun pada Tahun 2005



Faktor Sosial Budaya yang menyebabkan kesenjangan gender juga dibuktikan pada angket yang dibagikan pada 72 peserta Pelatihan Pengarusutamaan gender (PUG) di provinsi Jawa Barat (Agustus & September 2006) yang terdiri dari guru-guru PPKN SMP dan Dinas Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Tabel 3.14). Berdasarkan jawaban peserta dapat dikatakan bahwa sudah ada kesadaran di masyarakat tentang adanya persamaan

Tabel 3. 14. Arti Seorang Anak Laki-laki dan Perempuan Bagi Orangtua

Jenis jawaban	n (72)	%
Sama saja antara laki-laki dan perempuan, berbeda secara biologis	63	87.5
Berbeda harapan, Laki-laki sebagai KK, Perempuan sebagai penguat keturunan	3	4.2
Anak laki-laki atau perempuan, sama-sama pengikat erat bagi keturunan RT dan titipan Allah yang harus dijaga	2	2.8
Sama, tetapi berbeda harapan, karena laki-laki maskulin sedang perempuan feminine dan berbeda dalam memperoleh penghidupan; laki-laki lebih agresif dan perempuan lebih dewasa	4	4.5
Total	72	100

Sumber: Angket Peserta Training PUG Propinsi Jawa Barat, Agustus & September 2006

kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang tercermin dari pendapat tentang arti seorang anak laki-laki dan perempuan bagi orangtua. Sebagian besar peserta mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai arti dan kepentingan yang sama mengenai kehadirannya dalam keluarga (dijawab oleh 87,5% peserta).

Masih berhubungan dengan faktor sosial budaya, Tabel 3.15 berikut ini menyajikan hal-hal yang menyebabkan kesenjangan gender di bidang pendidikan, diantaranya yang banyak disebutkan oleh peserta adalah adanya: (1) Prinsip hidup bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga lebih penting dan berpotensi dari pada perempuan; perempuan sebagai ibu rumah tangga saja (dijawab oleh 33,87% peserta), dan (2) Langkah perempuan lebih terbatas, maka dari itu pendidikannya kurang diperhatikan; adanya diskriminasi pada perempuan dalam pendidikan (dijawab oleh 29,03% peserta).

Tabel 3. 15. Faktor-faktor Sosial Budaya yang Menyebabkan Kesenjangan Gender di Bidang Pendidikan

Keterangan	n (62)	%
Perempuan belum bisa menunjukkan kompetensinya/ belum bisa bersaing; Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah pada pendidikan perempuan	6	9,68
Langkah perempuan lebih terbatas, maka dari itu pendidikannya kurang diperhatikan; adanya diskriminasi pada perempuan dalam pendidikan	18	29,03
Kondisi ekonomi keluarga yang memprioritaskan laki-laki	16	25,81
Adanya prinsip hidup bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan memiliki tanggung jawab yang besar sehingga lebih penting dan berpotensi dari pada perempuan, perempuan sebagai ibu rumah tangga saja	21	33,87
Adanya anggapan lama bahwa laki-laki dilarang sekolah ke kejuruan putri dan perempuan dilarang ke sekolah teknik karena sekolah teknik adalah untuk laki-laki	1	1,62

Sumber: Angket Peserta Training PUG Propinsi Jawa Barat, Agustus & September 2006

Faktor lain yang mempengaruhi akses antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan faktor kemiskinan yang mengakibatkan ketersediaan biaya pendidikan yang terbatas pada sebagian keluarga di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat pada khususnya. Hal ini juga dibuktikan oleh hasil survei pada tenaga pendidik dan aparat di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, bahwa kondisi ekonomi keluarga menyebabkan keluarga lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan karena dilatarbelakangi oleh norma masyarakat (dijawab oleh 25,81% peserta). Disamping itu, dampak dari kemiskinan menyebabkan keluarga tidak menyekolahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk disuruh menjeri

pekerjaan sebagai anak jalanan atau sebagai pekerja seks komersial. Dilaporkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang adanya beberapa kasus siswa perempuan yang *drop out* dikarenakan kesulitan ekonomi dan kemusiaan diminta oleh orangtuanya untuk mencari nafkah menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Selain faktor sosial-budaya dan faktor ekonomi adalah faktor geografis. Dalam diskusi yang berlangsung pada saat "Training PUG Propinsi Jawa Barat, Agustus & September 2006", didapatkan hal-hal yang dapat berpengaruh pada akses, dan partisipasi pendidikan yang memicu kesenjangan gender, yaitu:

- Keterbatasan anggaran pendidikan Kabupaten/Kota menjadi pembatas untuk melakukan pembangunan di Bidang Pendidikan sehingga menghambat peningkatan kualitas sarana/prasarana sekolah yang dibutuhkan untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat.
- Faktor Kebijakan Pendidikan yang belum Responsif gender dimana kebanyakan kebijakan Pendidikan masih netral gender, sehingga perlu sosialisasi dan advokasi pada para pejabat dan stakeholder di Bidang Pendidikan mengenai pentingnya Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan.
- Keterbatasan sarana/prasarana pendidikan menjadi penghambat orangtua siswa dalam menyekolahkan anaknya, seperti keadaan kelas dan sekolah yang rusak dengan kondisi mau hancur serta jumlah guru yang terbatas membuat orangtua merasa tidak termotivasi untuk menyekolahkan anaknya.
- Jarak geografis yang sangat jauh antara lokasi sekolah dan tempat pemukiman penduduk menjadi penghambat orangtua untuk menyekolahkan anaknya, misalnya orangtua siswa terutama yang mempunyai anak perempuan enggan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMP) yang berada di Kecamatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER DI JAWA BARAT

Kesimpulan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh pada kesenjangan gender di Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial Budaya dan Norma Masyarakat

- Prinsip hidup bahwa laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dan memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga lebih penting dan berpotensi dari pada perempuan.
- Perempuan sebagai ibu rumah tangga saja, langkah perempuan lebih terbatas, maka dari itu pendidikannya kurang diperhatikan.
- Adanya diskriminasi pada perempuan dalam pendidikan.
- Adanya perkawinan dini pada perempuan.
- Adanya anggapan lama bahwa laki-laki dilarang sekolah ke kejuruan putri dan perempuan dilarang ke sekolah teknik karena sekolah teknik adalah untuk laki-laki.
- Perempuan belum bisa menunjukkan kompetensinya/ belum bisa bersaing; Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah pada pendidikan perempuan.

b. Faktor Ekonomi yang berhubungan dengan Tingkat Kemiskinan Masyarakat

- Faktor kemiskinan mengakibatkan ketersediaan biaya pendidikan terbatas sehingga menyebabkan keluarga lebih memprioritaskan pendidikan anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan.
- Dampak dari kemiskinan menyebabkan kasus-kasus keluarga yang meminta anak-anaknya bekerja baik sebagai anak jalanan, bekerja sebagai kuli dan bahkan sebagai pekerja seks komersial (PSK) pada sebagian anak perempuan di sebagian daerah di Jawa Barat.

c. Faktor Keterbatasan anggaran pendidikan Kabupaten/Kota

- Sebagai pembatas untuk melakukan pembangunan di Bidang Pendidikan
- Sebagai penghambat peningkatan kualitas sarana/prasarana sekolah yang dibutuhkan untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat.

d. **Faktor Kebijakan Pendidikan yang belum Responsif Gender**

- Kebanyakan kebijakan Pendidikan masih netral gender.
- Perlu sosialisasi dan advokasi pada para pejabat dan stakeholder di Bidang Pendidikan mengenai pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan.

e. **Faktor Keterbatasan sarana/prasarana pendidikan**

- Sebagai penghambat orangtua siswa dalam menyekolahkan anaknya
- Membuat orangtua merasa tidak termotivasi untuk menyekolahkan anaknya.

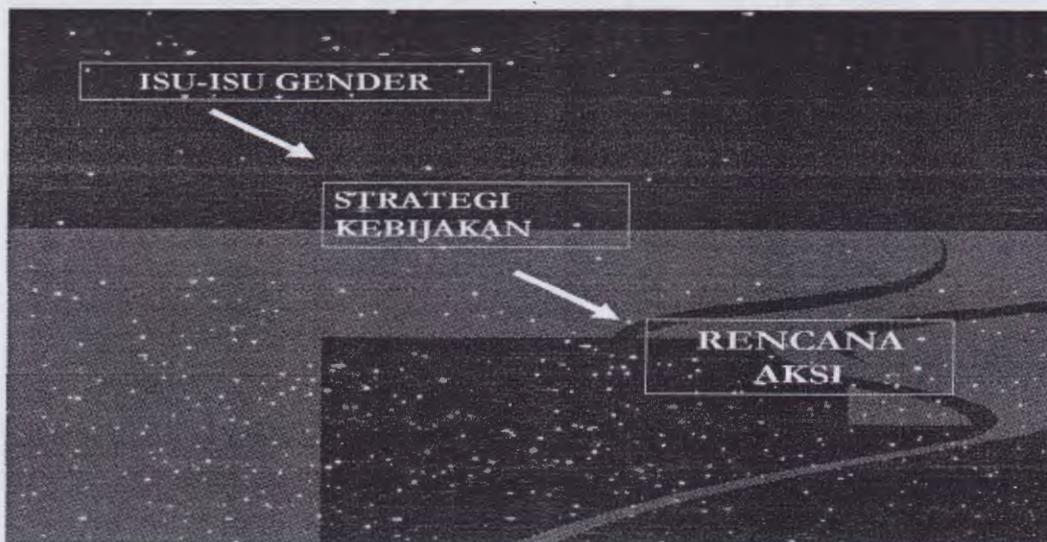
f. **Faktor Jarak geografis**

- Jarak antara lokasi sekolah dan tempat pemukiman penduduk yang jauh menjadi penghambat orangtua untuk menyekolahkan anaknya.
- Siswa perempuan menjadi lebih tidak diprioritaskan dalam menempuh pendidikan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi (SMP) yang berada di Kecamatan.

Saran

Berdasarkan isu-isu gender yang ada pada Bagian III, maka pada Bab IV ini ditindaklanjuti dengan arah dan strategi kebijakan serta rencana aksi yang dilakukan untuk merespon kesenjangan gender yang terjadi (Gambar 4.1.).

Gambar 4.1. Keterkaitan antara Isu-Isu Kesenjangan Gender, Strategi Kebijakan dan Rencana Aksi di Bidang Pendidikan



IVA. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Pendidikan di Jawa Barat tertulis dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2007. Rencana strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ditetapkan untuk Periode 2006-2008 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 188.34/SK.6280-BP/2005.

Arah kebijakan, tujuan, strategi program dan rencana aksi program pendidikan yang responsif gender di Jawa Barat merupakan kelanjutan dan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Visi Jawa Barat yang tertulis " Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara Tahun 2010" merupakan pemacu bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk berkiprah secara optimal menata seluruh tatanan yang ada agar menjadi potensi yang mampau mendukung terhadap upaya perwujudan visi tersebut. Untuk itu Pemerintahan Jawa Barat telah merumuskan visinya "Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 2010", yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia (SDM) Jawa Barat.
- b. Mengembangkan struktur perekonomian daerah yang tangguh
- c. Memantapkan kinerja pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan budaya daerah.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku perangkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggungjawab besar dalam merealisasikan visi yang dimaksud dengan mewujudkan misi ke satu, yaitu : "Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia (SDM) Jawa Barat" melalui pembinaan yang terbaik terhadap pendidikan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat terwujud. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat. Maju mundurnya pendidikan sangat tergantung kepada kepedulian dan kiprah pemerintah dan masyarakatnya. Pembangunan, peningkatan dan pemberdayaan pendidikan sebagai komposit peningkatan kesejahteraan rakyat Jawa Barat membutuhkan upaya-upaya terobosan baru yang strategis. Dengan demikian perlu program yang sinergis antara unsur-unsur penyelenggara pendidikan baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota. Hal ini mengingat bahwa APS dan APK untuk semua jenjang pendidikan masih menunjukkan disparitas yang cukup tinggi.

Tersusunnya kebijakan tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan bidang pendidikan yang difokuskan pada dua isu pokok, yaitu (1) Rendahnya pencapaian angka Indeks Pendidikan (IP) yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia, dan (2) Belum tuntasnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Permasalahan umum yang masih ditemui adalah antara lain (1) Belum meratanya mutu pendidikan di setiap sekolah, (2) Masih tingginya angka kekurangan jumlah guru, (3) Belum tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap perlunya peningkatan mutu pendidikan, (4) Tidak lengkapnya sarana penunjang pembelajaran di sekolah-sekolah,

seperti perpustakaan dan laboratorium, (5) Masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, dan (6) Kurang tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel dan terpilah berdasarkan jenis kelamin yang dapat dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan.

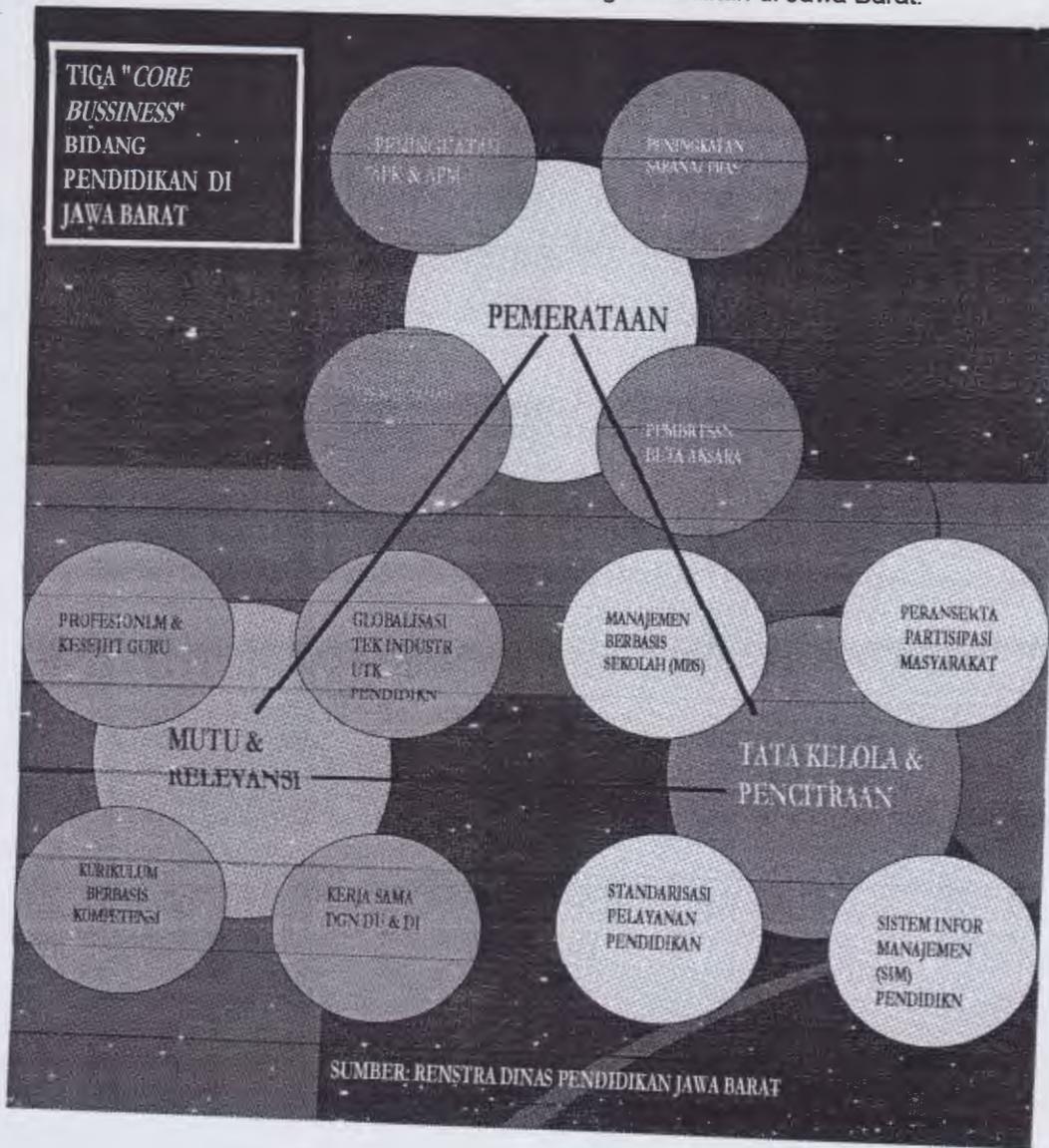
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan pembangunan bidang pendidikan yang tertuang pada Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2006-2008 diarahkan untuk: (a) Melaksanakan koordinasi yang efektif pada seluruh jajaran pendidikan untuk membangun sinergitas pembangunan pendidikan, (b) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka menciptakan suasana pendidikan yang kondusif, (b) Menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif, dan (d) meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pendidikan, guru dan tenaga kependidikan lainnya serta institusi pendidikan. Adapun implementasi kebijakan-kebijakan tersebut terbagi ke dalam program pembangunan pendidikan sebagai berikut: (a) Program Misi 1: Membangun koordinasi dan sinergitas antar lini, unit dan institusi dalam pengelolaan pendidikan di Jawa Barat yang terintegrasi berdasarkan tugas, fungsi dan peran masing-masing, (b) Program Misi 2: Menciptakan suasana kondusif di dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, (c) Program Misi 3: meningkatkan kinerja aparatur dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan pendidikan di Jawa Barat terdapat dua isu pokok, yaitu (a) Rendahnya pencapaian angka Indeks Pendidikan (IP) yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (b) Belum tuntasnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Sebagai gambaran umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan Tahun 2004, ternyata Jawa Barat hanya mampu mencapai angka Indeks Pendidikan (IP) 79,75, Angka Melek Huruf (AMH) 95,05 dan rata-rata lama sekolah (RLS) 7,38 yang masih jauh dari target yang diharapkan. Begitu besar tantangan yang harus dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sehingga Gubernur Jawa Barat telah menetapkan bahwa periode 2004-2008 sebagai tahun-tahun akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pendidikan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BAPEDA telah menerbitkan dokumen "Akselerasi Pembangunan Pendidikan Jawa Barat 2004-2008" yang harus menjadi acuan bagi upaya perencanaan pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan (IP) serta penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

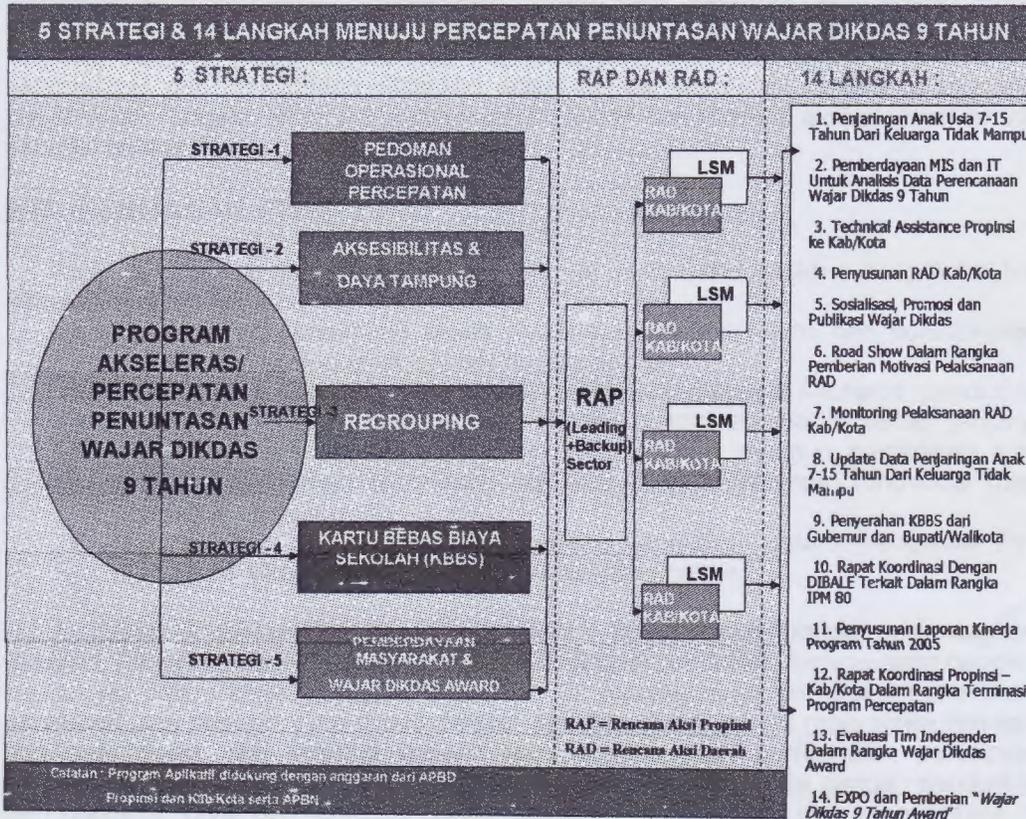
Sebagai fokus utama yang tertuang pada Renstra mengarah pada tiga *core bussines* pembangunan pendidikan dengan memperhatikan hasil analisis situasi dan kondisi sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu (Gambar 4.2). Pada *core bussines* pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, fokus utama dilakukan untuk penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar melalui kegiatan akselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar di Jawa Barat yang di disain dalam 5 Strategi dan 14 Langkah (Gambar 4.3). Pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh

pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Program *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua/ PUS) menghendaki tidak ada seorangpun warga negara.

Gambar 4.2. Tiga "Core Business" Bidang Pendidikan di Jawa Barat.



Gambar 4.3. 5 Strategi dan 14 Langkah menuju Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun



yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, penduduk desa maupun kota. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan sistem rekrutmen peserta didik harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat bagi setiap jenjang dan jalur pendidikan serta tidak mempersulit dan memberatkan masyarakat. Sedangkan dalam *core bussines* peningkatan mutu diantaranya dilakukan dengan kegiatan peningkatan kemampuan kelembagaan (*capacity building*) dan analisis bahan ajar, sedangkan untuk *core bussines* tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada *stakeholder* pendidikan. Secara lebih rinci arah kebijakan, tujuan dan rencana aksi program terurai sebagai berikut :

IVB. KEBIJAKAN STRATEGIS

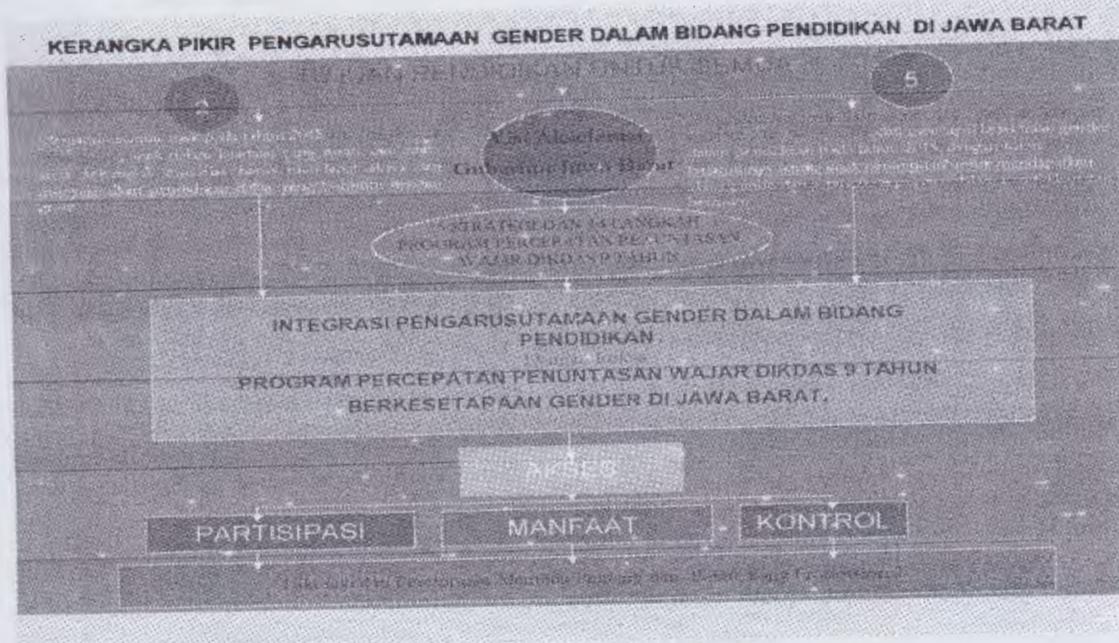
Kebijakan pembangunan bidang pendidikan di Jawa Barat tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mewujudkan persamaan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan.
- b. Menurunkan tingkat keniraksaraan penduduk dewasa terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pendidikan pada setiap jenjang pendidikan baik melalui pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk dewasa.
- c. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan yang berwawasan gender.

Dalam implementasinya, arah kebijakan ini ditempuh dengan menetapkan sasaran. Dinyatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai pendidikan berwawasan gender, khususnya dalam akses pendidikan adalah : (a) meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah yang diikuti dengan semakin seimbang rasio siswa laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dengan mempertimbangkan peningkatan partisipasi penduduk miskin, laki-laki dan perempuan sehingga menjadi setara dengan penduduk dari kelompok kaya, (b) meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk yang berusia di atas usia sekolah dalam pendidikan dasar dan menengah, (c) melakukan diversifikasi bentuk-bentuk intervensi yang bervariasi sesuai dengan variasi KKG dalam pendidikan, sehingga berbagai program yang dilaksanakan benar-benar dapat menurunkan kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah menyadari mengenai masalah kesenjangan gender di Bidang pendidikan. Berkenaan dengan Pendidikan Untuk Semua (PUS) atau *Education For All* (EVA), maka kerangka berpikir kebijakan di bidang pendidikan dalam *rencana strategisnya* (Renstra) sudah mengintegrasikan PUG dalam bidang pendidikan dengan fokus program percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun berkesetaraan gender di Jabar, melalui kesetaraan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada penduduk laki-laki maupun perempuan (Gambar 4.4).

Gambar 4.4. Kerangka Pikir Pengarusutamaan Gender Dalam Bidang Pendidikan di Jawa Barat



Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2008

- a. Kebijakan diprioritaskan pada program dan kegiatan pembangunan menginvestasikan secara langsung utk indikator RLS dan AMH.
- b. Program dan kegiatan pembangunan ditempuh melalui jalur pendidikan formal (SD, SLTP, SLTA).
- c. Program dan kegiatan pembangunan ditempuh melalui jalur pendidikan non formal.
- d. Melibatkan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan masalah pemerataan pendidikan.
- e. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan dewan pendidikan Kab/Kota, komite sekolah, dan "Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan" dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan.
- f. Menggunakan indikator proses berupa APK/APM dalam mengukur kinerja pembangunan pendidikan dalam rangka evaluasi tahunan, sementara indikator outcome digunakan pada akhir proses.
- g. Melakukan orientasi pendataan dan cara perhitungan dalam mengukur rata-rata lama sekolah di Jawa Barat dgn mengikutsertakan data tentang lama sekolah penduduk pada satu jenjang pendidikan walaupun tidak sampai tamat belajar.

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2006-2008 (yang tercantum pada Renstra Dinas Pendidikan Jawa Barat) (PUG dapat diintegrasikan pada program).

Core Business	PROGRAM	KEGIATAN	WAKTU
AKSES DAN PEMERATAAN	Program percepatan Penuntasan Wajar Diknas 9 Tahun	Kegiatan Pemberian BAGUS Kepada Anak Keluarga Tidak Mampu Usia Sekolah (dengan fokus perhatian lebih kepada Perempuan) Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan DO Siswa SD/MI dan SMP/MTs (dengan fokus perhatian lebih kepada Perempuan)	2006-2008
	Program Pemberantasan Buta Aksara	Kegiatan Keaksaraan Fungsional untuk PBA (dengan fokus perhatian lebih kepada Perempuan)	
	Program peningkatan Sarana/Prasarana Sekolah	Kegiatan Rehabilitasi dan pembangunan Sarana/Prasarana Sekolah	
MUTU DAN RELEVANSI	Program Peningkatan Kesejahteraan Guru	Kegiatan Pemberian Tunjangan Guru pada Daerah Terpencil	2006-2008
	Program Peningkatan Kompetensi dan sertifikasi Guru	Kegiatan Pelatihan Guru (dengan fokus perhatian lebih kepada Guru Perempuan pada semua jenjang sekolah) Kegiatan Sertifikasi guru (dengan fokus perhatian lebih kepada Guru Perempuan pada semua jenjang sekolah)	
	Program Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi	Kegiatan Kerjasama Pengembangan Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan	
	Program Pengembangan Sekolah Unggulan Berwawasan Global dan Teknologi Informasi	Kegiatan Pengembangan sekolah dengan KBK Kegiatan Pengembangan Sekolah Unggulan Berwawasan Global dan TI	
TATA KELOLA DAN PENCITRAAN	Program implementasi dan Intensifikasi Manajemen Berbasis sekolah	Kegiatan Intensifikasi Kinerja Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan	2006-2008
	Program peningkatan Partisipasi dan peranserta Masyarakat untuk Pendidikan	Kegiatan Gerakan Amal dan kepedulian Masyarakat untuk Pendidikan	
	Program Standarisasi Pelayanan Pendidikan	Kegiatan Standarisasi Layanan Sekolah Kepada Peserta Didik Kegiatan Standarisasi Input, proses, dan Output Sekolah	
	Program Pengelolaan Pendidikan Berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Layanan Informasi Pendidikan untuk Masyarakat Berbasis SIM dan IT	

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Makalah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Provinsi, 9 Mei 2006.
(Tulisan Biru adalah PUG yang sudah Diintegrasikan pada Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 2006-2008, berupa tambahan kalimat sebagai konsekuensi dari kesenjangan Gender yang ada pada Bab 3)

IVC. TARGET PRIORITAS PADA TAHUN 2007

Berdasarkan strategi kebijakan di atas, maka dalam rangka merespon kesenjangan gender yang ada di Jawa Barat, pada tahun 2007 target sasaran meliputi :

- d. Tercapainya penguatan kelembagaan (*capacity building*) program pengarusutamaan gender di 6 Kabupaten Prioritas, yaitu : Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sukabumi.
- e. Tersusunnya hasil analisis bahan ajar yang bias gender untuk Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal.
- f. Tersusunnya model bahan ajar yang bias gender untuk Pendidikan Formal maupun untuk Pendidikan Non Formal.
- g. Tersosialisasikannya program pengarusutamaan gender melalui berbagai bentuk kepada semua stakeholder pendidikan.
- h. Tercapainya target kuantitatif APK/APM pada semua jenjang pendidikan formal dan warga belajar pada pendidikan luar sekolah yang berkesetaraan gender.

IVD. TUJUAN

Program Pengarusutamaan Gender di Jawa Barat berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi di atas, bertujuan untuk :

- a. Mengejar keteringgalan informasi, kemampuan dan implementasi program pengarusutamaan gender untuk pendidikan, khususnya di 6 kabupaten yang meliputi Kabupaten Bogor, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon dan Sukabumi.
- b. Memperoleh hasil analisis bahan ajar yang bias gender baik di lingkup pendidikan formal, maupun pendidikan luar sekolah sebagai bahan pengambilan kebijakan pendidikan yang responsif gender di masa depan.
- c. Memperoleh model bahan ajar yang responsif gender untuk kepentingan pembelajaran baik di lingkungan pendidikan formal maupun non formal.
- d. Menyebarkan informasi dan substansi Program Pengarusutamaan Gender sekaligus memperkuat potensi dan kondisi pengarusutamaan gender sekaligus memperkuat potensi dan kondisi pengarusutamaan gender yang sudah terbentuk untuk seluruh stakeholder pendidikan di Jawa Barat.
- e. Memperoleh bahan masukan untuk kasus-kasus lokal yang berhubungan dengan gender dan berciri khusus/spesifik berdasarkan pendekatan ilmiah.
- f. Meningkatkan APM/APK siswa pada jalur pendidikan formal maupun warga belajar pada jalur PLS yang berkesetaraan gender.

Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program pengarusutamaan gender di Jawa Barat meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Secara gradual mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2008, seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah menyusun Position Paper program pengarusutamaan gender yang sejalan dengan Renstra Pendidikan pada masing-masing Kabupaten/Kota tersebut.

- b. Adanya dokumen *hasil analisis bahan ajar yang bias gender* minimal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada lingkup pendidikan formal dan bahan ajar yang digunakan untuk kepentingan Pendidikan Luar Sekolah.
- c. Adanya dokumen berupa *model bahan ajar yang responsif gender* minimal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada lingkup pendidikan formal dan bahan ajar yang digunakan untuk kepentingan Pendidikan Luar Sekolah.
- d. Adanya dokumen hasil penelitian mengenai kasus-kasus lokal dan spesifik berkenaan dengan pengarusutamaan gender di daerah/Kabupaten/Kota tertentu di Jawa Barat.
- e. Meningkatnya jumlah dan pemahaman stakeholder pendidikan tentang program pengarusutamaan gender di Jawa Barat.

IV. STRATEGI

Strategi utama yang akan dilaksanakan mencakup beberapa hal yaitu :

- a. Peningkatan kemampuan kelembagaan melalui program pendampingan di 6 Kabupaten, meliputi Kabupaten Bogor, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon dan Sukabumi.
- b. Workshop Analisis bahan ajar yang bias gender bagi para penulis, guru dan stakeholder pendidikan lainnya.
- c. Workshop penyusunan model bahan ajar responsif gender yang diikuti oleh penulis bahan ajar, guru dan stakeholder pendidikan lainnya.
- d. Penelitian kasus-kasus gender yang bersifat lokal dan spesifik bersama-sama dengan PSW.
- e. Sosialisasi untuk semua stakeholder pendidikan.

IV. PROGRAM DAN RENCANA AKSI

Program Pengarusutamaan Gender di Jawa Barat berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi di atas secara implementatif tergambar sebagai berikut :

a. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Berwawasan Gender

- (1) Meningkatkan jejaring kerja pengarusutamaan gender antar sektor di tingkat kabupaten dan provinsi.
- (2) Penyelenggaraan forum komunikasi yang memberi kesempatan bagi pelaku pendidikan untuk berbagi pengalaman dan praktik-praktik terbaiknya dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
- (3) Menjalin kerjasama dengan LSM, PSW dan organisasi perempuan/peduli pendidikan untuk memberikan fasilitas kepada keluarga/orang tua yang kurang mampu untuk memberikan hak setiap anak dalam memperoleh pendidikan.
- (4) Mengintensifkan penggunaan sistem informasi dan pendataan pendidikan terpisah jenis kelamin dan melakukan analisis terhadap data tersebut terutama untuk mengetahui kinerja dan perencanaan pendidikan yang berwawasan gender di tingkat provinsi, kabupaten/kota guna prumusan kebijakan dan program pendidikan yang berwawasan gender.
- (5) Pengembangan instrumen perencanaan pendidikan setara dan adil gender.
- (6) Pengembangan pesan-pesan standar tentang pendidikan setara dan adil gender.

- (7) Mengembangkan pusat-pusat studi wanita baru atau memperluas cakupan pusat-pusat studi yang telah ada di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan berwawasan gender di bidang pendidikan.
- (8) Meningkatkan peran pusat-pusat studi yang telah ada untuk melakukan berbagai studi masalah gender di bidang pendidikan.
- (9) Mengembangkan program studi gender dalam pembangunan pada jenjang sarjana, magister dan dokter pada perguruan tinggi yang memiliki pusat studi wanita sebagai penyedia sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan gender dalam pembangunan yang kelak dapat menjadi peneliti, pengambil kebijakan, perencana dan pelaksana program pembangunan yang berwawasan gender.
- (10) Melakukan analisis kebijakan yang masih bias gender baik peraturan perundangan, kurikulum maupun bahan ajar.
- (11) Melakukan berbagai studi mengenai praktik-praktik yang menyebabkan terjadinya pendidikan yang tidak responsif gender dan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diusulkan.
- (12) Menyempurnakan peraturan perundangan, kurikulum dan bahan ajar yang masih bias gender.
- (13) Monitoring terhadap pelaksanaan program pengarusutamaan gender di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
- (14) Evaluasi terhadap praktik-praktik yang dilaksanakan dan memberikan umpan balik untuk perbaikannya.

b. Peningkatan Penyebarluasan Pendidikan Berwawasan Gender

- (1) Mengembangkan strategi pendidikan kepada masyarakat tentang berbagai bidang teknologi, lingkungan dan informasi yang mungkin dapat diikuti kaum perempuan.
- (2) Melaksanakan program advokasi dan KIE tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga sedini mungkin.
- (3) Mensosialisasikan gender mainstreaming kepada para pelaku dan pengambil kebijakan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Membangun komitmen para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang responsif gender.
- (5) Mewujudkan adanya website dan jaringan internet bidang pendidikan di setiap dinas dan sub dinas pendidikan dengan data yang akurat dan terkini.
- (6) Meningkatkan peran media untuk pendidikan sebagai alat bagi para pendidik, pemerintah, maupun LSM untuk memajukan perempuan dan pembangunan untuk dapat meningkatkan motivasi belajar.

c. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender

- (1) Merumuskan model uji pendidikan keluarga berwawasan gender bagi keluarga miskin.
- (2) Melakukan pemetaan dan pemutakhiran data keluarga miskin.

- (3) Melakukan uji coba pendidikan keluarga berwawasan gender bagi keluarga miskin di beberapa daerah perkotaan dan pedesaan terpilih.
- (4) Mengevaluasi dan menyempurnakan konsep uji coba pendidikan keluarga berwawasan gender.
- (5) Melaksanakan pendidikan keluarga berwawasan gender bagi keluarga miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan.

IVG. RENCANA AKSI

Sehubungan dengan program pengarusutamaan gender sebagaimana tertuang di atas dan dengan melihat hasil dari analisa internal dan eksternal kondisi pendidikan di Jawa Barat tahun 2005-2006, maka rencana aksi yang harus mendapat perhatian bersama dan menjadi prioritas dalam kegiatan penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- i. Peningkatan Kemampuan Kelembagaan (*Capacity Building*) untuk 6 Kabupaten yang berdasarkan hasil analisis masih memerlukan bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan program. Ke enam Kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sukabumi.
- j. Penyusunan bahan ajar yang tidak bias gender, berupa :
 - (1) Analisis Bahan Ajar SD/MI, SMP/MTs, SMA, MA, SMK dan Bahan Ajar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang bias gender.
 - (2) Penyusunan Model Bahan Ajar yang tidak bias gender/responsif gender.
- k. Penelitian kasus-kasus lokal berkenaan dengan masalah gender khususnya yang menyangkut anak jalanan, perkawinan di bawah umur, tingkat perceraian yang tinggi, tenaga kerja dll, bersama-sama dengan Pusat Studi Wanita Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Barat.
- l. Pembuatan Banner, Spanduk, Poster, Leaflet, Stiker dll dalam rangka kampanye Pengarusutamaan Gender.
- m. Sosialisasi pengarusutamaan gender dengan Stakeholder Pendidikan.

Namun demikian, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan PUG di bidang Pendidikan, yaitu; (1) Belum terwujud komitmen yang tinggi dalam PUG Pendidikan diantara para pengambil kebijakan baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, (2) PUG diidentikkan dengan perempuan saja dan eksklusif merupakan tanggung jawab program PLS saja, dan (3) masih adanya iklim dan budaya organisasi yang tidak responsif gender. Jadi sebagai akhir dari bab ini sekali lagi dijelaskan, bahwa secara umum rencana aksi yang disusun adalah untuk merespon masalah kesenjangan gender yang terjadi di Jawa Barat yang intinya masih belum ada kesetaraan dalam akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, serta tata kelola dan pencitraan. Untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender tersebut, maka propinsi Jawa Barat dengan keterbatasan dana yang ada berusaha untuk melakukan prioritas strategi kebijakan dengan merencanakan tiga arah kebijakan yang meliputi: (a) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Berwawasan Gender, (b) Peningkatan Penyebarluasan Pendidikan Berwawasan Gender, dan (c) Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender. Secara detil, Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007 disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007

No.	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Indikator keberhasilan
1	2	3	4	5	6
A	<p>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Berwawasan Gender</p> <p>Dalam rangka Memperluas dan meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender (KKG)</p>	<p>Peningkatan Kemampuan Kelembagaan (<i>Capacity Building</i>) untuk 6 Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program dilakukan berdasarkan hasil analisis gender yang masih memerlukan bimbingan teknis, sosialisasi dan pendampingan program. • Ke enam Kabupaten tersebut meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Bogor • Kabupaten Karawang • Kabupaten Subang • Kabupaten Indramayu • Kabupaten Cirebon, dan • Kabupaten Sukabumi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengejar ketertinggalan informasi, kemampuan dan implementasi program pengarusutamaan gender untuk pendidikan, khususnya di 6 kabupaten • Untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah yang merata dengan memperhatikan kesetaraan gender 	<p>6 Dinas Kabupaten/ Kota yang terpilih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Bogor • Kabupaten Karawang • Kabupaten Subang • Kabupaten Indramayu • Kabupaten Cirebon, dan • Kabupaten Sukabumi 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara gradual mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2008, seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Barat telah menyusun Position Paper Program PUG yang sejalan dengan Renstra Pendidikan pada masing-masing Kabupaten/Kota tersebut. • 12 Kab/Kota pada tahun 2006 • Dipantau khusus 6 Kab/Kota • Dimonitor sisa 6 Kab/Kota

B	<p>Peningkatan Penyebarluasan Pendidikan Berwawasan Gender</p> <p>Dalam rangka Mempertuas dan meningkatkan mutu dan relevansi serta akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender (KKG)</p>	<p>1. Penyusunan bahan ajar yang tidak bias gender, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Bahan Ajar SD/MI, SMP/MTs, SMA, MA, SMK dan Bahan Ajar Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang bias gender. • Penyusunan Model Bahan Ajar yang tidak bias gender/responsif gender. <p>2. Pembuatan Banner, Spanduk, Poster, Leaflet, Stiker dll dalam rangka kampanye Pengarusutamaan Gender.</p> <p>3. Sosialisasi pengarusutamaan gender dengan Stakeholder Pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh hasil analisis bahan ajar yang bias gender baik di lingkup pendidikan formal, maupun pendidikan luar sekolah sebagai bahan pengambilan kebijakan pendidikan yang responsif gender di masa depan. • Memperoleh model bahan ajar yang responsif gender untuk kepentingan pembelajaran baik di lingkungan pendidikan formal maupun non formal. • Menyebarluaskan informasi dan substansi Program Pengarusutamaan Gender sekaligus memperkuat potensi dan kondisi pengarusutamaan gender sekaligus memperkuat potensi dan kondisi pengarusutamaan gender yang sudah terbentuk untuk seluruh stakeholder pendidikan di Jawa Barat. 	<p>Pendidik pada berbagai jenjang sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SM/MA)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen <i>hasil analisis bahan ajar yang bias gender</i> minimal masing-masing satu untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada lingkup pendidikan formal dan bahan ajar yang digunakan untuk kepentingan Pendidikan Luar Sekolah. • Adanya dokumen berupa <i>model bahan ajar yang responsif gender</i> minimal masing-masing satu untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada lingkup pendidikan formal dan bahan ajar yang digunakan untuk kepentingan Pendidikan Luar Sekolah. • Meningkatnya jumlah dan pemahaman stakeholder pendidikan tentang
---	--	---	--	---	---

					program pengarusutamaan gender di Jawa Barat. (Pre test-Post test)
C	<p>Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender</p> <p>Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan tidak bias gender dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender (KKG)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kasus-kasus lokal berkenaan dengan masalah kesenjangan gender khususnya yang menyangkut anak jalanan, perkawinan di bawah umur, tingkat perceraian yang tinggi, tenaga kerja dll, bersama-sama dengan Pusat Studi Wanita Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Barat. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh bahan masukan untuk kasus-kasus lokal yang berhubungan dengan gender dan berciri khusus/spesifik berdasarkan pendekatan ilmiah. • Terinventarisnya data-data kualitatif berkenaan dengan norma dan budaya yang mendukung maupun menghambat masuknya anak laki-laki dan perempuan ke sekolah. • Analisis gender secara kuantitatif dan kualitatif berhubungan dengan kesenjangan gender yang terjadi di tingkat keluarga. 	<p>Siswa SD/MI, SMP/MTs, SM/MA Di 6 kabupaten/Kota terpilih</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Bogor • Kabupaten Karawang • Kabupaten Subang • Kabupaten Indramayu • Kabupaten Cirebon, dan • Kabupaten Sukabumi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dokumen hasil penelitian mengenai kasus-kasus lokal dan spesifik berkenaan dengan pengarusutamaan gender di daerah/Kabupaten/Kota tertentu di Jawa Barat. • Terinventarisnya norma dan budaya yang menyebabkan kesenjangan gender • Terinventarisnya data kuantitatif dan kualitatif • Analisis Gender di tingkat keluarga

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana telah dikemukakan, Pemerintah Jawa Barat, baik itu Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat maupun Forum Koordinasi Pendidikan Untuk Semua telah menetapkan kebijakan tentang Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Bidang pendidikan. Secara konseptual telah diformulasikan beberapa kebijakan, program, tujuan dan sasaran serta target atau hasil yang diharapkan pembangunan bidang pendidikan yang responsif gender. Untuk itu Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat telah secara eksplisit merumuskan kebijakan yang berfokus pada "*Program Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun Berkesetaraan Gender di Jawa Barat*" dengan strategi percepatan yang juga responsif gender.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan di bidang pendidikan baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/ kota. Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Perencanaan Pembangunan Nasional (KPN) - 2002. *Pendidikan dan Sumber Daya Manusia: Panduan Pembangunan Pengarusutamaan Gender*. Kementerian Pembangunan Percepatan RI-BIKON-UNFPA.

Moser, C and Levy, C. 1999. *Training Materials Developed for Training in Gender Planning in Development*. In Caroline O.H. Moser *Gender and Development: Gender Planning and Development, Theory, Practice and Training*. Routledge, London.

Quachik, David and Anand, 1995. *Gender Roles in Development Projects*. Kumarian Press, Connecticut.

Periniwati, W. 2006. *Pengaruh Faktor keluarga, Lingkungan Teman dan Sekolah Terhadap Minat dan Persepsi di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Bogor*. Disertasi S1, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Badan Otonomi Daerah Prov. Jawa Barat, 2010.

Sub-Dinas PLS-Dinas Pendidikan Tahun 2005.

The Odiam, 1994. *The Odiam Gender Training Manual*. Odiam United Kingdom and World.

BAB VI. DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). 2004. Pesan Standar: Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.
- Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. 2005. Profil Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2005. Pemerintah Propinsi Jawa Barat: Dinas Pendidikan.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2005. SUSEDA (Survei Sosial Ekonomi Daerah).
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2005. Profil Pendidikan Jawa Barat Tahun 2005.
- International Labour Organization (ILO). 1997. Apa itu Gender: Buku Panduan Untuk Buruh. Jakarta: ILO.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP). 2005. Panduan dan Bunga Rampai: Panduan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI-BKKBN-UNFPA.
- Moser, C and Levy, C. 1993. Training Materials Developed for Training in Gender Planning for Development. In Caroline O.N. Moser Gender and Development: Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. Routledge. London.
- Overholt, Cloud and Austin. 1985. Gender Roles in Development Projects. Kumarian Press, Connecticut.
- Puspitawati, H. 2006. Pengaruh Faktor keluarga, Lingkungan Teman dan Sekolah Terhadap kenakalan Pelajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Bogor. Disertasi S3. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Subdis Dikmenti Disdik Prov. Jawa Barat, 2006.
- Sub-Dinas PLS-Dinas Pendidikan Tahun 2005.
- The Oxfam. 1994. The Oxfam Gender Training Manual. Oxfam United Kingdom and Ireland.

Lampiran 1a - Checklist Kelayakan Manawi

Kelayakan di atas juga bisa diringkas dalam daftar pengecekan (checklist) yang terdiri dari pernyataan-pernyataan yang perlu dijawabkan pada setiap unsur aspek proyek, identifikasi, anggaran, jadwal, pelaksanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

DAFTAR PENGECEKAN 1: Domain Perencanaan dalam Kelayakan Proyek

Mengetahui kebutuhan-kebutuhan perencanaan

- Kebutuhan-kebutuhan dan ketersediaan-ketersediaan apa untuk meningkatkan produktivitas dan/atau produktivitas perencanaan?
- Kebutuhan-kebutuhan dan ketersediaan-ketersediaan apa untuk meningkatkan akses dan kontrol perencanaan atas sumber daya?
- Kebutuhan-kebutuhan dan ketersediaan-ketersediaan apa untuk meningkatkan akses dan kontrol perencanaan atas manfaat?
- Bagaimana hubungan-kebutuhan dan ketersediaan-ketersediaan ini berhubungan dengan kemampuan-kemampuan dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan pemerintah lainnya di tingkat nasional dan internasional?
- Apakah perencanaan lebih berwujud secara langsung dalam meningkatkan kebutuhan-kebutuhan dan ketersediaan-ketersediaan sendiri itu?

Menentukan tujuan-tujuan utama proyek

- Apakah tujuan-tujuan utama proyek ini sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perencanaan pemerintah?
- Apakah tujuan-tujuan utama proyek ini sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perencanaan?
- Apakah perencanaan lebih baik jika ada di dalam masyarakat-kelompok itu?
- Apakah tujuan-tujuan utama ini sudah-sudah seakuratnya?
- Bagaimana proposal yang ada saat ini memberikan kegiatan-kegiatan sebelumnya?

Menentukan anggaran-anggaran realistik yang mungkin

- Apakah anggaran proyek ini ringkas atau terlalu berlebihan terhadap sumber daya dan manfaat?
- Apakah anggaran proyek ini realistis pemerintah yang menugaskan kegiatan perencanaan dalam keberadaannya?
- Apakah pengembangannya termasuk pemerintah dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang?

DAFTAR PENGECEKAN 2: Domain Pelaksanaan dalam Domain Proyek

Menilai dampak proyek pada kegiatan-kegiatan perencanaan

- Bagaimana nilai kegiatan-kegiatan ini (produksi, reproduksi dan perawatan) secara politik pemerintahan proyek?
- Apakah kegiatan yang direncanakan untuk kegiatan ini sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang?
- Jika direncanakan untuk mengubah kemampuan-kemampuan dan kegiatan ini, apakah nilai kegiatan, cara yang direncanakan, termasuk cara kegiatan politik ini ini (jika) dan apa pengaruh positif dan negatifnya pada perencanaan?

LAMPIRAN

Lampiran 1a. Checklist Kerangka Harvard

Kerangka di atas juga berisi serangkaian daftar pengecekan (*checklist*) yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan penting untuk dikemukakan pada setiap tahap siklus proyek : identifikasi, rancangan (desain), pelaksanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

DAFTAR PENGECEKAN 1: Dimensi perempuan dalam Identifikasi Proyek

Menilai kebutuhan-kebutuhan perempuan:

- (a) Kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan apa untuk meningkatkan produktifitas dan/atau produksi perempuan?
- (b) Kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan apa untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan atas sumber daya?
- (c) Kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan apa untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan atas manfaat?
- (d) Bagaimana kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan ini berhubungan dengan kesempatan-kesempatan dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan pemerintah lainnya di tingkat sektoral dan umum?.
- (e) Apakah perempuan telah berunding secara langsung dalam menentukan Kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan seperti itu ?

Menentukan tujuan-tujuan umum proyek:

- (a) Apakah tujuan-tujuan proyek secara eksplisit berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan perempuan?
- (b) Apakah tujuan-tujuan ini cukup mencerminkan kebutuhan-kebutuhan perempuan?
- (c) Apakah perempuan telah ikut serta di dalam menentukan tujuan-tujuan itu ?
- (d) Apakah sudah ada usaha-usaha sebelumnya?
- (e) Bagaimana proposal yang ada saat ini membangun kegiatan-kegiatan sebelumnya?

Menentukan pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin:

- (a) Apakah mungkin proyek mengurangi akses atau kontrol perempuan terhadap sumber daya dan manfaat ?
- (b) Apakah mungkin proyek memiliki pengaruh yang merugikan keadaan perempuan dalam beberapa hal ?
- (c) Apa pengaruhnya terhadap perempuan dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang ?

DAFTAR PENGECEKAN 2: Dimensi Perempuan dalam Desain Proyek

Menilai dampak proyek pada kegiatan-kegiatan perempuan:

- (a) Bagian mana dari kegiatan-kegiatan ini (produksi, reproduksi dan perawatan sosial politik) mempengaruhi proyek?
- (b) Apakah komponen yang direncanakan untuk kegiatan sesuai dengan denominasi gender saat sekarang ?
- (c) Jika direncanakan untuk mengubah kinerja perempuan dari kegiatan itu, seperti pusat kegiatan, cara yang menguntungkan, teknologi, cara kegiatan apakah ini mungkin, dan apa pengaruh positif dan negatifnya pada perempuan ?

- (d) Jika perempuan tidak berubah, apakah ini merupakan kesempatan yang hilang bagi peran perempuan di dalam proses pembangunan?
- (e) Bagaimana desain proyek dapat disesuaikan untuk meningkatkan pengaruh-pengaruh positif seperti disebut di atas ?

Menilai dampak proyek terhadap akses dan kontrol perempuan:

- (a) Bagaimana tiap-tiap komponen proyek akan mempengaruhi akses dan kontrol perempuan atas sumber daya dan berbagai manfaat yang dilibatkan di dalamnya dan yang berasal dari produksi barang-barang dan jasa ?
- (b) Bagaimana tiap-tiap komponen proyek akan mempengaruhi akses dan kontrol perempuan atas sumberdaya dan berbagai manfaat yang dilibatkan di dalamnya dan yang berasal dari reproduksi dan perawatan (pemeliharaan) sumberdaya manusia ?
- (c) Bagaimana tiap-tiap komponen proyek akan mempengaruhi akses dan kontrol perempuan atas sumberdaya dan berbagai manfaat yang dilibatkan di dalamnya dan yang berasal dari fungsi-fungsi sosial politik ?
- (d) Kekuatan-kekuatan apa yang telah digerakkan untuk melakukan eksplorasi selanjutnya terhadap ketidakleluasaan dan perbaikan-perbaikan yang mungkin ?
- (e) Bagaimana desain proyek dapat disesuaikan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan atas sumberdaya dan berbagai manfaat ?

DAFTAR PENGECEKAN 3: Dimensi Perempuan dalam Pelaksanaan Proyek

Menilai Personil:

- (a) Apakah personil proyek sadar akan dan simpati terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan ?
- (b) Apakah perempuan dipakai untuk menyampaikan barang dan jasa kepada para ahli waris perempuan ?
- (c) Apakah personil memiliki ketrampilan-ketrampilan penting untuk memberikan masukan-masukan khusus yang diperlukan oleh perempuan ?
- (d) Teknik-teknik pelatihan apa yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem penyampaian ?
- (e) Apakah ada kesempatan-kesempatan yang cocok bagi perempuan untuk berperan serta di dalam kedudukan-kedudukan manajemen proyek ?

Menilai Struktur Organisasi:

- (a) Apakah bentuk organisasi meningkatkan akses perempuan ke sumberdaya ?
- (b) Apakah organisasi mempunyai kekuasaan yang memadai untuk mendapatkan sumberdaya yang diperlukan oleh perempuan dari organisasi-organisasi lainnya ?
- (c) Apakah organisasi memiliki kemampuan kelembagaan untuk mendukung dan melindungi perempuan selama proses perubahan ?

Menilai Operasi dan Logistik:

- (a) Apakah saluran penyampaian organisasi dapat diakses ke perempuan berkenaan dengan personil, tempat dan pengaturan waktu?
- (b) Apakah prosedur pengontrolan ada untuk memastikan pengiriman barang dan jasa yang dapat dipercaya ?
- (c) Apakah ada mekanisme untuk memastikan bahwa sumberdaya-sumberdaya proyek atau berbagai manfaat tidak direbut (dikuasai) oleh laki-laki ?

Menilai Keuangan:

- (b) Apakah mekanisme pembiayaan ada untuk memastikan kelanjutan program ?
- (c) Apakah tingkat pembiayaan cukup untuk tugas-tugas yang diusulkan?
- (d) Apakah akses istimewa ke sumberdaya melalui laki-laki dihindari ?
- (e) Apakah mungkin untuk mencari dana bagi perempuan dari alokasi ke pengiriman dengan penanganan ketetapan yang adil

Menilai Keluwesan:

- (b) Apakah proyek memiliki sistem informasi manajemen yang akan mengijinkan proyek untuk mengetahui pengaruh-pengaruh operasi pada perempuan?
- (c) Apakah organisasi memiliki keluwesan yang cukup untuk menyesuaikan struktur dan operasinya guna memenuhi pekerjaan-pekerjaan perempuan yang baru didapatkan atau sedang berubah ?

DAFTAR PENGECEKAN 4: Dimensi Perempuan dalam Evaluasi Proyek

Persyaratan Data:

- (f) Apakah system pemantauan dan evaluasi proyek secara tegas mengukur pengaruh-pengaruh proyek pada perempuan ?
- (g) Apakah sistem tersebut juga mengumpulkan data untuk memperbaiki Analisis Kegiatan dan Analisis Akses dan Kontrol perempuan?
- (h) Apakah perempuan terlibat di dalam merancang/mendesain persyaratan data ?

Pengumpulan dan Analisis Data:

- (b) Apakah data dikumpulkan dengan frekuensi yang cukup sehingga penyesuaian-penyesuaian proyek yang penting dapat dilakukan selama proyek berlangsung ?
- (c) Apakah data diumpun-balikkan ke personil proyek dan para ahli waris dalam suatu bentuk yang dapat dimengerti dan pada suatu dasar yang tepat waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian proyek ?
- (d) Apakah perempuan terlibat di dalam pengumpulan dan interpretasi data?
- (e) Apakah data dianalisa untuk memberikan bimbingan (*guidance*) bagi desain proyek-proyek yang lain ?
- (f) Apakah daerah-daerah penting untuk penelitian WD ditentukan ?

Penggunaan Kerangka Analisis Harvard:

- (b) Paling cocok untuk perencanaan proyek, dari pada perencanaan program atau kebijakan.
- (c) Sebagai suatu titik masuk (*entry poin*) jender yang netral pada saat mengemukakan permasalahan-permasalahan jender dengan unsur-unsur yang melawan terhadap pertimbangan hubungan jender dan dinamika kekuasaan.
- (d) Untuk dasar pengumpulan data
- (e) Bersama dengan kerangka Moser, untuk memasukkan ide kebutuhan-kebutuhan strategis jender.

Kekuatan Kerangka Harvard:

- (b) Praktis dan siap pakai
- (c) Begitu data terkumpulkan, maka akan memberikan gambar yang jelas tentang siapa mengerjakan apa, kapan dan dengan sumberdaya apa, ia membuat pekerjaan dan peran wanita menjadi kelihatan.

- (d) Analisis Harvard membedakan antara akses menuju dan kontrol atas sumberdaya.
- (e) Analisis Harvard dengan mudah dapat disesuaikan dengan berbagai lingkungan dan keadaan
- (f) Analisis Harvard relatif tidak mengancam, karena ia hanya mempercayakan pada "fakta"

(Disadur dari Training Workshop for Trainers in Women, Gender and Development, June 9-21, 1996, Programme Handbook, Royal Tropical Institute, The Netherlands)

Kebutuhan dari Rancangan Pendidikan Masyarakat

- (1) Menyediakan sarana-sarana untuk menaruh perhatian kepada berbagai peranan perempuan.
- (2) Mengakui masyarakat sebagai kelompok sumberdaya yang penting bagi pembangunan nasional.
- (3) Menawarkan analisis kebutuhan-kebutuhan gender sebagai dasar praktis dan sebagai mendasarkan analisis di perencanaan pembangunan pada tingkat yang lebih rendah.
- (4) Mengakui bahwa berbagai kemampuan gender mempengaruhi lembaga dan kebijakan yang dihasilkan mereka.
- (5) Menyatakan pentingnya melibatkan perempuan dan organisasi-organisasi kesetaraan gender dalam proses perencanaan.

Kebijakan-kebijakan Nasional

- (1) Kebutuhannya masih terkonsentrasi pada apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu dan perempuan, bukan pada bagaimana membangun kemampuan masyarakat di daerah-daerah di luar kota-kota.
- (2) Fokusnya pada rumah tangga yang penghidupannya rendah sebagai kelompok target bagi intervensi pembangunan.
- (3) Tidak menawarkan analisis hubungan gender di lembaga-lembaga pembangunan.
- (4) Hanya mengemukakan sedikit hal-hal berkaitan dengan proses perencanaan dapat dibuat lebih bermanfaat partisipatif, atau bagaimana waktu proses dapat digunakan lebih dimaknai.
- (5) Mengakui pada perencanaan internasional.

Lampiran 1b. Keterangan Lebih Lanjut Analisis Gender Moser

Penggunaan Kerangka Pemikiran Perencanaan Jender dari Moser

- (1) Fokus adalah pada intervensi tingkat proyek, namun juga melihat ke intervensi-intervensi tingkat sektoral.
- (2) Penekanan adalah pada pembagian gender dalam pekerjaan di rumah tangga.
- (3) Disusun sebagai kerangka pemikiran perencanaan, bukan hanya kerangka pemikiran analisis.
- (4) Telah dipergunakan oleh African Technical Department dari World Bank, christian Aid, Oxfam UK, International Labour Organisation, UNIFEM, Food and Agriculture Organisation, dan Save the Children, di Amerika.
- (5) Dipergunakan di Buku Petunjuk Pelatihan Gender Oxfam

Kekuatan dari Kerangka Pemikiran Moser

- (1) Menyediakan skema sederhana untuk menarik perhatian kepada berbagai peranan perempuan.
- (2) Mengakui masyarakat sebagai tempat sumberdaya yang penting bagi keselamatan reproduksi.
- (3) Membedakan antara kebutuhan-kebutuhan gender strategis dan praktis, dan sehingga memasukkan analisis of penempatan perempuan pada tempat yang lebih rendah.
- (4) Mengakui bahwa hubungan kekuasaan gender mempengaruhi lembaga dan kebijakan yang dihasilkan mereka.
- (5) Menyatakan pentingnya melibatkan perempuan dan organisasi-organisasi kesadaran gender dalam proses perencanaan.

Batasan-batasan Potensi

- (1) Fokusnya masih terutama pada apa yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan, bukan pada bagaimana hubungan kekuasaan beroperasi di dalam dan di luar rumah tangga.
- (2) Fokusnya pada rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai Kelompok target bagi intervensi pembangunan.
- (3) Tidak menawarkan analisa hubungan gender di lembaga-lembaga pembangunan.
- (4) Hanya mengatakan sedikit tentang bagaimana proses perencanaan dapat dibuat lebih bersifat partisipasi, atau bagaimana suatu proses debat negosiasi bisa dimulai.
- (5) Ditujukan pada perencanaan profesional

Lampiran 2. Komposisi Penduduk yang Sedang Bersekolah Menurut Selang Usia dan Kabupaten/ Kota di Jawa Barat Tahun 2005

No	Kota/Kab	7-12 th		13-15 th		16-18 th	
		L	P	L	P	L	P
1	Kab. Bogor	287,233	285,268	90,910	94,714	46,144	31,374
2	Kab. Sukabumi	149,311	141,874	54,175	48,069	34,188	21,804
3	Kab. Cianjur	164,520	153,656	51,092	35,756	11,124	12,780
4	Kab. Bandung	237,044	264,624	85,594	87,254	55,474	31,674
5	Kab. Garut	167,995	160,600	60,170	51,655	23,785	11,060
6	Kab. Tasikmalaya	116,424	94,641	32,514	31,194	17,823	9,523
7	Kab. Ciamis	85,803	82,654	37,860	31,550	15,516	11,066
8	Kab. Kuningan	61,952	75,137	20,977	23,116	10,497	17,163
9	Kab. Cirebon	143,151	139,641	48,791	29,404	35,464	33,585
10	Kab. Majalengka	66,940	67,858	20,100	24,148	9,372	6,720
11	Kab. Sumedang	59,021	64,005	34,191	25,005	15,015	11,658
12	Kab. Indramayu	109,344	103,914	34,740	44,682	12,450	16,740
13	Kab. Subang	70,899	85,293	25,900	25,900	21,940	11,771
14	Kab. Purwakarta	49,484	48,401	18,399	17,830	11,748	8,193
15	Kab. Karawang	134,081	99,461	52,267	43,853	29,503	26,132
16	Kab. Bekasi	146,058	125,202	55,880	51,282	34,210	25,278
17	Kota Bogor	53,768	46,530	20,163	23,265	10,857	10,340
18	Kota Sukabumi	17,004	17,658	6,540	6,758	7,194	5,668
19	Kota Bandung	128,803	121,126	65,681	49,474	50,327	31,561
20	Kota Cirebon	14,980	19,260	7,490	5,778	5,564	6,206
21	Kota Bekasi	141,050	129,766	46,748	55,614	46,748	38,688
22	Kota Depok	81,760	69,350	24,820	25,550	31,390	22,630
23	Kota Cimahi	26,322	26,001	12,519	9,309	8,346	10,272
24	Kota Tasikmalaya	33,996	43,354	15,178	14,378	11,554	10,550
25	Kota Banjar	9,872	9,812	4,212	4,656	1,982	1,986
	Jawa Barat	2,556,795	2,475,086	926,911	860,194	558,215	424,422

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat, 2005, Hal.138-139; 141-142; 144-145; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat)

Lampiran 3. Rekapitulasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Kelompok Usia 7-12; 13-15; 16-18; 19-24 Tahun Menurut Kabupaten/ Kota

KAB/ KOTA	APS 7-12 TAHUN			APS 13-15 TAHUN			APS 16-18 TAHUN			APS 19-24 TAHUN		
	L	P	DISP	L	P	DISP	L	P	DISP	L	P	DISP
Kab. Bogor	94.33	94.68	0.35	67.69	68.03	0.34	33.72	29.18	-4.54	6.15	2.1	-4.05
Kab. Sukabumi	93.00	95.66	2.66	69.64	65.4	-4.24	49.4	39.76	-9.64	7.1	3.1	-4
Kab. Cianjur	97.82	95.71	-2.11	61.27	61.34	0.07	17.04	22.53	5.49	2.04	1.6	-0.44
Kab. Bandung	95.61	96.56	0.95	80.58	76.1	-4.48	48.65	35.84	-12.81	9.79	6.13	-3.66
Kab. Garut	93.82	96.22	2.40	74.12	72.64	-1.48	41.67	25.19	-16.48	3.8	1.31	-2.49
Kab. Tasikmalaya	97.16	94.01	-3.15	71.68	72.85	1.17	33.05	21.71	-11.34	7.89	4.7	-3.19
Kab. Ciamis	94.64	96.56	1.92	83.85	84.37	0.52	44.31	35.07	-9.24	14	7.08	-6.92
Kab. Kuningan	97.37	97.23	-0.14	83	76.43	-6.57	45.87	61.53	15.66	10.4	3.6	-6.8
Kab. Cirebon	99.13	95.91	-3.22	71.68	64.65	-7.03	48.06	52.76	4.7	5.27	0.38	-4.89
Kab. Majalengka	99.00	98.04	-0.96	69.56	85.64	16.08	32.5	26.27	-6.23	3	2.91	-0.09
Kab. Sumedang	98.04	98.94	0.90	90.87	90.81	-0.06	65.67	45.31	-20.36	10.71	8.77	-1.94
Kab. Indramayu	97.48	94.21	-3.27	67.47	76.66	9.19	21.59	48.34	26.75	4.97	4.88	-0.09
Kab. Subang	99.19	97.35	-1.84	88.6	82.52	-6.08	47.99	47.22	-0.77	6.25	6.29	0.04
Kab. Purwakarta	96.48	94.18	-2.30	65.74	82.77	17.03	57.13	43.66	-13.47	6.05	1.68	-4.37
Kab. Karawang	96.95	95.16	-1.79	73.82	85.24	11.42	45.46	46.27	0.81	13.49	5.09	-8.4
Kab. Bekasi	95.99	98.65	2.66	92.73	89.38	-3.35	52.57	45.06	-7.51	10.75	5.11	-5.64
Kota Bogor	97.20	98.9	1.70	88.64	81.82	-6.82	45.65	41.67	-3.98	21.36	12	-9.36
Kota Sukabumi	98.73	98.78	0.05	83.33	96.88	13.55	71.74	65	-6.74	17.95	11.86	-6.09

Lampiran 3 (Lanjutan).

Kota Bandung	98.05	97.26	-0.79	93.9	92.06	-1.84	73.75	57.81	-15.94	27.04	26.44	-0.6
Kota Cirebon	95.89	93.73	-2.16	89.74	79.41	-10.33	61.9	67.44	5.54	7.79	12.79	5
Kota Bekasi	99.43	98.77	-0.66	100	93.24	-6.76	78.38	69.57	-8.81	25	9.58	-15.42
Kota Depok	96.55	95.96	-0.59	79.07	89.74	10.67	72.88	56.36	-16.52	23.53	20	-3.53
Kota Cimahi	98.80	98.78	-0.02	97.5	100	2.5	70.27	69.57	-0.7	22.83	12.93	-9.9
Kota Tasikmalaya	97.13	95.57	-1.56	86.27	91.06	4.79	72.17	69.51	-2.66	21.17	8.17	-13
Kota Banjar	95.14	95.11	-0.03	79.77	92.53	12.76	39.86	47.4	7.54	10.56	1.91	.
JAWA BARAT	96.48	96.29	-0.19	77.52	77.97	0.45	47.29	42.97	-4.32	11.15	6.97	-4.18

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat. 2005, Hal. 81-82 & 138-148)

Lampiran 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/ Kota
(Sumber: SUSEDA Jawa Barat. 2005, Hal. 81-82 & 138-139)

No	Kota/Kab	Jumlah pendd. 7-12 th		7-12 th Sdg sekolah		APS (7 - 12)		IP	D APS1 (%)
		L	P	L	P	L (%)	P (%)		
1	Kab. Bogor	304.497	301.285	287.233	285.268	94,33	94,68	1,00	0,35
2	Kab. Sukabumi	160.542	148.315	149.311	141.874	93,00	95,66	1,03	2,65
3	Kab. Cianjur	168.180	160.540	164.520	153.656	97,82	95,71	0,98	-2,11
4	Kab. Bandung	247.920	274.052	237.044	264.624	95,61	96,56	1,01	0,95
5	Kab. Garut	179.055	166.905	167.995	160.600	93,82	96,22	1,03	2,40
6	Kab. Tasikmalaya	119.832	100.674	116.424	94.641	97,16	94,01	0,97	-3,15
7	Kab. Ciamis	90.665	85.603	85.803	82.654	94,64	96,56	1,02	1,92
8	Kab. Kuningan	63.627	77.276	61.952	75.137	97,37	97,23	1,00	-0,14
9	Kab. Cirebon	144.407	145.589	143.151	139.641	99,13	95,91	0,97	-3,22
10	Kab. Majalengka	67.618	69.214	66.940	67.858	99,00	98,04	0,99	-0,96
11	Kab. Sumedang	60.198	64.692	59.021	64.005	98,04	98,94	1,01	0,89
12	Kab. Indramayu	112.170	110.298	109.344	103.914	97,48	94,21	0,97	-3,27
13	Kab. Subang	71.478	87.619	70.899	85.293	99,19	97,35	0,98	-1,84
14	Kab. Purwakarta	51.289	51.391	49.484	48.401	96,48	94,18	0,98	-2,30
15	Kab. Karawang	138.274	104.516	134.061	99.461	96,95	95,16	0,98	-1,79
16	Kab. Bekasi	152.152	126.918	146.058	125.202	95,99	98,65	1,03	2,65
17	Kota Bogor	55.319	47.047	53.768	46.530	97,20	98,90	1,02	1,70
18	Kota Sukabumi	17.222	17.876	17.004	17.658	98,73	98,78	1,00	0,05
19	Kota Bandung	131.362	124.538	128.803	121.126	98,05	97,26	0,99	-0,79
20	Kota Cirebon	15.622	20.544	14.980	19.260	95,89	93,75	0,98	-2,14
21	Kota Bekasi	141.856	131.378	141.050	129.766	99,43	98,77	0,99	-0,66
22	Kota Depok	84.680	72.270	81.760	69.350	96,55	95,96	0,99	-0,59
23	Kota Cimahi	26.643	26.322	26.322	26.001	98,80	98,78	1,00	-0,01
24	Kota Tasikmalaya	35.000	45.362	33.996	43.354	97,13	95,57	0,98	-1,56
25	Kota Banjar	10.376	10.316	9.872	9.812	95,14	95,11	1,00	-0,03
	Jawa Barat	2.649.984	2.570.540	2.556.795	2.475.086	96,48	96,29	1,00	-0,20

IP= Indeks Paritas (Rasio Kinerja P/ Kinerja L)

D= Disparitas (Kinerja P – Kinerja L); Tanda + berarti Kinerja P > Kinerja L; Tanda – berarti Kinerja L > Kinerja P

Lampiran 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13 - 15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota
(Sumber: SUSEDA Jawa Barat. 2005, Hal. 81-82 & 141-142)

No	Kota/Kab	Jumlah pendd. 13-15 th		13-15 th Sdg sekolah		APS (13 - 15)		IP	D APS1 (%)
		L	P	L	P	L (%)	P (%)		
1	Kab. Bogor	134.298	139.218	90.910	94.714	67,69	68,03	1,01	0,34
2	Kab. Sukabumi	77.793	73.504	54.175	48.069	69,64	65,40	0,94	-4,24
3	Kab. Cianjur	83.392	58.296	51.092	35.756	61,27	61,34	1,00	0,07
4	Kab. Bandung	106.216	114.656	85.594	87.254	80,58	76,10	0,94	-4,48
5	Kab. Garut	81.180	71.115	60.170	51.655	74,12	72,64	0,98	-1,48
6	Kab. Tasikmalaya	45.363	42.820	32.514	31.194	71,68	72,85	1,02	1,17
7	Kab. Ciamis	45.153	37.395	37.860	31.550	83,85	84,37	1,01	0,52
8	Kab. Kuningan	25.272	30.246	20.977	23.116	83,00	76,43	0,92	-6,58
9	Kab. Cirebon	68.066	45.481	48.791	29.404	71,68	64,65	0,90	-7,03
10	Kab. Majalengka	28.894	28.196	20.100	24.148	69,56	85,64	1,23	16,08
11	Kab. Sumedang	37.626	27.537	34.191	25.005	90,87	90,81	1,00	-0,07
12	Kab. Indramayu	51.486	58.284	34.740	44.682	67,47	76,66	1,14	9,19
13	Kab. Subang	29.232	31.385	25.900	25.900	88,60	82,52	0,93	-6,08
14	Kab. Purwakarta	27.989	21.542	18.399	17.830	65,74	82,77	1,26	17,03
15	Kab. Karawang	70.800	51.446	52.267	43.853	73,82	85,24	1,15	11,42
16	Kab. Bekasi	60.258	57.376	55.880	51.282	92,73	89,38	0,96	-3,36
17	Kota Bogor	22.748	28.435	20.163	23.265	88,64	81,82	0,92	-6,82
18	Kota Sukabumi	7.848	6.976	6.540	6.758	83,33	96,88	1,16	13,54
19	Kota Bandung	69.946	53.739	65.681	49.474	93,90	92,06	0,98	-1,84
20	Kota Cirebon	8.346	7.276	7.490	5.778	89,74	79,41	0,88	-10,33
21	Kota Bekasi	46.748	59.644	46.748	55.614	100,00	93,24	0,93	-6,76
22	Kota Depok	31.390	28.470	24.820	25.550	79,07	89,74	1,13	10,67
23	Kota Cimahi	12.840	9.309	12.519	9.309	97,50	100,00	1,03	2,50
24	Kota Tasikmalaya	17.594	15.790	15.178	14.378	86,27	91,06	1,06	4,79
25	Kota Banjar	5.280	5.032	4.212	4.656	79,77	92,53	1,16	12,76
	Jawa Barat	1.195.758	1.103.168	926.911	860.194	77,52	77,97	1,01	0,46

Lampiran 6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota
(Sumber: SUSEDA Jawa Barat, 2005, Hal. 81-82 & 144-145)

Kota/Kab	Jumlah pendd. 16-18 th		16-18 th Sdg sekolah		APS (16 - 18)		IP	D APS (%)
	L	P	L	P	L (%)	P (%)		
Kab. Bogor	136.860	107.514	46.144	31.374	33,72	29,18	0,87	-4,53
Kab. Sukabumi	69.203	54.839	34.188	21.804	49,40	39,76	0,80	-9,64
Kab. Cianjur	65.296	56.728	11.124	12.780	17,04	22,53	1,32	5,49
Kab. Bandung	114.020	88.384	55.474	31.674	48,65	35,84	0,74	-12,82
Kab. Garut	57.080	43.905	23.785	11.060	41,67	25,19	0,60	-16,48
Kab. Tasikmalaya	53.924	43.864	17.823	9.523	33,05	21,71	0,66	-11,34
Kab. Ciamis	35.017	31.550	15.516	11.066	44,31	35,07	0,79	-9,24
Kab. Kuningan	22.884	27.892	10.497	17.163	45,87	61,53	1,34	15,66
Kab. Cirebon	73.790	63.661	35.464	33.585	48,06	52,76	1,10	4,70
Kab. Majalengka	28.834	25.584	9.372	6.720	32,50	26,27	0,81	-6,24
Kab. Sumedang	22.866	25.731	15.015	11.658	65,67	45,31	0,69	-20,36
Kab. Indramayu	57.660	34.632	12.450	16.740	21,59	48,34	2,24	26,74
Kab. Subang	45.719	24.926	21.940	11.771	47,99	47,22	0,98	-0,77
Kab. Purwakarta	20.565	18.764	11.748	8.193	57,13	43,66	0,76	-13,46
Kab. Karawang	64.903	56.474	29.503	26.132	45,46	46,27	1,02	0,82
Kab. Bekasi	65.076	56.100	34.210	25.278	52,57	45,06	0,86	-7,51
Kota Bogor	23.782	24.816	10.857	10.340	45,85	41,67	0,91	-3,99
Kota Sukabumi	10.028	8.720	7.194	5.668	71,74	65,00	0,91	-6,74
Kota Bandung	68.240	54.592	50.327	31.561	73,75	57,81	0,78	-15,94
Kota Cirebon	8.988	9.202	5.564	6.206	61,90	67,44	1,09	5,54
Kota Bekasi	59.644	55.614	46.748	38.688	78,38	69,57	0,89	-8,81
Kota Depok	43.070	40.150	31.390	22.630	72,88	56,36	0,77	-16,52
Kota Cimahi	11.877	14.766	8.346	10.272	70,27	69,57	0,99	-0,71
Kota Tasikmalaya	16.010	15.178	11.554	10.550	72,17	69,51	0,96	-2,66
Kota Banjar	4.972	4.190	1.982	1.986	39,86	47,40	1,19	7,54
Jawa Barat	1.180.308	987.776	558.215	424.422	47,29	42,97	0,91	-4,33

Lampiran 7. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 19 - 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota
(Sumber: SUSEDA Jawa Barat. 2005, Hal. 81-82 & 147-148)

No	Kota/Kab	Jumlah pendd. 19-24 th		19-24 th Sdg sekolah		APS (19 - 24)		IP	D APS (%)
		L	P	L	P	L (%)	P (%)		
1	Kab. Bogor	214.373	231.569	13.193	4.857	6,15	2,10	0,34	-4,06
2	Kab. Sukabumi	120.909	117.109	8.590	3.634	7,10	3,10	0,44	-4,00
3	Kab. Cianjur	92.600	83.596	1.888	1.336	2,04	1,60	0,78	-0,44
4	Kab. Bandung	254.346	290.716	24.894	17.832	9,79	6,13	0,63	-3,65
5	Kab. Garut	119.450	117.900	4.535	1.550	3,80	1,31	0,35	-2,48
6	Kab. Tasikmalaya	76.475	72.530	6.033	3.408	7,89	4,70	0,60	-3,19
7	Kab. Ciamis	69.463	61.346	9.724	4.344	14,00	7,08	0,51	-6,92
8	Kab. Kuningan	66.298	46.498	6.898	1.675	10,40	3,60	0,35	-6,80
9	Kab. Cirebon	137.899	127.994	7.267	490	5,27	0,38	0,07	-4,89
10	Kab. Majalengka	66.562	68.516	1.994	1.994	3,00	2,91	0,97	-0,09
11	Kab. Sumedang	45.261	49.932	4.848	4.377	10,71	8,77	0,82	-1,95
12	Kab. Indramayu	90.618	83.604	4.500	4.080	4,97	4,88	0,98	-0,09
13	Kab. Subang	58.355	76.162	3.646	4.793	6,25	6,29	1,01	0,05
14	Kab. Purwakarta	44.324	46.074	2.680	773	6,05	1,68	0,28	-4,37
15	Kab. Karawang	106.257	99.488	14.338	5.067	13,49	5,09	0,38	-8,40
16	Kab. Bekasi	112.156	118.338	12.056	6.050	10,75	5,11	0,48	-5,64
17	Kota Bogor	53.251	51.700	11.374	6.204	21,36	12,00	0,56	-9,36
18	Kota Sukabumi	17.004	12.862	3.052	1.526	17,95	11,86	0,66	-6,08
19	Kota Bandung	135.627	148.422	36.679	39.238	27,04	26,44	0,98	-0,61
20	Kota Cirebon	16.478	18.404	1.284	2.354	7,79	12,79	1,94	5,00
21	Kota Bekasi	122.512	134.602	30.628	12.896	25,00	9,58	0,38	-15,42
22	Kota Depok	74.460	98.550	17.520	19.710	23,53	20,00	0,85	-3,53
23	Kota Cimahi	29.532	37.236	6.741	4.815	22,83	12,93	0,57	-9,90
24	Kota Tasikmalaya	26.050	36.874	5.514	3.012	21,17	8,17	0,39	-13,00
25	Kota Banjar	8.052	9.820	850	188	10,56	1,91	0,18	-8,64
	Jawa Barat	2.158.312	2.239.842	240.726	156.203	11,15	6,97	0,63	-4,18

Lampiran 8. Rekapitulasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK sampai SM Menurut Kabupaten/ Kota

KAB/KOTA	APK TK			APK SD			APK SMP			APK SM		
	TK L	TK P	D TK	SD L	SD P	D SD	SMP L	SMP P	D SMP	SM L	SM P	D SM
Kab. Bogor	8.4	8.8	0.4	116.47	105.82	-10.65	69.78	55.68	-14.1	27.72	26.59	-1.13
Kab. Sukabumi	6.6	7.1	0.5	105.23	105.65	0.42	59.34	57.32	-2.02	29.1	26.11	-2.99
Kab. Cianjur	2.7	2.8	0.1	110.8	108.82	-1.98	49.26	47.69	-1.57	19.95	15.83	-4.12
Kab. Bandung	7.1	7.4	0.3	136.16	87.65	-48.51	90.08	61.83	-28.25	22.05	21.15	-0.9
Kab. Garut	6.4	7.6	1.2	107.62	109.01	1.39	61.91	64.61	2.7	35.49	33.72	-1.77
Kab. Tasikmalaya	6.5	6.8	0.3	110.36	101.89	-8.47	59.28	62.24	2.96	18.1	20.1	2
Kab. Ciamis	4.2	8.5	4.3	110.16	94.55	-15.61	78.33	72.84	-5.49	23	22.14	-0.86
Kab. Kuningan	26	55.3	29.3	108.97	100.49	-8.48	70.72	66.98	-3.74	37.45	34.27	-3.18
Kab. Cirebon	5.4	5.8	0.4	109.09	99.6	-9.49	68.24	57.91	-10.33	25.52	23.45	-2.07
Kab. Majalengka	15	19	4	108.92	113.44	4.52	63.99	68.47	4.48	29.21	25.57	-3.64
Kab. Sumedang	9.1	9.4	0.3	113.36	106.33	-7.03	73.08	74.79	1.71	29.5	26.7	-2.8
Kab. Indramayu	8.9	11.8	2.9	104.05	94.81	-9.24	60.53	78.08	17.55	33.87	19.77	-14.1
Kab. Subang	5.1	6.6	1.5	134.58	97.33	-37.25	92.82	72.74	-20.08	40.28	24.29	-15.99
Kab. Purwakarta	14	16.5	2.5	106.45	104.82	-1.63	54.83	57.68	2.85	27.84	21.76	-6.08
Kab. Karawang	6.4	7.8	1.4	107.21	105.16	-2.05	65.23	62.04	-3.19	36.11	22.24	-13.87
Kab. Bekasi	18	17.3	-0.7	109.54	105.45	-4.09	91.75	91.92	0.17	65.78	65.94	0.16
Kota Bogor	8.6	8.7	0.1	119.09	117.59	-1.5	89.94	89.32	-0.62	142.13	125.92	-16.21
Kota Sukabumi	96.8	95.9	-0.9	117.85	112.63	-5.22	141.55	145.9	4.35	135.39	136.23	0.84

Lampiran 8. (Lanjutan)

Kota Bandung	14.5	14.9	0.4	113.19	111.38	-1.81	108.84	105.31	-3.53	77.48	78.9	1.42
Kota Cirebon	37.3	24	-13.3	145.55	134.06	-11.49	132.31	120.53	-11.78	121.95	104.83	-17.12
Kota Bekasi	24.9	27.6	2.7	100.78	97.33	-3.45	70.58	77.59	7.01	37.79	45.82	8.03
Kota Depok	24.7	25	0.3	124.35	108.21	-16.14	84.24	73.06	-11.18	49.84	43.08	-6.76
Kota Cimahi	21.2	23.1	1.9	99.56	100.1	0.54	66.24	75.14	8.9	66.58	64.9	-1.68
Kota Tasikmalaya	12.9	14.4	1.5	126.81	108.36	-18.45	81.94	71.02	-10.92	84.81	72.87	-11.94
Kota Banjar	11	12.6	1.6	107.6	102.28	-5.32	67.31	67.94	0.63	25.58	22.34	-3.24
JAWA BARAT	10.1	11.4	1.3	113.37	102.42	-10.95	72.71	67.94	-4.77	37.32	33.9	-3.42

(Sumber: Profil Pendidikan Jawa Barat Tahun 2005, Tabel 2.2)

Lampiran 9 . Rekapitulasi Siswa SMA Peserta Ujian Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2006

NO	PROGRAM	2003-2004		PEREMPUAN		JML	DISP (P-L)
		JML	%	JML	%		
1	BAHASA						
	2003-2004	1308	44,89	1606	55,11	2914	10,23
	2004-2005	1329	43,67	1714	56,33	3043	12,65
	2005-2006	1219	43,06	1612	56,94	2831	13,88
2	IPA						
	2003-2004	22946	42,27	31341	57,73	54287	15,46
	2004-2005	23784	42,02	32818	57,98	56602	15,96
	2005-2006	36365	57,31	27085	42,69	63450	-14,63
3	IPS						
	2003-2004	42955	53,28	37662	46,72	80617	-6,56
	2004-2005	43412	53,19	38201	46,81	81613	-6,38
	2005-2006	41556	53,05	36785	46,95	78341	-6,09
4	JUMLAH KETIGA						
	2003-2004	67209	48,77	70609	51,23	137818	2,46
	2004-2005	68525	48,51	72733	51,49	141258	2,98
	2005-2006	45606	31,53	65482	45,28	144622	13,74

Sumber: Subdis Dikmenti Disdik Prov. Jawa Barat, 2006

Lampiran 10. Penduduk Usia 7-12 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota

No	KAB/KOTA	Tidak/Blm sekolah					Tidak bersekolah lagi				
		L		P		D	L		P		D
		n	%	n	%		n	%	n	%	
1	Kab. Bogor	12.538	4,12	9.190	3,05	-1,07	4.726	1,55	6.827	2,27	0,72
2	Kab. Sukabumi	8.258	5,14	1.156	0,78	-4,36	2.973	1,85	5.285	3,56	1,71
3	Kab. Cianjur	1.220	0,73	2.440	1,52	0,79	2.440	1,45	4.444	2,77	1,32
4	Kab. Bandung	6.462	2,61	5.226	1,91	-0,7	4.414	1,78	4.202	1,53	-0,25
5	Kab. Garut	6.525	3,64	3.540	2,12	-1,52	4.535	2,53	2.765	1,66	-0,87
6	Kab. Tasikmalaya	2.185	1,82	3.147	3,13	1,31	1.223	1,02	2.886	2,87	1,85
7	Kab. Ciamis	2.431	2,68	2.949	3,44	0,76	2.431	2,68	0	0	-2,68
8	Kab. Kuningan	481	0,76	1.426	1,85	1,09	1.194	1,86	713	0,92	-0,96
9	Kab. Cirebon	1.256	0,87	1.543	1,06	0,19	0	0,00	4.405	3,03	3,03
10	Kab. Majalengka	678	1,00	678	0,98	-0,02	0	0,00	678	0,98	0,98
11	Kab. Sumedang	490	0,81	687	1,06	0,25	687	1,14	0	0,00	-1,14
12	Kab. Indramayu	1.884	1,68	1.884	1,71	0,03	942	0,84	4.500	4,08	3,24
13	Kab. Subang	579	0,81	833	0,95	0,14	0	0,00	1.493	1,70	1,70
14	Kab. Purwakarta	361	0,7	1.856	3,16	2,46	1.444	2,82	1.134	2,21	-0,61
15	Kab. Karawang	3.371	2,44	4.213	4,03	1,59	842	0,61	842	0,81	0,20
16	Kab. Bekasi	2.662	1,75	1.716	1,35	-0,4	3.432	2,26	0	0,00	-2,26
17	Kota Bogor	517	0,93	517	1,10	0,17	1.034	1,87	0	0	-1,87
18	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	218	1,27	218	1,22	-0,05
19	Kota Bandung	1.706	1,30	0	0	-1,3	853	0,65	3.412	2,74	2,09
20	Kota Cirebon	428	2,74	1.070	5,21	2,47	214	1,37	214	1,04	-0,33
21	Kota Bekasi	0	0,00	0	0	0	306	0,57	1.612	1,23	0,66
22	Kota Depok	2.190	2,59	730	1,01	-1,58	730	0,86	2.190	3,03	2,17
23	Kota Cimahi	321	1,20	321	1,22	0,02	0	0,00	0	0	0,00
24	Kota Tasikmalaya	102	0,29	102	0,22	-0,07	902	2,58	1.906	4,20	1,62
25	Kota Banjar	410	3,95	346	3,35	-0,6	94	0,91	158	1,53	0,62
	Jawa Barat	57.055	2,15	45.570	1,77	-0,38	36.134	1,36	49.884	1,94	0,58

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 138-139)

Lampiran 11.

Penduduk Usia 13-15 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Tidak/Belum Sekolah					Tidak Bersekolah Lagi				
		L		P		D	L		P		D
		n	%	n	%		n	%	n	%	
1	Kab. Bogor	0	0	0	0	0	43.388	32,31	43.388	31,17	-1,14
2	Kab. Sukabumi	0	0	0	0	0	23.618	30,36	25.435	34,60	4,24
3	Kab. Cianjur	0	0	0	0	0	32.300	38,73	22.540	38,66	-0,07
4	Kab. Bandung	0	0	0	0	0	20.622	19,42	27.402	23,90	4,48
5	Kab. Garut	0	0	0	0	0	21.010	25,88	19.460	27,36	1,48
6	Kab. Tasikmalaya	0	0	0	0	0	12.849	28,32	11.626	27,15	-1,17
7	Kab. Ciamis	0	0	0	0	0	7.293	16,15	5.380	14,39	-1,76
8	Kab. Kuningan	0	0	0	0	0	4.295	17,00	7.130	23,57	6,57
9	Kab. Cirebon	0	0	0	0	0	19.275	28,32	16.077	35,35	7,03
10	Kab. Majalengka	0	0	0	0	0	8.794	30,44	4.048	14,36	-16,08
11	Kab. Sumedang	0	0	0	0	0	3.435	9,13	2.532	9,19	0,06
12	Kab. Indramayu	942	1,83	0	0	1,83	15.804	30,70	13.602	23,34	-7,36
13	Kab. Subang	0	0	833	2,65	2,65	3.332	11,40	4.652	14,82	3,42
14	Kab. Purwakarta	0	0	0	0	0	9.590	34,26	3.712	17,23	-17,03
15	Kab. Karawang	0	0	0	0	0	18.533	26,18	7.593	14,76	-11,42
16	Kab. Bekasi	0	0	0	0	0	4.378	7,27	6.094	10,62	3,35
17	Kota Bogor	0	0	0	0	0	2.585	11,36	5.170	18,18	6,82
18	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	1.308	16,67	218	3,13	-13,54
19	Kota Bandung	0	0	1.706	3,17	3,17	4.265	6,10	2.559	4,76	-1,34
20	Kota Cirebon	0	0	0	0	0	856	10,26	1.498	20,59	10,33
21	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0	0,00	4.030	6,76	6,76
22	Kota Depok	0	0	730	2,56	2,56	6.570	20,93	2.190	7,69	-13,24
23	Kota Cimahi	321	2,5	0	0	-2,5	0	0,00	0	0,00	0,00
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	2.416	13,73	1.412	8,94	-4,79
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	1.068	20,23	376	7,47	-12,76
	Jawa Barat	1.263	0,11	4.850	0,44	0,33	267.584	22,38	238.124	21,59	-0,79

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 141-142)

Lampiran 12.

Penduduk Usia 16-18 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Tidak/Blm sekolah						Tidak bersekolah lagi					
		L		P		D	L		P		D		
		n	%	n	%		n	%	n	%			
1	Kab. Bogor	0	0	1.247	1,16	1,16	90.716	66,28	74.893	69,66	3,38		
2	Kab. Sukabumi	0	0	1.156	2,11	2,11	35.015	50,60	31.879	58,13	7,53		
3	Kab. Cianjur	0	0	2.440	4,30	4,3	54.172	82,96	41.508	73,17	-9,79		
4	Kab. Bandung	0	0	0	0	0	58.546	51,35	56.710	64,16	12,81		
5	Kab. Garut	0	0	0	0	0	33.295	58,33	32.845	74,81	16,48		
6	Kab. Tasikmalaya	0	0	0	0	0	36.101	66,95	34.341	78,29	11,34		
7	Kab. Ciamis	0	0	0	0	0	19.501	55,69	20.484	64,93	9,24		
8	Kab. Kuningan	713	3,12	0	0	-3,12	11.674	51,01	10.729	38,47	-12,54		
9	Kab. Cirebon	0	0	0	0	0	38.326	51,94	30.076	47,24	-4,70		
10	Kab. Majalengka	0	0	0	0	0	19.462	67,50	18.864	73,73	6,23		
11	Kab. Sumedang	0	0	0	0	0	7.851	34,33	14.073	54,69	20,36		
12	Kab. Indramayu	0	0	0	0	0	45.210	78,41	17.892	51,66	-26,75		
13	Kab. Subang	0	0	0	0	0	23.779	52,01	13.155	52,78	0,77		
14	Kab. Purwakarta	0	0	361	1,92	1,92	8.817	42,87	10.210	54,41	11,54		
15	Kab. Karawang	0	0	0	0	0	35.400	54,54	30.342	53,73	-0,81		
16	Kab. Bekasi	0	0	0	0	0	30.866	47,43	30.822	54,94	7,51		
17	Kota Bogor	0	0	0	0	0	12.925	54,35	14.476	58,33	3,98		
18	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	2.834	28,26	3.052	35,00	6,74		
19	Kota Bandung	0	0	0	0	0	17.913	26,25	23.031	42,19	15,94		
20	Kota Cirebon	214	2,38	428	4,65	2,27	3.210	35,71	2.568	27,91	-7,80		
21	Kota Bekasi	0	0	806	1,45	1,45	12.896	21,62	16.120	28,99	7,37		
22	Kota Depok	0	0	0	0	0	11.680	27,12	17.520	43,64	16,52		
23	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	3.531	29,73	4.494	30,43	0,70		
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	4.456	27,83	4.628	30,49	2,66		
25	Kota Banjar	0	0	94	2,24	2,24	2.990	60,14	2.110	50,36	-9,78		
	Jawa Barat	927	0,08	6.532	0,66	0,58	621.166	52,63	556.822	56,37	3,74		

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 144-145)

Lampiran 13. Penduduk Usia 19 - 24 Tahun keatas yang Tidak/ Belum Sekolah dan yang Tidak Sekolah Lagi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	Tidak/Belum Sekolah					Tidak bersekolah lagi				
		L		P		D	L		P		D
		n	%	n	%		n	%	n	%	
1	Kab. Bogor	0	0	4.357	2,1	2,1	201.180	93,85	221.855	95,81	1,96
2	Kab. Sukabumi	0	0	0	0	0	112.319	92,90	113.475	96,90	4,00
3	Kab. Cianjur	1.220	1,32	0	0	-1,32	89.492	96,64	82.260	98,40	1,76
4	Kab. Bandung	0	0	0	0	0	229.452	90,21	272.884	93,87	3,66
5	Kab. Garut	775	0,65	0	0	-0,65	114.140	95,55	116.350	98,69	3,14
6	Kab. Tasikmalaya	0	0	0	0	0	70.442	92,11	69.122	95,30	3,19
7	Kab. Ciamis	983	1,42	0	0	-1,42	58.756	84,59	57.002	92,92	8,33
8	Kab. Kuningan	713	1,08	0	0	-1,08	58.687	88,52	44.823	96,40	7,88
9	Kab. Cirebon	2.974	2,16	0	0	-2,16	127.658	92,57	127.504	99,62	7,05
10	Kab. Majalengka	0	0	0	0	0	64.568	97,00	66.522	97,09	0,09
11	Kab. Sumedang	687	1,52	0	0	-1,52	39.726	87,77	45.555	91,23	3,46
12	Kab. Indramayu	0	0	942	1,13	1,13	86.118	95,03	78.582	93,99	-1,04
13	Kab. Subang	0	0	0	0	0	54.709	93,75	71.369	93,71	-0,04
14	Kab. Purwakarta	0	0	0	0	0	41.644	93,95	45.301	98,32	4,37
15	Kab. Karawang	1.684	1,58	0	0	-1,58	90.235	84,92	94.421	94,91	9,99
16	Kab. Bekasi	858	0,77	0	0	-0,77	99.242	88,49	112.288	94,89	6,40
17	Kota Bogor	0	0	0	0	0	41.877	78,64	45.496	88,00	9,36
18	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0	13.952	82,05	11.336	88,14	6,09
19	Kota Bandung	0	0	853	1	0,57	98.948	72,96	108.331	72,99	0,03
20	Kota Cirebon	214	1,3	214	1	-0,14	14.980	90,91	15.836	86,05	-4,86
21	Kota Bekasi	0	0	806	0,6	0,6	91.884	75,00	120.900	89,82	14,82
22	Kota Depok	0	0	730	0,74	0,74	56.940	76,47	78.110	79,26	2,79
23	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	22.791	77,17	32.421	87,07	9,90
24	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	20.536	78,83	33.862	91,83	13,00
25	Kota Banjar	0	0	0	0	0	7.202	89,44	9.632	98,09	8,65
	Jawa Barat	10.108	0,47	8.402	0,38	-0,09	1.907.478	88,38	2.075.237	92,65	4,27

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 147-148)

Lampiran 14. Jumlah Siswa Mengulang, Putus Sekolah, Naik Tingkat dan Lulusan Menurut Jenis Kelamin Propinsi Jawa Barat 2005

Sekolah	Komponen	Jenis kelamin	Tingkat						Jumlah	Lulusan
			I	II	III	IV	V	VI		
SD+MI	Siswa	L+P	876993	866030	856578	812704	786590	748057	4946952	725992
		P	435240	426287	419489	397091	379692	359419	2417219	348774
		L	441752	439744	437090	415613	406897	388638	2529733	377218
	Mengulang	L+P	17282	17072	16897	16029	15528	14771	97579	
		P	8575	8401	8269	7826	7493	7094	47659	
		L	8707	8671	8627	8203	8035	7677	49920	
	Putus sekolah	L+P	4052	3994	3939	3740	3634	3424	22753	
		P	2013	1969	1935	1834	1743	1648	11141	
		L	2039	2025	2004	1906	1862	1776	11612	
	Naik tingkat	L+P	-	848958	839682	796675	771062	733286		725992
		P	-	417886	411219	389265	372200	352325		348774
		L	-	431072	428463	407409	398862	380961		377218
	Mutasi	L+P	-34681	-35908	-1953	-17155	-3879	-32469		
		P	4380	2399	17795	13094	16264	159		
		L	-39061	-38306	-19749	-30249	-20144	-32628		

Lampiran 14 (Lanjutan)

Sekolah	Komponen	Jenis kelamin	I	II	III	Jumlah	Lulusan
SMP+MTS	Siswa	L+P	514441	495799	502989	1513229	494461
		P	256869	246316	250121	753305	245965
		L	257572	249483	252868	759924	248496
	Mengulang	L+P	1196	1154	1147	3497	
		P	596	573	570	1738	
		L	601	581	577	1759	
	Putus sekolah	L+P	5302	5108	5232	15642	
		P	2651	2539	2603	7792	
		L	2651	2569	2629	7850	
Naik tingkat	L+P	-	494645	501842	494461		
	P	-	245743	249551	245965		
	L	-	248902	252291	248496		
Mutasi	L+P	7387	-18064	-249	-10927		
	P	3966	-10267	-1594	-7895		
	L	3422	-7797	1344	-3031		
SMA+MI	Siswa	L+P	292193	272344	263329	827866	248678
		P	135730	129684	125506	390929	118659
		L	156464	142650	137823	436937	130019
	Mengulang	L+P	762	712	688	2162	
		P	355	339	328	1023	
		L	407	373	360	1139	
	Putus sekolah	L+P	2661	2477	2391	7529	
		P	1204	1153	1114	3470	
		L	1458	1324	1277	4059	

Lampiran 14 (Lanjutan)

Komponen	Jenis kelamin	I	II	III	Jumlah	Lulusan
Naik tingkat	L+P	-	271632	262640	248678	
	P	-	129355	125177	118659	
	L	-	142278	137463	130019	
Mutasi	L+P	4508	-5512	-63	-1067	
	P	-1460	-2975	-402	-4838	
	L	5969	-2537	339	3771	

A. Laki-laki dan Perempuan

Indikator	Tingkat						Rata-rata
	I	II	III	IV	V	VI	
% naik tingkat	97.5	97.55	97.45	97.50	97.46	97.56	97.51
% mengulang	1.99	1.98	2.07	2.03	2.06	1.98	2.02
% putus sekolah	0.47	0.46	0.48	0.47	0.48	0.46	0.47
% bertahan	100.0	99.52	99.05	98.56	98.08	97.58	98.80
Tahun Siswa	1020	1015	1011	1006	1001	995	
Koefisien Efisiensi		97.32	97.04	96.80	96.54	96.31	96.80

Jumlah keluaran	971
Jumlah tahun siswa	6050
Jumlah putus sekolah	28
Jumlah mengulang	122

Rata-rata lama belajar			Tahun Siswa Terbuang		
Lulusan	Putus sekolah	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sekolah
6.12	3.56	6.05	534	433	101
Tahun Masuk per lulusan			Rasio Keluaran/Masukan		
6.23			0.96		

b. Perempuan

Indikator	Tingkat						Rata-rata
	I	II	III	IV	V	VI	
% naik tingkat	97.53	97.54	97.45	97.47	97.45	97.55	97.50
% mengulang	2.00	1.99	2.07	2.05	2.07	1.98	2.03
% putus sekolah	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.46	0.47
% bertahan	100	99.52	99.04	98.55	98.06	97.56	98.79
Tahun Siswa	1020	1015	1011	1006	1001	993	
Koefisien Efisiensi		97.30	97.02	96.77	96.51	96.15	96.75

Jumlah keluaran	969
Jumlah tahun siswa	6048
Jumlah putus sekolah	29
Jumlah mengulang	121

Rata-rata lama belajar			Tahun Siswa Terbuang		
Lulusan	Putus sekolah	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sekolah
6.12	3.56	6.03	524	422	102
Tahun Masuk per lulusan			Rasio Keluaran/Masukan		
6.24			0.96		

c. Laki-laki

Indikator	Tingkat						Rata-rata
	I	II	III	IV	V	VI	
% naik tingkat	97.57	97.56	97.46	97.53	97.47	97.56	97.52
% mengulang	1.97	1.97	2.06	2.01	2.06	1.99	2.01
% putus sekolah	0.46	0.46	0.48	0.47	0.48	0.46	0.47
% bertahan	100.00	99.53	99.06	98.57	98.09	97.60	98.81
Tahun Siswa	1020	1015	1011	1006	1001	996	
Koefisien Efisiensi		97.33	97.05	96.82	96.56	96.33	96.82

Jumlah keluaran	971
Jumlah tahun siswa	6050
Jumlah putus sekolah	28
Jumlah mengulang	121

Rata-rata lama belajar			Tahun Siswa Terbuang		
Lulusan	Putus sekolah	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sekolah
6.12	3.56	6.05	532	431	101
Tahun Masuk per lulusan			Rasio Keluaran/Masukan		
6.23			0.96		

Lampiran 16. Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SMP+MTS

A. Laki-laki dan Perempuan

Indikator	I	II	III	Rata-rata
% naik tingkat	98.70	98.77	98.73	98.73
% mengulang	0.24	0.23	0.23	0.23
% putus sekolah	1.06	1.06	1.04	1.04
% bertahan	100	98.94	97.94	98.96
Tahun Siswa	1002	992	992	
Koefisien Efisiensi		98.24	97.71	97.97

Jumlah keluaran	969
Jumlah tahun siswa	2976
Jumlah putus sekolah	31
Jumlah mengulang	7

Rata-rata lama belajar			Tahun Siswa Terbuang		
Lulusan	Putus sekolah	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sekolah
3.01	1.99	2.98	75	14	61
Tahun Masuk per lulusan			Rasio Keluaran/Masukan		
3.07			0.98		

b. Perempuan

Indikator	I	II	III	Rata-rata
% naik tingkat	98.70	98.77	98.73	98.73
% mengulang	0.24	0.23	0.23	0.23
% putus sekolah	1.06	1.00	1.04	1.04
% bertahan	100	98.93	97.94	98.96
Tahun Siswa	1002	992	992	
Koefisien Efisiensi		98.23	97.71	97.97

Jumlah keluaran	969
Jumlah tahun siswa	2976
Jumlah putus sekolah	31
Jumlah mengulang	7

Rata-rata lama belajar			Tahun Siswa Terbuang		
Lulusan	Putus sekolah	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sekolah
3.01	1.99	2.98	75	14	62
Tahun Masuk per lulusan			Rasio Keluaran/Masukan		
3.07			0.98		

c. Laki-laki

Indikator	I	II	III	Rata-rata
% naik tingkat	98.71	98.77	98.73	98.73
% mengulang	0.24	0.23	0.23	0.23
% putus sekolah	1.05	1.01	1.04	1.04
% bertahan	100	98.95	97.95	98.96
Tahun Siswa	1002	992	992	
Koefisien Efisiensi		98.24	97.71	97.97

Jumlah keluaran	969
Jumlah tahun siswa	2976
Jumlah putus sekolah	31
Jumlah mengulang	7

Rata-rata lama belajar			Tahun Siswa Terbuang		
Lulusan	Putus sekolah	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sekolah
3.01	2.00	2.98	75	14	61
Tahun Masuk per lulusan			Rasio Keluaran/Masukan		
3.07			0.98		

Lampiran 17. Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SMA+MA

A. Laki-laki dan Perempuan

Indikator	I	II	III	Rata-rata
% naik tingkat	99.15	98.94	98.92	99.00
% mengulang	0.00	0.27	0.28	0.18
% putus sekolah	0.85	0.79	0.81	0.82
% bertahan	100.00	99.15	98.36	99.17
Tahun Siswa	1000	991	986	
Koefisien Efisiensi		98.65	98.20	98.43

Jumlah keluaran	976
Jumlah tahun siswa	2981
Jumlah putus sekolah	24
Jumlah mengulang	5

Rata-rata lama belajar			Tahun Siswa Terbuang		
Lulusan	Putus sekolah	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sekolah
3.01	1.98	2.98	62	14	48
Tahun Masuk per lulusan			Rasio Keluaran/Masukan		
3.05			0.98		

b. Perempuan

Indikator	I	II	III	Rata-rata
% naik tingkat	99.18	98.93	98.91	99.01
% mengulang	0.00	0.27	0.28	0.18
% putus sekolah	0.82	0.80	0.81	0.81
% bertahan	100.00	99.18	98.39	99.19
Tahun Siswa	1000	995	987	
Koefisien Efisiensi		98.66	98.21	98.44

Jumlah keluaran	976
Jumlah tahun siswa	2981
Jumlah putus sekolah	24
Jumlah mengulang	5

Rata-rata lama belajar			Tahun Siswa Terbuang		
Lulusan	Putus sekolah	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sekolah
3.01	3.00	2.98	62	14	48
Tahun Masuk per lulusan			Rasio Keluaran/Masukan		
3.05			0.98		

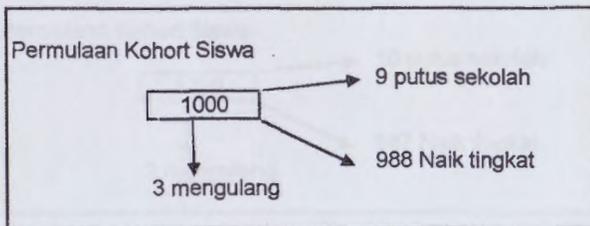
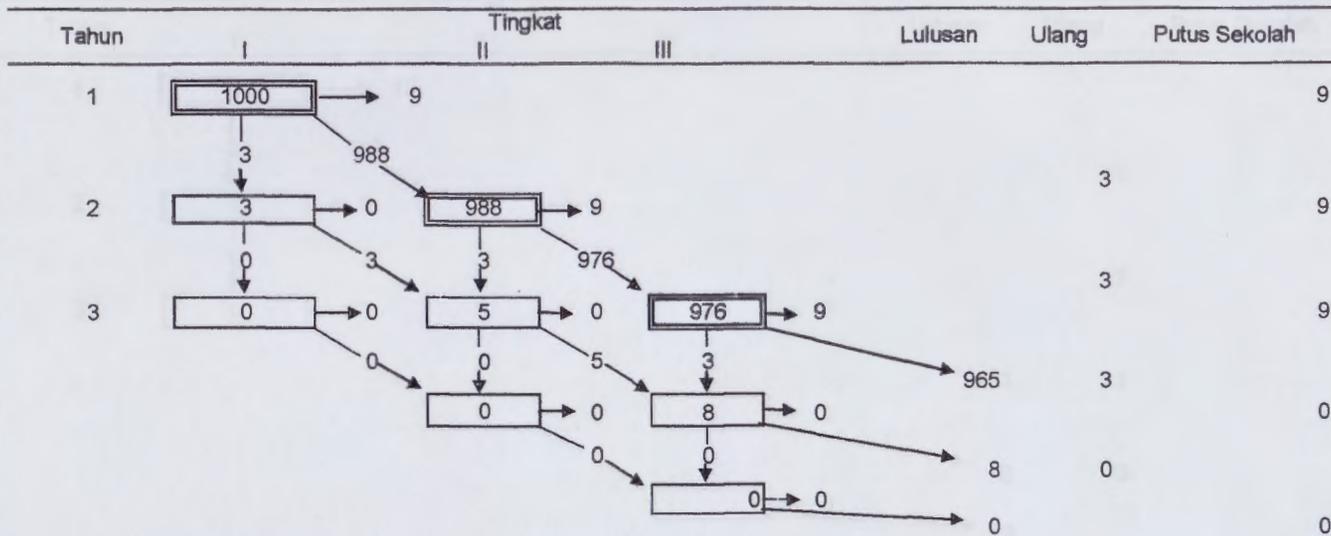
c. Laki-laki

	I	II	III	Rata-rata
% naik tingkat	99.12	98.94	98.92	98.99
% mengulang	0.00	0.27	0.28	0.18
% putus sekolah	0.88	0.79	0.80	0.82
% bertahan	100	99.12	98.33	99.15
Tahun Siswa	1000	994	986	
Koefisien Efisiensi		98.64	98.20	98.42

Jumlah keluaran	976
Jumlah tahun siswa	2980
Jumlah putus sekolah	25
Jumlah mengulang	5

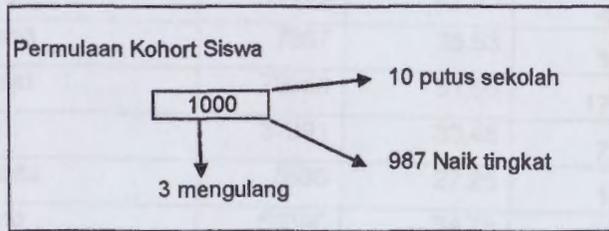
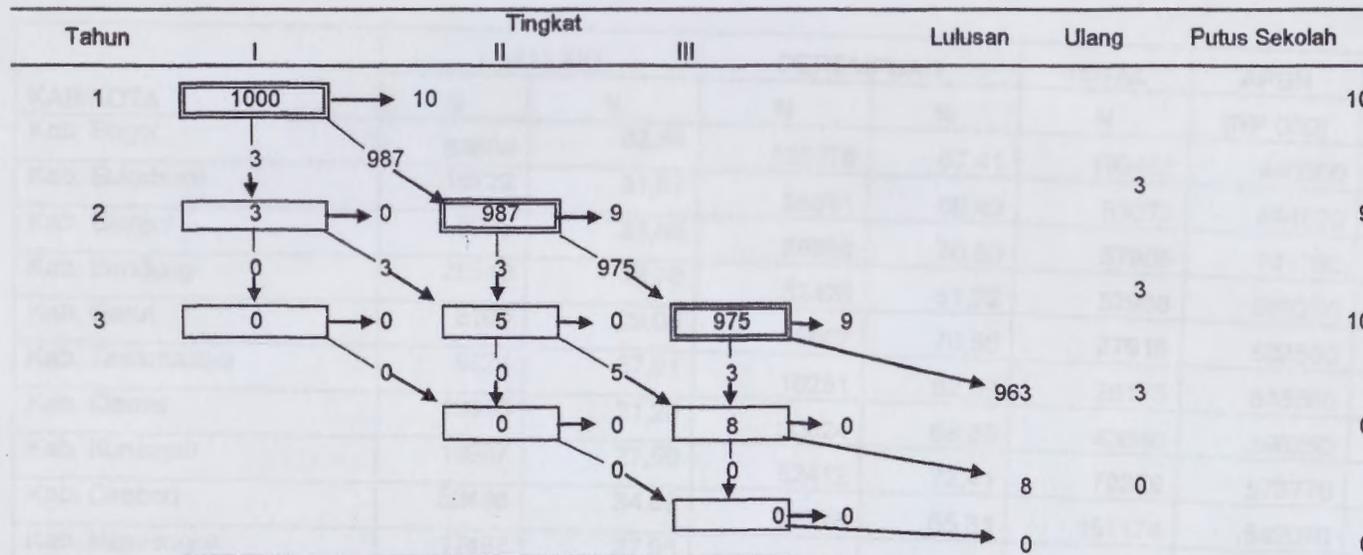
Rata-rata lama belajar			Tahun Siswa Terbuang		
Lulusan	Putus sekolah	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sekolah
3.01	1.97	2.98	62	14	48
Tahun Masuk per lulusan			Rasio Keluaran/Masukan		
3.05			0.98		

KOHORT PER 1000 SISWA (PEREMPUAN) SM+MA



Siswa bertahan	991	982	984
Tahun siswa	1003	993	984
Mengulang	8		
Putus sekolah	27		
Lulusan	973		

KOHORT PER 1000 SISWA (LAKI-LAKI) SM+MA



Siswa bertahan	990	990	980	983	0
Tahun siswa	1003	993	983		
Mengulang	8				
Putus sekolah	29				
Lulusan	971				

KAB/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL	APBN	APBD
	N	%	N	%	N	(RP 000)	(RP 000)
Kab. Bogor	64684	32,59	133778	67,41	198462	443800	471000
Kab. Sukabumi	16722	31,51	36351	68,49	53073	494520	366000
Kab. Cianjur	8907	23,50	28998	76,50	37905	741780	309000
Kab. Bandung	20540	38,78	32428	61,22	52968	583280	360000
Kab. Garut	8109	29,05	19807	70,95	27916	532560	459000
Kab. Tasikmalaya	9924	37,91	16251	62,09	26175	646680	375000
Kab. Ciamis	13616	31,20	30024	68,80	43640	396250	381000
Kab. Kuningan	19967	27,59	52412	72,41	72379	573770	17000
Kab. Cirebon	52446	34,69	98728	65,31	151174	542070	435000
Kab. Majalengka	17492	27,95	45093	72,05	62585	383570	372000
Kab. Sumedang	7857	35,53	14256	64,47	22113	446970	345000
Kab. Indramayu	78658	31,56	170585	68,44	249243	580110	417000
Kab. Subang	37091	33,48	73692	66,52	110783	519880	342000
Kab. Purwakarta	5536	27,25	14782	72,75	20318	564260	231000
Kab. Karawang	59390	34,78	111396	65,23	170786	548410	387000
Kab. Bekasi	36821	29,04	89980	70,96	126801	500860	186000
Kota Bogor	3382	29,30	8159	70,70	11541	272620	30000

Lampiran 19.

(Lanjutan)

Kota Sukabumi	128	43,39	167	56,61	295	256770	0
Kota Bandung	1340	20,98	5047	79,02	6387	317000	15000
Kota Cirebon	1343	20,77	5124	79,23	6467	202880	30000
Kota Bekasi	6686	26,38	18658	73,62	25344	317000	30000
Kota Depok	4609	18,94	19731	81,06	24340	304320	30000
Kota Cimahi	743	44,33	933	55,67	1676	310660	12000
Kota Tasikmalaya	1906	33,28	3822	66,72	5728	247260	0
Kota Banjar	1440	30,00	3360	70,00	4800	247260	0
BPKP/LP/SKB						418440	0
JAWA BARAT	479337	31,68	1033562	68,32	1512899	11392980	6000000

(Sumber: Sub-Dinas PLS-Dinas Pendidikan Tahun 2005)

Lampiran 20. Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Umur Perkawinan Pertama Menurut Kabupaten/ Kota

	≤ 15 TAHUN		16 TAHUN		17-18 TAHUN		≤ 18 TAHUN	
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
Kab. Bogor	268.863	25,38	129.572	12,23	274.234	25,89	672.669	63,5
Kab. Sukabumi	178.706	26,93	106.696	16,08	186.481	28,11	471.883	71,12
Kab. Cianjur	175.416	29,7	96.464	16,33	155.804	26,38	427.684	72,41
Kab. Bandung	141.528	11,43	120.518	9,73	428.290	34,58	690.336	55,74
Kab. Garut	146.660	22,43	98.650	15,09	192.115	29,39	437.425	66,91
Kab. Tasikmalaya	70.621	13,75	60.315	11,74	186.620	36,33	317.556	61,82
Kab. Ciamis	122.598	23,94	70.658	13,8	161.853	31,6	355.109	69,34
Kab. Kuningan	40.511	12,6	46.662	14,51	106.328	33,06	193.501	60,17
Kab. Cirebon	66.299	11,51	74.126	12,87	156.950	27,25	297.375	51,63
Kab. Majalengka	73.562	19,29	57.190	15	149.374	39,18	280.126	73,47
Kab. Sumedang	57.510	16,74	43.515	12,67	105.048	30,57	206.073	59,98
Kab. Indramayu	107.472	19,96	120.552	22,39	182.184	33,84	410.208	76,19
Kab. Subang	47.071	10,06	69.357	14,83	181.793	38,87	298.221	63,76
Kab. Purwakarta	36.657	16,51	37.277	16,79	67.946	30,61	141.880	63,91
Kab. Karawang	112.088	18,99	107.884	18,28	177.012	29,99	396.984	67,26
Kab. Bekasi	39.886	7,19	49.456	8,92	161.788	29,18	251.130	45,29
Kota Bogor	13.442	6,3	18.612	8,72	49.115	23	81.169	38,02
Kota Sukabumi	5.886	7,38	6.322	7,92	20.056	25,14	32.264	40,44
Kota Bandung	43.503	7,13	38.385	6,29	145.863	23,92	227.751	37,34

Lampiran 20.

(Lanjutan)

Kota Cirebon	6.206	8,33	5.136	6,9	13.482	18,1	24.824	33,33
Kota Bekasi	35.464	6,93	29.016	5,67	103.168	20,16	167.648	32,76
Kota Depok	33.580	9,27	18.980	5,24	61.320	16,94	113.880	31,45
Kota Cimahi	11.556	8,89	5.778	4,44	26.643	20,49	43.977	33,82
Kota Tasikmalaya	18.614	10,74	18.834	10,87	44.508	25,69	81.956	47,3
Kota Banjar	8.292	15,36	7.032	13,03	17.062	31,61	32.386	60
JAWA BARAT	1.861.991	16,28	1.436.987	12,57	3.355.037	29,34	6.654.015	58,19

(Sumber: SUSEDA Jawa Barat Tahun 2005, Hal. 213-214)